

SKRIPSI
REPRESENTASI KETIDAKADILAN HUKUM
DALAM FILM SERIAL “BAD GUYS” (2025) VERSI INDONESIA
(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi (S. Tr. I. Kom.).



**POLITEKNIK
TEMPO**

Disusun Oleh

ALFFITO DEANNOFAL

NIM: 221310006

PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA

POLITEKNIK TEMPO

JAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS AKHIR

 POLITEKNIK TEMPO	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK TEMPO PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA	Form TA-15
PENGESAHAN TUGAS AKHIR		

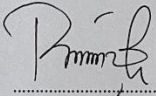
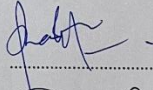
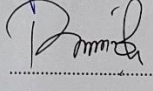
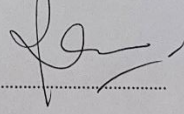
Judul Tugas Akhir : Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial “Bad Guys”
(2025) Versi Indonesia (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Nama : Alffito Deannofal

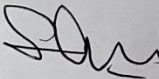
NIM : 221310006

Tugas Akhir ini telah dinyatakan lulus dalam sidang Tugas Akhir pada 11 Juni 2026 dihadapan penguji dan telah di revisi sesuai catatan Tim Penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Terapan D4 S.Tr.I.Kom di bidang Ilmu Komunikasi.

Jakarta, 02 Juli 2026

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Program Studi <u>Rosdiana, S.Sos., M.Si.</u> NIDN. 0304048002	2/07'26	
Penguji I <u>Rachma Tri Widuri, S.Sos., M.Si.</u> NIDN. 0316107701	2/7'26	
Penguji II <u>Rosdiana, S.Sos., M.Si.</u> NIDN. 0304048002	2/07'26	
Pembimbing I <u>Avoedia Gita Citravomie, S.Sos., M.Ikom.</u> NIDN. 0308028606	2/07/26	
Pembimbing II <u>Rizki Ayu Budipratiwi, S.Sos., M.Ikom.</u> NIDN. 0318087807	2/07'26	

Mengetahui,
Direktur Politeknik Tempo


Shalfi Andri, S.P., M.M
 NIDN. 0328087202

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

 POLITEKNIK TEMPO	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK TEMPO PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA	Form TA-10
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR		

**“REPRESENTASI KETIDAKADILAN HUKUM
DALAM FILM SERIAL “BAD GUYS” (2025) VERSI INDONESIA
(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)”**

Disusun oleh :

Alffito Deannofal

221310006

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan pada Ujian Sidang Tugas Akhir

Menyetujui,

Jakarta, 05 Juni 2026

Pembimbing I



Ayoedia Gita Citrayomie, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0308028606

Pembimbing II



Rizki Ayu Budipratiwi, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0318087807

Menyetujui,

Ketua Program Studi Produksi Media



Rosdiana, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0304048002

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

 POLITEKNIK TEMPO	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK TEMPO PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA	Form TA-16
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI		

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Alffito Deannofal

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 2004

NIM : 221310006

Program Studi : Produksi Media

Judul Tugas Akhir : Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial "Bad Guys"
(2025) versi Indonesia (Analsisis Semiotika Roland Barthes)

Dosen Pembimbing : 1. Ayoedia Gita Citrayomie, S.Sos., M.I.Kom.
2. Rizki Ayu Budipratiwi, S.Sos., M.I.Kom.

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tugas Akhir.

Jakarta, 05 Juni 2026

Mahasiswa Ybs.



221310006

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang serius, mulai dari penyalahgunaan wewenang aparat, diskriminasi dalam proses peradilan, hingga korupsi yudisial yang bersifat sistemik. Film serial sebagai media komunikasi massa berperan aktif merepresentasikan dan membentuk persepsi publik terhadap realitas hukum tersebut, namun kajian semiotik terhadap representasi ketidakadilan hukum dalam serial kriminal Indonesia kontemporer masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi ketidakadilan hukum melalui tanda-tanda visual dan naratif dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia, sekaligus mengungkap makna denotatif, konotatif, dan mitos menggunakan semiotika Roland Barthes. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, di mana data primer dikumpulkan melalui observasi sistematis terhadap 48 adegan dari 10 episode serial, mencakup elemen visual, dialog, properti simbolik, dan latar tempat. Analisis menemukan 6 kategori ketidakadilan hukum yang direpresentasikan secara berlapis: prosedural, struktural, substantif, sistemik, simbolik, dan *vigilante justice*. Simbol-simbol hukum seperti toga hakim, senjata, dan borgol mengalami pembalikan makna dari lambang keadilan menjadi instrumen dominasi. Pada tingkat mitos, serial ini menaturalisasi gagasan bahwa sistem hukum Indonesia secara fundamental telah gagal, sehingga tindakan di luar prosedur hukum tampak dapat dibenarkan secara moral. Dengan demikian, film serial *Bad Guys* (2025) berfungsi sebagai medium kritik sosial yang secara sistematis mengkonstruksi wacana krisis legitimasi hukum di Indonesia melalui akumulasi tanda visual dan naratif lintas episode.

Kata Kunci: Representasi, Ketidakadilan Hukum, Semiotika Roland Barthes, *Vigilante Justice*, Film Serial

POLITEKNIK
TEMPO

ABSTRACT

*The Indonesian legal system still faces serious structural problems, ranging from abuse of authority by law enforcement officials and discrimination in the judicial process to systemic judicial corruption. As a form of mass media, television series play an active role in representing and shaping public perceptions of this legal reality; however, semiotic studies examining the representation of legal injustice in contemporary Indonesian crime series remain very limited. This study aims to describe representations of legal injustice through visual and narrative signs in the Indonesian version of the TV series *Bad Guys* (2025), while also uncovering denotative, connotative, and mythical meanings using Roland Barthes's semiotics. The study employs a qualitative approach with an interpretive paradigm, where primary data was collected through systematic observation of 48 scenes across 10 episodes of the series, encompassing visual elements, dialogue, symbolic props, and settings. The analysis identified six categories of legal injustice represented in layered ways: procedural, structural, substantive, systemic, symbolic, and vigilante justice. Legal symbols such as judges' robes, weapons, and handcuffs undergo a reversal of meaning, transforming from emblems of justice into instruments of domination. On a mythical level, the series normalizes the idea that Indonesia's legal system has fundamentally failed, making actions outside legal procedures appear morally justifiable. Thus, the *Bad Guys* (2025) series functions as a medium of social criticism that systematically constructs a discourse of the crisis of legal legitimacy in Indonesia through the accumulation of visual and narrative signs across episodes.*

Keywords: Representation, Legal Injustice, Roland Barthes's Semiotics, Vigilante Justice, TV Series

POLITEKNIK
TEMPO

PRAKATA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial Bad Guys (2025) Versi Indonesia (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. Penyusunan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi (S. Tr. I. Kom.) pada Program Studi Produksi Media, Politeknik Tempo.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

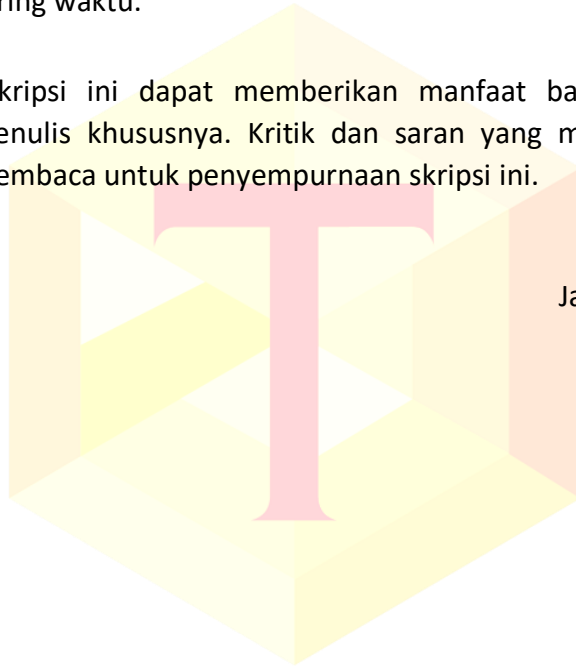
1. Bapak Shalfi Andri, S.P., M.M. sebagai Direktur Politeknik Tempo.
2. Ibu Rosdiana, S.Sos., M.Si. selaku Kaprodi Produksi Media Politeknik Tempo.
3. Ibu Ayoedia Gita Citrayomie, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak, atas kesabaran yang luar biasa dalam menuntun penulis. Setiap arahan, diskusi panjang, dan coretan revisi dari Ibu adalah yang membuat penulis terpacu sehingga penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi ini tepat waktu.
4. Ibu Rizki Ayu Budipratiwi, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas ketelitian, waktu, dan kepedulian yang Ibu curahkan. Masukan-masukan kritis serta dorongan semangat dari Ibu selalu berhasil membuat penulis bangkit lagi di saat-saat kehabisan motivasi.
5. Para Dosen penguji skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen akademik Program Studi Produksi Media beserta seluruh keluarga besar Politeknik Tempo. Terima kasih atas bekal ilmu, pengalaman berharga, serta ruang bertumbuh yang luar biasa selama bertahun-tahun masa perkuliahan.
7. Teristimewa buat Kedua Orangtua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, penulisan artikel ilmiah ini sampai saat ini. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja

keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya.

8. Kepada Kakak yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan, proses penulisan hingga saat ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Seorang wanita yang telah tertulis dalam *lauhuful mahfuz* yang selalu penulis ucapkan di ujung doa. Engkaulah alasan mengapa penulis harus memantaskan diri dalam diam, meningkatkan nilai diri, menata niat, menebar manfaat, berjuang dalam sunyi, dan berikhtiar dengan sabar. Artinya bukan sekadar demi diri penulis, tapi karena penulis percaya bahwa mencintai dalam diam adalah bentuk tertinggi dari menjaga. Penulis memilih bertahan dengan gelar yang sering ditertawakan banyak orang "Jomblo fi sabilillah." Namun bagi penulis, itu bukan lelucon, melainkan pilihan sadar, karena cinta sejatinya bukan hanya soal hadirnya seseorang dalam kehidupan, melainkan bagaimana kita menahan diri demi pertemuan yang Allah SWT. rida. Prinsip penulis sederhana "Menjauh untuk menjaga." sebab manusia memang memiliki sebuah rasa, tapi Allah-lah yang memiliki aturan dan aturan-Nya tak pernah mengecewakan mereka yang bersabar, InsyaAllah kun fayakun. Biarlah hari ini kita berjarak dalam takdir, asalkan kelak kita saling temukan dalam versi terbaik yang telah Allah Swt siapkan. Bila takdir menyatukan kita suatu saat, biarlah itu terjadi di waktu yang paling tepat saat dua insan sudah selesai dengan egonya dan siap menempuh jalan menuju surga-Nya.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis. Meskipun tidak lagi bersama, kehadirannya pernah memberikan warna, pelajaran, dan kebahagiaan yang turut menguatkan penulis. Banyak hal yang kita lalui bersama, dan tanpa penulis sadari, pengalaman tersebut turut membentuk kegigihan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri Alffito Deannofal. Terima kasih telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meski dihadapkan pada

berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Sebagaimana pesan bijak dari BJ. Habibie "Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya" Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.



Jakarta, 05 Juni 2026
Penulis

Alffito Deannofal

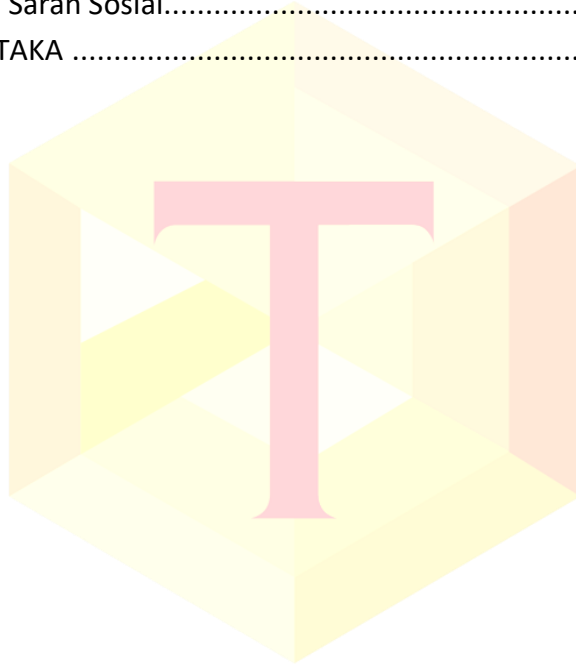
POLITEKNIK TEMPO

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Identifikasi Masalah	21
1.3 Pembatasan Masalah.....	21
1.4 Rumusan Masalah.....	22
1.5 Tujuan Kajian	22
1.6 Manfaat Kajian.....	22
1.6.1 Manfaat Teoritis	22
1.6.2 Manfaat Praktis	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
2.1 Landasan Teori.....	24
2.1.1 Teori Representasi	24
2.1.2 Representasi Sinematik.....	25
2.1.3 Representasi Sosial dalam Film	26
2.1.4 Film Sebagai Teks Budaya	27
2.1.5 Ideologi dalam Film.....	28
2.1.6 Narasi Keadilan	29
2.1.7 Konsep Ketidakadilan Hukum	30

2.1.8 <i>Visual Language</i> dan <i>Mise-en-Scène</i> dalam Film	32
2.1.9 <i>Vigilante Justice</i>	35
2.1.10 Semiotika Roland Barthes	36
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METODOLOGI KAJIAN	44
3.1 Paradigma Penelitian	44
3.2 Metode Penelitian	45
3.3 Unit Analisis	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data Primer	51
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder	53
3.5 Teknik Analisis Data	54
3.6 Teknik Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Film Serial <i>Bad Guys</i> (2025).....	58
4.1.2 Unit Analisis dan Alasan Pemlihan <i>Scene</i>	68
4.1.3 Temuan Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial <i>Bad Guys</i> (2025)	89
4.2 Analisis Hasil Semiotika Roland Barthes	91
4.2.1 Ketidakadilan Prosedural	91
4.2.2 Ketidakadilan Struktural.....	106
4.2.3 Ketidakadilan Substansif	113
4.2.4 Ketidakadilan Sistemik	117
4.2.5 Ketidakadilan Simbolik.....	125
4.2.6 <i>Vigilante Justice</i>	134
4.3 Pembahasan	142
4.3.1 Pola Representasi Ketidakadilan Hukum	144
4.3.2 Krisis Legitimasi Hukum Pada Film Serial <i>Bad Guys</i> (2025) ..	146
4.3.3 Ambiguitas Moral dan Normalisasi <i>Vigilante Justice</i>	149
4.3.4 Film Serial sebagai Media Kritik Sosial.....	152
4.4 Keterbatasan Penelitian	154
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	157
5.1 Kesimpulan	157

5.2.2 Representasi Tanda-Tanda Visual dan Naratif Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial Bad Guys (2025)	157
5.2.2 Makna Denotatif, Konotatif, dan Mitos Menurut Semiotika Roland Barthes	159
5.2 Saran.....	161
5.2.1 Saran Akademis	161
5.2.2 Saran Praktis.....	161
5.2.3 Saran Sosial.....	161
DAFTAR PUSTAKA	163



POLITEKNIK
TEMPO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Elemen Visual Utama dalam Film Serial <i>Bad Guys</i>	34
Tabel 2.2 Peta Tanda Semiotika Roland Barthes.....	37
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan	38
Tabel 3.1 Elemen-Elemen yang Terdapat dalam Film Serial <i>Bad Guys</i>	48
Tabel 3.2 Pencatatan Tanda dan Konteks.....	52
Tabel 3.3 Analisis Semiotik.....	56
Tabel 4.1 Daftar Nama Tim Produksi dan <i>Cast</i>	59
Tabel 4.2 Unit Analisis Episode 1.....	69
Tabel 4.3 Unit Analisis Episode 2.....	73
Tabel 4.4 Unit Analisis Episode 3.....	76
Tabel 4.5 Unit Analisis Episode 4.....	78
Tabel 4.6 Unit Analisis Episode 5.....	80
Tabel 4.7 Unit Analisis Episode 6.....	81
Tabel 4.8 Unit Analisis Episode 7.....	83
Tabel 4.9 Unit Analisis Episode 8.....	85
Tabel 4.10 Unit Analisis Episode 9.....	86
Tabel 4.11 Unit Analisis Episode 10.....	88
Tabel 4.12 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 09.00-09.55	91
Tabel 4.13 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 10.15-10.27	92
Tabel 4.14 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 11.29-11.50	93
Tabel 4.15 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 31.37-31.50	94
Tabel 4.16 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 08.55-09.44	95
Tabel 4.17 Episode 3 <i>scene</i> menit ke 00.40-01.13	96
Tabel 4.18 Episode 5 <i>scene</i> menit ke 33.50-35.05	98
Tabel 4.19 Episode 6 <i>scene</i> menit ke 03.36-04.11	99
Tabel 4.20 Episode 7 <i>scene</i> menit ke 29.50-30.05	100
Tabel 4.21 Episode 8 <i>scene</i> menit ke 20.15-20.45	101
Tabel 4.22 Episode 9 <i>scene</i> menit ke 02.45-03.25	102
Tabel 4.23 Episode 9 <i>scene</i> menit ke 17.50-18.05	103
Tabel 4.24 Episode 9 <i>scene</i> menit ke 33.50-34.48	104
Tabel 4.25 Episode 10 <i>scene</i> menit ke 20.30-21.22	105
Tabel 4.26 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 22.15-23.13	106
Tabel 4.27 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 24.40-25.00	107
Tabel 4.28 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 03.28-03.35	108
Tabel 4.29 Episode 3 <i>scene</i> menit ke 04.45-05.15	109
Tabel 4.30 Episode 3 <i>scene</i> menit ke 08.50-09.40	110

Tabel 4.31 Episode 6 <i>scene</i> menit ke 04.40-05.18	111
Tabel 4.32 Episode 7 <i>scene</i> menit ke 34.10-34.50	112
Tabel 4.33 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 00.46-00.55	113
Tabel 4.34 Episode 4 <i>scene</i> menit ke 04.55-05.30	114
Tabel 4.35 Episode 5 <i>scene</i> menit ke 09.50-10.40	115
Tabel 4.36 Episode 6 <i>scene</i> menit ke 13.17-13.42	116
Tabel 4.37 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 13.40-13.51.....	118
Tabel 4.38 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 10.33-10.50	119
Tabel 4.39 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 31.00-31.50	120
Tabel 4.40 Episode 3 <i>scene</i> menit ke 07.25-07.59	121
Tabel 4.41 Episode 4 <i>scene</i> menit ke 36.50-37.10	122
Tabel 4.42 Episode 7 <i>scene</i> menit ke 04.25-05.06	123
Tabel 4.43 Episode 7 <i>scene</i> menit ke 27.45-29.35	124
Tabel 4.44 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 21.15-22.00	125
Tabel 4.45 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 07.01-07.20	126
Tabel 4.46 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 08.20-08.50	127
Tabel 4.47 Episode 3 <i>scene</i> menit ke 32.25-32.35	128
Tabel 4.48 Episode 4 <i>scene</i> menit ke 00.50-01.05	129
Tabel 4.49 Episode 4 <i>scene</i> menit ke 06.20-06.50	130
Tabel 4.50 Episode 6 <i>scene</i> menit ke 07.35-08.23	131
Tabel 4.51 Episode 9 <i>scene</i> menit ke 06.07-06.50	132
Tabel 4.52 Episode 1 <i>scene</i> menit ke 36.52-38.03	133
Tabel 4.53 Episode 2 <i>scene</i> menit ke 13.50-14.21	134
Tabel 4.54 Episode 6 <i>scene</i> menit ke 06.25-07.17	135
Tabel 4.55 Episode 7 <i>scene</i> menit ke 08.10-09.10	136
Tabel 4.56 Episode 8 <i>scene</i> menit ke 32.20-32.55	137
Tabel 4.57 Episode 10 <i>scene</i> menit ke 19.47-20.00	138
Tabel 4.58 Episode 10 <i>scene</i> menit ke 27.40-28.32	139
Tabel 4.59 Episode 10 <i>scene</i> menit ke 28.41-29.13	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 4.1 Poster Film Serial <i>Bad Guys</i> (2025).....	58



POLITEKNIK TEMPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis.....	168
Lampiran 2 Cek Plagiasi Turnitin	169
Lampiran 3 <i>Form</i> Bimbingan	175



POLITEKNIK TEMPO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rawls, 2022). Sistem hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan hukum tidak hanya termanifestasi dalam pelanggaran prosedur formal, tetapi juga dalam kesenjangan struktural yang membedakan perlakuan hukum antara kelompok kuat dan kelompok rentan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keadilan seharusnya dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya (Rawls, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara, sebagai bagian dari jaminan kebebasan dasar yang harus dipenuhi oleh negara (*The Principles of Justice Theory in the Aspect of Criminal*, 2023). Namun pada kenyataannya, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menghambat terwujudnya keadilan yang sesungguhnya.

Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2022 mencatat lebih dari 200 kasus kekerasan aparat terhadap warga miskin dan komunitas adat, mencerminkan betapa jauhnya jarak antara cita-cita negara hukum dengan realitas yang dialami masyarakat di lapisan bawah. Salah satu kasus nyata adalah penahanan berlarut terhadap petani Sumber Arum yang menolak ekspansi perusahaan besar atas lahan mereka. Meskipun terdapat bukti kuat yang mendukung pembelaan mereka, para petani tetap dijerat dakwaan berat sebuah cerminan nyata dari ketidakadilan hukum yang berpihak pada kekuasaan.

Data LBH Jakarta mencatat meningkatnya kasus salah tangkap dan penyiksaan terhadap masyarakat kecil pada 2022-2023, sementara pelanggaran hukum oleh kalangan elite justru banyak yang tidak ditindak secara serius. Kesenjangan perlakuan hukum ini, menurut Fadilatul Janah, kerap muncul karena dominasi elite politik dan ekonomi dalam sistem hukum, menjadikan hukum "tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Penelitian oleh Annisa Febyanti dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas kewenangan aparat dalam proses penyidikan masih sering terjadi, termasuk penggunaan kekerasan terhadap tersangka. Dengan demikian, ketidakadilan hukum di Indonesia bukan sekadar persoalan individual, melainkan persoalan sistemik yang melekat dalam struktur penegakan hukum itu sendiri.

Film merupakan bagian dari media komunikasi massa karena berperan sebagai sarana yang menghubungkan komunikator dengan komunikan secara luas. Sebagai media komunikasi massa, film memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat (Fuady, 2023). Melalui narasi yang dihadirkan, film dapat merefleksikan realitas sosial serta membentuk pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari penelitian yang dimuat dalam Jurnal Media Akademik (2025) yang menegaskan bahwa film sebagai media komunikasi massa tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mengangkat isu-isu sosial yang kerap terpinggirkan, serta menyampaikan kritik terhadap dominasi kekuasaan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Dengan demikian, film memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan hukum dan keadilan.

Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya menyampaikan narasi hiburan tetapi juga berfungsi sebagai cermin sosial yang merefleksikan realitas yang dihadapi masyarakat (Syahrul Huda & Solli Nafsika, 2023). Melalui narasi visual dan simbolik, film mampu mengangkat isu ketidakadilan hukum ke permukaan kesadaran publik dengan cara yang lebih mudah diterima secara emosional. Khoo dan Ash (2021) menunjukkan bahwa film bertema keadilan sosial dapat membentuk kesadaran moral penonton terhadap diskriminasi sistemik dalam masyarakat. Peserta yang menonton film dengan tema keadilan sosial dan dilengkapi petunjuk literasi media menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap isu-isu keadilan dibandingkan kelompok kontrol.

Lebih dari sekadar cermin realitas, film sesungguhnya bekerja sebagai teks budaya yang secara aktif membentuk makna ideologis. Dalam perspektif kajian media, film tidak berdiri sebagai teks yang netral, melainkan sebagai ruang produksi dan negosiasi wacana yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan kepentingan ideologis tertentu. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian ejournal Appisi (2023), film berfungsi sebagai teks budaya yang mengonstruksi makna melalui simbol-simbol visual, gestur, ekspresi, dan dialog, sehingga dapat dibaca sebagai kritik terhadap sistem kekuasaan yang mampu mempengaruhi tindakan individu. Dengan kata lain, film tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga ruang diskursif yang menyoroti persoalan kemanusiaan.

Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa film bukan hanya sekadar media hiburan, melainkan juga instrumen ideologis yang turut membentuk cara masyarakat memandang realitas sosial, termasuk realitas

hukum. Tebaldi dan Nygreen (2022) menyatakan bahwa media, termasuk film, memainkan peran penting dalam membentuk konsensus sosial terhadap struktur-struktur kekuasaan yang tidak adil. Dalam konteks Indonesia, film dan serial televisi kerap menjadi sarana kritik terhadap institusi formal negara, seperti kepolisian, lembaga peradilan, maupun kekuasaan politik, dengan menyoroti lemahnya penegakan hukum, korupsi struktural, serta kekerasan yang dilegitimasi oleh sistem hukum itu sendiri. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum merupakan fondasi bagi legitimasi negara hukum, sehingga ketika film menampilkan aparat hukum yang berlaku tidak adil, persepsi publik terhadap integritas institusi tersebut pun dapat terdistorsi. Oleh karena itu, kajian terhadap representasi hukum dalam film menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana ideologi tentang keadilan dibentuk, dipertanyakan, dan disebarluaskan melalui medium budaya populer.

Salah satu karya sinematik yang paling relevan dan representatif untuk mengisi kesenjangan kajian tersebut adalah film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Serial ini merupakan adaptasi dari drama Korea berjudul sama yang pertama kali tayang di saluran OCN pada Oktober 2014, sebuah karya yang popularitasnya bahkan mendorong lahirnya versi film layar lebar *Bad Guys: The Movie* pada tahun 2019. Versi Indonesia diproduksi melalui kolaborasi antara Vidio, BASE Entertainment, dan CJ ENM Hong Kong, disutradarai oleh Ferry Pei Irawan dan William Chandra, dengan naskah yang ditulis oleh Ambaridzki Ramadhantyo penulis yang sebelumnya sukses menggarap serial *Gadis Kretek* (2023). Serial ini merupakan adaptasi pertama Vidio dari kekayaan intelektual Korea, terdiri dari 10 episode, dan tayang perdana secara eksklusif di platform *streaming* Vidio pada 21 Februari 2025. Kedudukannya sebagai produk adaptasi lokal pertama dari IP Korea di Vidio menjadikannya penanda penting dalam perkembangan industri konten Indonesia, sekaligus menunjukkan keberanian industri dalam mengadaptasi karya internasional dengan sentuhan konteks sosial Indonesia yang kuat (

Serial *Bad Guys* (2025) secara eksplisit mengangkat narasi tentang kegagalan institusi hukum formal. Tokoh Jaka (Oka Antara), seorang Komisar Besar Polisi yang kehilangan putrinya akibat kasus pembunuhan berantai, merekrut tiga narapidana berbakat Elias (Omara Esteghlal), Haidar (Randy Pangalila), dan Anton (Dwi Sasono) untuk membantunya memburu pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Penyelidikan mereka secara bertahap mengungkap sisi gelap sistem peradilan, membawa mereka ke dalam jaringan narkoba dan korupsi yang mengakar dalam institusi hukum. Melalui narasi ini, serial *Bad Guys* (2025) secara sistematis menggambarkan enam kategori ketidakadilan hukum: prosedural,

struktural, substantif, sistemik, simbolik, dan *vigilante justice*. Selain itu, serial ini memperlihatkan bagaimana simbol-simbol hukum formal seperti toga hakim, borgol, dan senjata mengalami pembalikan makna dari lambang keadilan menjadi fenomena semiotik yang merefleksikan krisis legitimasi sistem hukum Indonesia secara lebih luas (ibid).

Pemilihan film serial *Bad Guys* (2025) sebagai objek kajian didasarkan pada empat pertimbangan yang saling menguatkan. Pertama, serial ini memiliki keunikan sebagai adaptasi lokal pertama dari IP Korea di Indonesia yang secara deliberatif mengintegrasikan konteks sosio-hukum Indonesia ke dalam narasi aslinya, sehingga ketidakadilan hukum yang ditampilkan bukan sekadar reproduksi narasi Korea, melainkan refleksi kritis atas realitas hukum Indonesia. Kedua, penayangan serial ini pada Februari 2025 bertepatan dengan momen tingginya kepercayaan publik terhadap isu integritas aparat hukum di Indonesia, menjadikannya teks budaya yang sangat relevan secara kontekstual. Ketiga, serial ini menawarkan kekayaan tanda semiotik yang berlapis dalam 10 episode, dengan konsistensi representasi ketidakadilan hukum yang memungkinkan analisis mendalam secara lintas episode. Keempat, belum ada kajian akademik yang secara khusus menganalisis representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia, sehingga penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur kajian media dan hukum Indonesia.

Untuk menganalisis representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) secara mendalam, pendekatan semiotika Roland Barthes menjadi kerangka analisis yang paling tepat. Barthes mengembangkan sistem tanda dua tingkat yang memungkinkan pembacaan makna secara berlapis: denotasi sebagai makna literal, konotasi sebagai makna simbolis yang terbentuk dari konteks sosial dan budaya, serta mitos sebagai sistem ideologis yang menaturalisasi nilai-nilai tertentu hingga tampak sebagai hal yang wajar dan alamiah. Pendekatan ini sangat relevan untuk membedah bagaimana *Bad Guys* (2025) mengonstruksi wacana ketidakadilan hukum, karena serial ini tidak hanya menampilkan ketidakadilan secara denotatif dalam adegan-adegan tertentu, tetapi juga membangun konotasi sistemik tentang kegagalan institusi hukum, serta memproduksi mitos bahwa tindakan di luar prosedur hukum dapat dibenarkan secara moral. Harini (2025) dalam kajiannya terhadap film *Penyalin Cahaya* menegaskan bahwa menganalisis isi pesan dalam film memerlukan pendekatan semiotik yang relevan agar representasi yang dikonstruksikan dalam teks sinematik dapat diuraikan secara tepat dan mendalam.

Dengan demikian, melalui analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana *Bad Guys* (2025) secara sistematis

mengonstruksi wacana krisis legitimasi hukum di Indonesia melalui akumulasi tanda visual dan naratif lintas episode, sekaligus berkontribusi pada pengembangan kajian media dan semiotika dalam konteks sinematik Indonesia kontemporer.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Representasi ketidakadilan hukum dalam media populer sering disederhanakan menjadi narasi heroisme individu
2. Film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia menampilkan praktik *vigilante justice* yang berpotensi membentuk legitimasi ketidakadilan, ditujukan dengan banyaknya adegan main hakim sendiri
3. Belum ada penelitian yang menganalisis tanda visual dan naratif film serial ini menggunakan semiotika Roland Barthes

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia menggambarkan bentuk-bentuk ketidakadilan hukum melalui praktik penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam proses hukum, dan kemunculan *vigilante* sebagai respons atas ketidakmampuan aparat penegak hukum. Representasi ini menunjukkan krisis legitimasi dalam sistem peradilan
2. Penelitian ini akan secara pelaksanaan mengkaji tanda-tanda yang muncul dalam karakter tokoh (seperti Jaka dan para napi), dialog-dialog penting yang menyinggung hukum dan keadilan, properti visual (senjata, borgol, lambang institusi hukum), latar tempat (penjara, ruang interogasi, pengadilan).
3. Penelitian ini hanya difokuskan pada representasi ketidakadilan hukum yang dibatasi ke dalam enam kategori utama, yaitu ketidakadilan prosedural, struktural, substantif, sistemik, simbolik, dan *vigilante justice*.
4. Dengan menggunakan semiotika Roland Barthes, penelitian ini akan mengkaji makna denotatif (apa yang ditampilkan), konotatif (makna kultural), dan mitologis (makna ideologis) dari tanda-tanda tersebut untuk mengungkap bagaimana film ini merepresentasikan ketidakadilan hukum sebagai kritik terhadap sistem peradilan formal di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanda-tanda visual dan naratif dalam film serial *Bad Guys* mempresentasikan ketidakadilan hukum?
2. Bagaimana makna denotatif, konotatif, dan mitos dari tanda-tanda tersebut menurut semiotika Roland Barthes?

1.5 Tujuan Kajian

Menurut rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan representasi ketidakadilan hukum yang dimunculkan melalui tanda-tanda visual dalam film *Bad Guys* (2025) versi Indonesia.
2. Untuk mengungkap makna tanda-tanda dalam film serial tersebut melalui pendekatan semiotika Roland Barthes (makna denotatif, konotatif, dan mitos).

1.6 Manfaat Kajian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkuat kajian komunikasi visual dan media melalui analisis representasi hukum dalam film sebagai teks budaya.
2. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda visual, naratif, dan simbolik digunakan dalam media untuk merepresentasikan ketidakadilan hukum.
3. Menerapkan secara konkret pendekatan semiotika Roland Barthes dalam konteks film Indonesia kontemporer, khususnya dalam mengurai makna denotatif, konotatif, dan mitos ideologis.
4. Menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menekuni bidang kajian media, komunikasi politik, atau studi hukum dalam budaya populer.
5. Memperkaya penerapan metode penelitian kualitatif berbasis analisis teks media, khususnya dalam studi representasi dan konstruksi makna dalam film.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Membantu masyarakat, khususnya penonton film, untuk lebih kritis dalam membaca representasi hukum dan keadilan dalam media.
2. Meningkatkan kesadaran akan bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap ketidakadilan hukum melalui simbol dan narasi.
3. Menjadi bahan pengayaan dalam pendidikan literasi media, khususnya terkait hubungan antara media, kekuasaan, dan struktur hukum dalam masyarakat.



POLITEKNIK
TEMPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Untuk mendukung analisis tersebut, landasan teori disusun sebagai pijakan konseptual yang menjelaskan bagaimana makna dibentuk, disampaikan, dan dimaknai dalam teks media, khususnya film. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep representasi, konstruksi sosial dalam media, film sebagai teks budaya, semiotika, hingga kajian visual dan wacana ideologis. Seluruh teori ini saling melengkapi untuk membongkar struktur tanda dan makna yang terkandung dalam narasi dan simbol visual film sebagai bentuk artikulasi terhadap realitas ketidakadilan hukum.

2.1.1 Teori Representasi

Representasi menjadi sebuah tanda (*a sign*) untuk sesuatu atau seseorang, sebuah tanda yang tidak sama dengan realitas yang direpresentasikan akan tetapi dihubungkan dan didasarkan pada realitas yang menjadi representasinya. Representasi memiliki dua pengertian, yang pertama representasi sebagai sebuah proses sosial dari representasi, dan yang kedua representasi sebagai produk dari proses representing (Leliana et al., 2021).

Secara umum representasi yaitu proses menerima pesan kemudian memahami hingga menjelaskan kembali. Ketika seseorang menerima sebuah informasi kemudian diungkapkan kepada orang lain dalam sebuah teks, bahasa atau gambar maka muncullah representasi (Haristia, 2021).

Representasi merupakan pemaknaan mengenai dunia yang disampaikan dengan tanda atau kode-kode material seperti bahasa, gambar dan musik. Setiap proses representasi memiliki proses pemilihan, penciptaan dan produksi makna yang terjadi dalam setiap peristiwa pertukaran makna dalam masyarakat. Representasi ini telah dikaji melalui teori semiotika Roland Barthes, Pierce, dan Fiske yaitu mengenai kode atau tanda dalam penyampaian pesan melalui kode atau tanda-tanda dalam sinematografi (Ayomi, 2021).

Konsep representasi menurut Stuart Hall dijelaskan secara ringkas oleh Wahyu Budi Nugroho, yaitu:

1. Pendekatan Reflektif (*Reflective*)

Pendekatan ini menjelaskan mengenai bahasa yang mampu menggambarkan secara sederhana makna yang sebenarnya dari semua yang ada di dunia ini. *Reflective* memfokuskan bahasa yang mampu mengemukakan makna yang terkandung. Secara singkat pendekatan reflektif menggunakan bahasa untuk mencerminkan makna.

2. Pendekatan Intensional (*Intentional*)

Pada pendekatan ini bahasa dan fenomena digunakan untuk menjelaskan maksud dan pemaknaan atas dirinya sendiri dengan segala pemaknaannya. Setiap kata diartikan atas apa yang dimaksudkan. Pendekatan ini menekankan pada bahasa yang bisa menjelaskan maksud dari komunikator.

3. Pendekatan Konstruksionis (*Constructionist*)

Penekanan pendekatan ini terdapat pada proses konstruksi makna melalui bahasa yang digunakan. Bahasa dan pengguna tidak bisa menetapkan makna melalui dirinya sendiri karena harus dihadapkan unsur lain sehingga memunculkan interpretasi. Representasi berfungsi melalui dua konsep penting yaitu konsep yang ada dalam pikiran dan konsep bahasa.

Stuart Hall membagi representasi menjadi dua bagian yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental merupakan konsep mengenai (peta konseptual) atau entitas yang berbeda hanya di masing-masing kepala orang. Representasi bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam proses konstruksi makna. Kita harus menerjemahkan (Rahman, 2022).

Dengan demikian, teori representasi Stuart Hall menjadi kerangka penting dalam membongkar struktur makna dan ideologi yang terkandung dalam film serial *Bad Guys*. Ia memungkinkan peneliti untuk membaca film sebagai teks yang memproduksi realitas sosial secara simbolik, dan bukan sekadar mencerminkannya secara pasif.

2.1.2 Representasi Sinematik

Representasi Sinematik merujuk pada cara film mengonstruksikan dan menampilkan realitas sosial melalui pilihan-pilihan estetis, naratif, dan sinematografis yang tidak pernah sepenuhnya objektif. Dalam perspektif kajian film, representasi sinematik bukan sekadar cerminan pasif dari realitas, melainkan merupakan konstruksi aktif yang dipengaruhi oleh perspektif pembuat film, konteks budaya, dan kepentingan industri yang melingkupi produksi sebuah karya sinematik (Eren & Aktan, 2024). Pan dkk. (2024) dalam penelitian yang dimuat

dalam *PNAS* menemukan bahwa film naratif yang menampilkan representasi tentang kelompok terpinggirkan termasuk narapidana mampu meningkatkan akurasi empati penonton dan mendorong dukungan terhadap reformasi sistem peradilan pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi sinematik memiliki kekuatan yang melampaui narasi fiksi, karena secara nyata mampu membentuk sikap dan pandangan penonton terhadap realitas sosial yang direpresentasikan. Dalam film serial *Bad Guys* (2025), representasi sinematik terhadap narapidana dan aparat hukum menjadi kunci untuk memahami bagaimana film serial ini mengonstruksikan wacana tentang siapa yang layak dipercaya dalam sistem peradilan Indonesia.

Kajian representasi sinematik dalam konteks hukum dan peradilan menunjukkan bahwa film kriminal secara konsisten membangun representasi tertentu tentang kejahatan, hukum, dan keadilan yang mempengaruhi persepsi publik. Surette (2011) sebagaimana dikutip dalam *Contemporary Justice Review* menegaskan bahwa film sebagai medium budaya sekaligus mencerminkan sikap dominan dalam masyarakat dan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi serta gagasan tentang sistem peradilan. Rafter (2006) dalam kajian yang sama juga menunjukkan bahwa film-film kriminal secara ideologis semakin menjelaskan kejahatan dalam kerangka pilihan rasional individual, sambil mengabaikan faktor-faktor sosioekonomi, kekerasan keluarga, dan tekanan struktural yang sesungguhnya mendasarinya. Dalam film serial *Bad Guys* (2025), representasi sinematik tentang kejahatan dan keadilan tidak sekadar menampilkan konflik antara aparat dan penjahat, tetapi secara lebih kompleks mengonstruksikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum formal gagal menjangkau keadilan yang sesungguhnya, sehingga membuka ruang legitimasi bagi tindakan di luar hukum sebagai respons yang dapat dibenarkan secara moral.

2.1.3 Representasi Sosial dalam Film

Film sebagai media visual dan naratif tetap menjadi salah satu wahana komunikasi budaya paling signifikan dalam merefleksikan serta memproduksi makna sosial. Studi terkini menekankan bahwa film tidak hanya menyampaikan hiburan, melainkan juga berfungsi sebagai arena ideologis tempat berlangsungnya representasi kekuasaan, identitas, dan relasi sosial (Gbambu et al., 2025). Representasi sosial dalam film memuat nilai-nilai ideologis yang dapat memperkuat atau menantang struktur kekuasaan dominan di masyarakat.

(Gjylbegaj & Radwan, 2025), media kontemporer termasuk film dan serial memiliki peran dalam memperkuat prasangka sosial, seperti dalam penggambaran aparat hukum, gender, dan kelompok minoritas, dengan cara yang secara simbolik

mengafirmasi atau menggugat legitimasi kekuasaan. Mereka menekankan bahwa representasi dalam film menjadi “arena negosiasi makna” di mana simbol visual dapat dimanfaatkan untuk mengkritisi atau melanggengkan ketimpangan struktural.

Salah satu bentuk representasi yang paling dominan adalah stereotip, yang disebut sebagai "alat naratif ekonomis" karena mempermudah identifikasi karakter bagi penonton (Afifulloh, 2025). Namun demikian, pemanfaatan stereotip ini justru dapat memperkuat prasangka dan memperdalam jurang ketidakadilan sosial, seperti yang terlihat dalam penggambaran aparat yang kejam atau narapidana sebagai entitas kriminal semata. Misalnya, dalam *Bad Guys* (2025), pembalikan wacana dilakukan dengan menjadikan mantan narapidana sebagai representasi moralitas, sementara aparat hukum digambarkan tidak kredibel.

Selain itu, perspektif *critical media studies* terbaru seperti yang ditawarkan oleh Sarkissian (2025) dengan pendekatan *organic representation*, menyarankan bahwa kekuasaan dalam media tidak hanya berada pada tangan produsen, tetapi juga dalam cara audiens negosiasi dan memproduksi makna secara aktif.

Oleh karena itu, representasi sosial dalam film perlu dipahami bukan sekadar sebagai refleksi realitas sosial, melainkan sebagai proses konstruktif yang turut membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu kekuasaan, moralitas, dan keadilan. Dengan menggunakan kerangka representasi sosial dari studi mutakhir, analisis terhadap film seperti *Bad Guys* memungkinkan kita melihat bagaimana simbol visual dan narasi digunakan sebagai alat artikulasi kritik sosial.

2.1.4 Film sebagai Teks Budaya

Dalam kajian media dan komunikasi budaya, film dipahami bukan sekadar sebagai produk hiburan atau karya estetika, melainkan sebagai teks budaya yang sarat akan makna sosial, politik, dan ideologis. Film dianggap sebagai salah satu bentuk media budaya populer yang tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk struktur makna dalam masyarakat. Pemahaman ini penting dalam konteks penelitian yang berfokus pada bagaimana film merepresentasikan ketidakadilan hukum, karena film tidak berdiri sebagai teks netral, melainkan sebagai ruang produksi dan negosiasi wacana.

Menurut (Tebaldi & Nygreen, 2022) bahwa media, termasuk film, memainkan peran penting dalam membentuk konsensus sosial terhadap struktur-struktur kekuasaan yang tidak adil. Hal ini selaras dengan pandangan (T Muswede, 2025), yang menekankan bahwa film dokumenter dan naratif dapat menjadi

media mobilisasi sosial untuk menyoroti ketidakadilan struktural serta bias institusional, khususnya dalam konteks pendidikan dan hukum. Dalam film, ketidakadilan tersebut seringkali disampaikan secara simbolik melalui konflik naratif yang mempertentangkan aparat formal negara dengan figur oposisi atau vigilante.

Film *Bad Guys* (2025) versi Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu teks budaya yang menggambarkan kompleksitas dan disfungsi dalam sistem hukum nasional. Dalam film serial ini, negara digambarkan tidak mampu lagi menjamin keadilan melalui institusi formal seperti kepolisian atau pengadilan. Sebaliknya, negara justru mengandalkan mantan narapidana untuk menangkap pelaku kejahatan, yang secara simbolik menunjukkan krisis legitimasi hukum formal.

Strategi naratif ini menempatkan penonton dalam posisi yang mendukung tindakan “di luar hukum” sebagai bentuk keadilan alternatif, sehingga memunculkan diskursus baru mengenai siapa yang berhak menegakkan keadilan.

Melalui pendekatan film sebagai teks budaya, peneliti dapat menganalisis bagaimana narasi, karakter, *setting*, dan simbol visual dalam film membentuk wacana sosial yang lebih luas. Dengan demikian, film bukan hanya media ekspresi estetika, tetapi juga menjadi dokumen sosial yang merekam sekaligus mengintervensi dinamika relasi kuasa dalam masyarakat.

2.1.5 Ideologi Dalam Film

Film tidak pernah hadir sebagai medium yang netral, melainkan selalu membawa muatan ideologis yang mencerminkan sekaligus mereproduksi nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Andrew Dix dalam *Beginning Film Studies* sebagaimana dikutip dalam Scribd (2024) menegaskan bahwa film secara bersamaan merefleksikan dan membentuk keyakinan sosial, sambil memperkuat sekaligus menantang struktur kekuasaan yang ada, sehingga film harus dipahami sebagai alat budaya yang berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat. Kellner dan Ryan (1988) dalam *Camera Politica: The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Film* menyatakan bahwa film mentransmisikan ideologi melalui representasi, wacana, dan mitos yang diproduksi dari kehidupan sehari-hari, sehingga film dapat dibaca sebagai teks ideologis yang mencerminkan kontestasi kekuasaan dalam masyarakat.

Kellner (2003) sebagaimana dikutip dalam Eren dan Aktan (2024) lebih lanjut menekankan pentingnya menganalisis refleksi budaya media dan pengaruhnya pada struktur sosial, dengan menganjurkan pemeriksaan mendalam terhadap aspek visual dan naratif film serta dampak sosialnya. Dalam film serial

Bad Guys (2025), ideologi hukum yang dominan yakni kepercayaan bahwa institusi formal mampu menegakkan keadilan justru dipertanyakan dan ditantang melalui narasi yang menempatkan individu di luar sistem sebagai satu-satunya agen yang mampu menegakkan keadilan substantif.

Ideologi dalam film tidak hanya hadir melalui dialog eksplisit, tetapi juga melalui pilihan-pilihan estetik dan naratif yang tampak natural namun sesungguhnya sarat kepentingan. Dowd dkk. (2023) sebagaimana dikutip dalam Eren dan Aktan (2024) menekankan perlunya perspektif sosiologis untuk memahami bagaimana film merepresentasikan dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan tema-tema ideologis yang pada akhirnya mempengaruhi cara pandang masyarakat. Studi-studi tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa film bukan sekadar hiburan, tetapi merupakan wahana yang kuat untuk kritik sosial dan politik yang mampu mempengaruhi pola pikir dan transformasi budaya masyarakat. Dalam konteks film serial *Bad Guys* (2025), konstruksi ideologis tentang ketidakadilan hukum hadir melalui berbagai pilihan naratif dan visual, mulai dari karakter aparat yang korup, narapidana yang digambarkan lebih bermoral dari institusinya, hingga penggambaran sistem peradilan sebagai mekanisme yang melindungi kekuasaan bukan kebenaran. Keseluruhan konstruksi ini membentuk ideologi tertentu tentang hukum dan keadilan.

2.1.6 Narasi Keadilan

Narasi keadilan atau *justice narrative* dalam film merujuk pada cara-cara teks sinematik mengonstruksikan, menampilkan, dan menyelesaikan konflik antara kejahatan dan keadilan melalui struktur naratif yang membentuk ekspektasi dan keyakinan penonton tentang sistem peradilan. Surette (2011) dalam *Constructing Crime and Justice on Film: Meaning and Message in Cinema* yang dimuat dalam *Contemporary Justice Review* menemukan tiga tema utama dalam narasi keadilan film kriminal, yakni kejahatan sebagai kejahatan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kejahatan sebagai persoalan komunal, yang kesemuanya mencerminkan cara masyarakat memahami dan merespons ketidakadilan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa narasi retributif mendominasi film-film kriminal, memperkuat keyakinan sosial bahwa hukuman adalah bentuk keadilan yang paling legitimate, sehingga penonton secara kultural dikondisikan untuk menerima logika balas dendam sebagai respons yang wajar terhadap kejahatan. Konstruksi *justice narrative* semacam ini menjadi sangat relevan dalam membaca film serial *Bad Guys* (2025), di mana narasi retributif dan *vigilante justice* dibangun melalui karakter Jaka yang mengambil alih fungsi peradilan karena kegagalan sistemik institusi hukum formal.

Lebih lanjut, *justice narrative* dalam film tidak hanya beroperasi pada level plot, tetapi juga pada level ideologis yang lebih dalam. Rizov (2023) dalam *Urban Crime Control in Cinema* menegaskan bahwa keadilan dalam film sesungguhnya merupakan konstruksi ideologis yang diproduksi pada level narasi sebagai cara untuk menghindari keterlibatan dengan ketidakadilan aktual yang ada di luar teks sinematik, sehingga *justice narrative* dalam film berfungsi menciptakan ilusi resolusi tanpa mengubah struktur sosial yang mendasarinya.

Pan dkk. (2024) dalam penelitian eksperimental yang dimuat dalam *PNAS* juga menunjukkan bahwa penonton yang menonton film dengan narasi keadilan yakni yang tidak sekadar menampilkan resolusi hitam-putih cenderung mengembangkan pemahaman yang lebih empatik terhadap kelompok terpinggirkan dan lebih mendukung reformasi sistem peradilan. Dalam film serial *Bad Guys* (2025), *justice narrative* yang dibangun bersifat ambigu secara moral di mana keadilan hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang melanggar hukum formal dan ambiguitas inilah yang pada level mitos Barthes membentuk wacana ideologis bahwa sistem peradilan Indonesia tidak dapat dipercaya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya.

2.1.7 Konsep Ketidakadilan Hukum

Konsep ketidakadilan hukum secara konseptual dapat ditelusuri dari pandangan para pemikir hukum naturalis seperti *Aristoteles*, *John Rawls*, dan *Lon L. Fuller*. Aristoteles menyatakan bahwa "Ketidakadilan adalah ketidakseimbangan dalam pemberian dan penerimaan", sedangkan John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness* menyatakan bahwa ketidakadilan muncul jika ada penyimpangan terhadap prinsip kebebasan dasar dan distribusi sosial-ekonomi yang merugikan kelompok paling tidak beruntung (Rawls dalam Saleh, 2025).

Ketidakadilan dalam berbagai bentuknya sosial, ekonomi, dan hukum berdampak besar pada masyarakat. Ketidakadilan sosial terjadi ketika akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi tidak merata. Misalnya, masyarakat miskin sering kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas, yang membatasi peluang mereka untuk hidup lebih baik. Ketidakadilan ekonomi terlihat dari perbedaan besar dalam pendapatan dan kekayaan, yang biasanya disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak adil dan kurangnya kebijakan yang mendukung redistribusi. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin lebar, kemiskinan meningkat, dan mobilitas sosial terhambat. Ketidakadilan hukum terlihat dari diskriminasi dalam sistem peradilan berdasarkan suku, ras, agama, gender, atau orientasi seksual, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum (Suhendra 2024).

Untuk memahami ketidakadilan hukum secara mendalam, perlu menguraikan prinsip-prinsip dasar keadilan yang jika dilanggar (*"The Principles of Justice Theory in the Aspect of Criminal,"* 2023), akan memunculkan ketidakadilan hukum:

1. Prinsip Keadilan Distributif dan Retributif

Menurut teori Aristoteles dikembangkan lebih lanjut oleh John Rawls dalam *Theory of Justice* (1971), keadilan dibagi menjadi keadilan distributif (pembagian hak/kewajiban secara adil) dan retributif (penghukuman yang sepadan dengan perbuatan). Ketidakadilan hukum terjadi ketika:

- a) Hukuman terlalu ringan bagi pelanggar dari kalangan elite
- b) Hukuman terlalu berat bagi rakyat miskin
- c) Akses terhadap layanan hukum hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara finansial

2. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, diperkuat oleh prinsip konstitusional dalam demokrasi modern. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, atau gender.

3. Prinsip *Due Process of Law*

Menurut Lon L. Fuller dan dijadikan standar universal dalam hak asasi manusia oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini menekankan pada keadilan prosedural.

4. Prinsip Akuntabilitas Institusi Hukum

Menurut Robert Alexy dan Michel Foucault dalam pendekatan teori kekuasaan dan hukum. Foucault menekankan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan legal-formal yang berpotensi represif. Prinsip ini menuntut lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk tunduk pada sistem pengawasan, audit publik, dan transparansi kinerja. Ketika lembaga hukum (pengadilan, kepolisian, kejaksaan) tidak tunduk pada mekanisme pengawasan dan evaluasi publik, maka terjadi impunitas.

Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka muncullah bentuk-bentuk nyata dari ketidakadilan hukum (Rawls, 2022), yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ketidakadilan Struktural

Ketidakadilan struktural terjadi ketika sistem hukum mencerminkan dominasi struktur sosial yang timpang. Boaventura de Sousa Santos menjelaskan bahwa sistem hukum modern seringkali mendominasi dan

menyingkirkan sistem hukum alternatif seperti hukum adat. Hal ini menciptakan subordinasi terhadap komunitas yang memiliki sistem hukum lokal, sehingga menimbulkan eksklusi sosial dan hukum terhadap kelompok tersebut (Krisnadi, 2023).

2. **Ketidakadilan Prosedural**

Ketidakadilan prosedural muncul saat proses hukum tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip moralitas formal. Dalam pandangan Lon L. Fuller, keadilan hukum bukan hanya bergantung pada isi hukum, tetapi juga pada prosedur yang dijalankan, seperti keterbukaan, konsistensi, dan kejelasan aturan. Di Indonesia, prinsip ini kerap terganggu oleh ketidakpastian hukum dan praktik korupsi dalam proses hukum (24Nusantara-0102-562, n.d.).

3. **Ketidakadilan Substantif**

Ketidakadilan substantif terjadi apabila substansi hukum tidak menjamin kebebasan dasar yang setara bagi semua orang. Teori keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat kelompok yang kesulitan mendapatkan akses keadilan, seperti penyandang disabilitas (Idris, 2021).

4. **Ketidakadilan Simbolik**

Ketidakadilan simbolik adalah bentuk ketidakadilan ketika hukum digunakan sebagai alat wacana dominan yang menciptakan ketertundukan. Michel Foucault menyatakan bahwa hukum kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan melalui pembentukan narasi legal yang terlihat netral, padahal menciptakan relasi dominasi dalam masyarakat (Bethari, 2024)

5. **Ketidakadilan Sistemik**

Ketidakadilan sistemik merujuk pada ketimpangan yang sudah melekat dalam struktur dan institusi hukum itu sendiri. Santos menyebut hal ini sebagai bentuk “epistemicide” ketika sistem hukum formal menghapus sistem hukum tradisional dan lokal. Ketika hanya sistem hukum negara yang diakui, maka hukum tidak lagi melayani pluralitas sosial masyarakat (Krisnadi, 2023).

2.1.8 Visual Language dan Mise-en-Scène dalam Film

Dalam studi film dan media visual kontemporer, elemen teknis sinematik seperti pencahayaan, *framing*, warna, kostum, properti, serta *setting* tidak sekadar berfungsi sebagai aspek estetis, melainkan merupakan bagian integral dari sistem

tanda yang membentuk dan menyampaikan makna naratif maupun ideologis. Bahasa visual (*visual language*) dalam film dapat dipahami sebagai cara “berbicara” sinema kepada audiens, sementara *mise-en-scène* merujuk pada keseluruhan tata visual dalam satu adegan yang mencakup gerakan aktor, properti, dan pencahayaan yang dikoreografin secara semiotik (Lu, 2023).

Dalam pendekatan semiotika, elemen *mise-en-scène* berperan sebagai penanda (signifier) yang menghasilkan makna denotatif dan konotatif, bahkan ideologis. (Mogoş & Trofin, 2025) menunjukkan bahwa setiap aspek visual dalam media, termasuk dalam program televisi dan film, dikonstruksi melalui konvensi budaya tertentu, menjadikannya sebagai ruang produksi makna yang tidak netral. *Mise-en-scène* menjadi medan komunikasi simbolik yang dapat memperkuat stereotip sosial atau menyampaikan kritik sosial-politik secara implisit.

Dalam konteks penelitian ini, visualisasi dalam film serial *Bad Guys* (2025) dianalisis sebagai sistem tanda yang secara aktif membentuk representasi tentang kekuasaan, hukum, dan keadilan. Misalnya, penggunaan properti seperti borgol, senjata api, dan seragam polisi tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan naratif, tetapi juga menyimbolkan kekuasaan negara, kontrol sosial, dan dominasi institusi hukum atas tubuh warga. Dalam pembacaan semiotik Roland Barthes, tanda-tanda visual semacam ini memiliki lapisan makna berjenjang: secara denotatif menandakan alat hukum, secara konotatif menunjukkan kekuatan koersif, dan secara mitologis membentuk wacana bahwa negara berhak mengendalikan warganya demi stabilitas sosial.

Pencahayaan yang gelap dan kontras dalam adegan interogasi, misalnya, menyampaikan suasana ketegangan dan dominasi, sekaligus membangun persepsi tentang sistem hukum yang tidak transparan. Framing atau sudut pengambilan gambar yang menempatkan karakter napi dari posisi bawah dapat menandakan superioritas moral mereka dibanding aparat hukum. Begitu pula warna biru gelap pada kostum polisi dapat diinterpretasikan sebagai simbol formalitas, kekuasaan, namun juga kekakuan institusi hukum.

Tabel berikut menyajikan contoh elemen visual utama dalam film serial *Bad Guys* dan potensi maknanya berdasarkan pendekatan semiotika Barthes:

Tabel 2.1 Contoh elemen visual utama dalam film serial *Bad Guys*

Elemen Visual	Denotasi	Konotasi	Mitos
Borgol	Alat pengikat tangan	Kontrol dan pengekangan	Negara berhak menundukkan pelaku kriminal
Seragam Polisi	Identitas aparat hukum	Kekuasaan dan otoritas	Aparat adalah representasi hukum negara
Senjata Api	Alat pertahanan/serangan	Ancaman kekerasan institusional	Kekuasaan legal untuk menggunakan kekerasan
Ruang Interogasi	Tempat pemeriksaan hukum	Tekanan psikologis dan represi	Hukum bekerja dalam ketertutupan
Cahaya Gelap	Estetika visual	Kondisi intimidatif	Hukum mengintimidasi, bukan mengayomi

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Dengan demikian, *mise-en-scène* dalam film bukan sekadar ornamen estetis, melainkan instrumen naratif dan ideologis yang sangat penting dalam pembentukan makna. Dalam kajian ini, analisis visual digunakan untuk membongkar bagaimana representasi ketidakadilan hukum dibentuk tidak hanya melalui dialog atau alur cerita, tetapi juga melalui simbolisme visual yang tertanam dalam struktur sinematik film itu sendiri.

Pendekatan ini relevan dalam studi komunikasi visual karena memperlakukan gambar dan objek sebagai teks yang dapat dibaca dan diinterpretasikan secara kultural. Dengan mengintegrasikan semiotika Barthes dan kajian *mise-en-scène*, penelitian ini dapat menangkap dimensi ideologis dari setiap pilihan visual yang muncul dalam film serial *Bad Guys*, serta bagaimana elemen tersebut membentuk pemahaman penonton terhadap wacana hukum, kekuasaan, dan keadilan dalam masyarakat kontemporer Indonesia.

2.1.9 Vigilante Justice

Vigilante justice atau dalam Bahasa Indonesia disebut “main hakim sendiri”, berakar dari adanya kekerasan sosial dan politik dimana masyarakat menggunakan kekerasan untuk menegakkan tatanan yang sudah tertanam dalam masyarakat itu sendiri (*established order*) (Suliandi & Wagiman, 2024).

Hasibuan (2022) menegaskan bahwa *Vigilantisme* adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa otoritas hukum yang sah, meskipun seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk menegakkan keadilan. Dalam dinamika sosial masyarakat, kekerasan yang muncul dapat dibedakan berdasarkan pelakunya apakah berasal dari otoritas resmi atau bukan. Jika kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan sesuai dengan prosedur hukum, maka tindakan tersebut berada dalam ranah legalitas. Namun, jika kekerasan dilakukan oleh pihak tidak berwenang dan tidak memiliki dasar hukum, maka hal itu dikategorikan sebagai bentuk *vigilantisme*. (Intan Sahwa et al., 2025).

Menurut (Johnston, 1996), fenomena *vigilantisme* merupakan suatu bentuk tindakan penegakan hukum secara informal oleh warga sipil yang memiliki ciri-ciri khas dan dapat dikenali melalui enam elemen utama, yaitu:

1. ***Planning, premeditation, and organization***

Tindakan *vigilante* tidak dilakukan secara spontan, melainkan direncanakan, dipersiapkan, dan diorganisir secara sistematis oleh individu atau kelompok (Bateson, 2021).

2. ***Private voluntary agency***

Pelaku *vigilantisme* bertindak secara sukarela sebagai warga biasa, tanpa otorisasi resmi dari lembaga negara (By & Nkrumah, n.d.).

3. ***Autonomous citizenship***

Vigilante merasa memiliki tanggung jawab sosial sebagai warga negara untuk bertindak dalam mengisi kekosongan penegakan hukum formal (Gardenier, 2022).

4. ***The use or threatened use of force***

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi instrumen utama dalam menghadapi pelaku kejahatan atau penyimpangan sosial (Cupido, 2021).

5. ***Reaction to crime and social deviance***

Vigilantisme muncul sebagai reaksi langsung terhadap situasi kejahatan atau tindakan menyimpang yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat (Gardenier, 2022).

6. Personal and collective security

Tindakan *vigilantisme* didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan rasa aman, baik secara individual maupun komunitas (Bateson, 2021).

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka definisi *vigilantisme* adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh warga negara bukan pemerintah alias pihak swasta dengan direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan atau ancaman kekerasan sebagai reaksi dari penyimpangan nilai-nilai yang sudah tertanam demi keamanan pribadi dan bersama (Johnston, 1996).

Melalui pendekatan semiotika Barthes, *Bad Guys 2025 Indonesia* dapat dimaknai sebagai teks budaya yang merepresentasikan *vigilantisme* bukan sekadar sebagai aksi kekerasan, tetapi sebagai simbol resistensi terhadap sistem hukum yang tidak adil. Film ini secara tidak langsung membentuk mitos bahwa kekerasan sipil bisa menjadi bentuk keadilan alternatif yang sah dalam kondisi ketimpangan hukum, sebuah narasi yang sarat ideologi.

2.1.10 Semiotika Roland Barthes

Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu “Semeion”, yang artinya tanda. Semiotika merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang tanda, bagaimana fungsi tanda dan juga produksi makna dari tanda. Tanda dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Tanda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat atau dibuat dengan cara yang dapat diamati.

Semiotika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda (signs) dan bagaimana tanda tersebut dapat digunakan untuk menciptakan makna dan berkomunikasi dalam berbagai konteks. Semiotika memiliki peranan penting dalam mengartikan banyak hal. Dengan mempelajari tanda berarti mempelajari bahasa, meskipun pada dasarnya tanda-tanda itu tidak memiliki arti (Al Fiatur Rohmaniah, 2021). Semiotika mengkaji bagaimana tanda-tanda berfungsi dalam suatu sistem untuk menyampaikan pesan dan menghasilkan makna (Gramigna & Madisson, 2023). Dengan demikian, semiotika menjadi alat penting dalam memahami bagaimana komunikasi terjadi melalui berbagai sistem tanda.

Roland Barthes merupakan seorang pemikir strukturalis yang sering mengimplementasikan semiologi saussurean dan model linguistic. Perspektif mengenai tanda berdasarkan Saussure mempergunakan pendekatan anti historis yang meninjau bahasa selaku sebuah sistem yang harmonis dan utuh secara internal dikatakan dengan *language*. Sementara Barthes menjelaskan bahwa bahasa selaku suatu sistem tanda yang menggambarkan berbagai asumsi dari

suatu khalayak tertentu pada periode tertentu (Sobur, 2013). Seperti pendapat Saussure, Barthes juga mempercayai bahwa kaitan antara petanda dan penanda tidak terwujud dengan alamiah, namun arbiter.

Jika Saussure memfokuskan pada penandaan pada perspektif denotatif sehingga Barthes menyempurnakannya semiologi Saussure dengan melakukan pengembangan sistem penandaan secara berjenjang yang dikatakan dengan konotasi dan denotasi. Barthes juga memasukkan aspek lain pada penandaan yakni mitos yang jadi tanda suatu masyarakat.

Tabel 2.2 Peta Tanda Semiotika Roland Barthes

1. <i>Signifier</i> (Penanda)	2. <i>Signified</i> (Pertanda)
3. <i>Denotative Sign</i> (Tanda Denotatif)	
4. <i>Connotative Signifier</i> (Penanda Konotatif)	<i>Connotative Signified</i> (Petanda Konotatif)
<i>Connotative Sign</i> (Tanda Konotatif)	

Sumber: Sobur (2006)

Berdasarkan Peta Tanda Roland Barthes pada gambar di atas, tampak bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari unsur penanda (1) dan petanda (2). Namun, secara bersamaan, tanda denotatif juga berfungsi sebagai penanda konotatif (4). Dalam penelitian, makna akan diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda yang terdapat dalam gambar, baik yang tampak secara langsung maupun yang tersembunyi, untuk memahami makna yang tersirat di balik tanda tersebut (Indah, 2022).

Dalam hal ini, pendekatan semiotika Roland Barthes menjadi salah satu metode analisis yang relevan untuk memahami bagaimana makna dalam film dibentuk dan ditafsirkan. Barthes membagi menjadi tiga tingkatan, yakni denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi merupakan makna literal dari suatu tanda, konotasi adalah makna tambahan yang dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial, sedangkan mitos adalah ideologi yang tersembunyi di balik tanda dan mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat (Batubara & Pratomo, n.d.).

Dengan kerangka ini, semiotika Roland Barthes tidak berdiri sebagai alat analisis yang otonom, melainkan sebagai ujung dari rantai teoritis yang dibangun sejak teori representasi. Jika teori representasi Stuart Hall menjelaskan bahwa

makna dikonstruksikan secara sosial melalui sistem tanda, maka semiotika Barthes menyediakan mekanisme teknis untuk membongkar konstruksi itu secara berlapis. Pada level denotasi, peneliti dapat mengidentifikasi tanda-tanda visual dan naratif yang secara harfiah menampilkan ketidakadilan hukum.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Utama
1.	(Sakina Shepia Maharani et al., 2022)	<i>Representation of Racism in Antebellum</i>	Kualitatif deskriptif	Semiotika Roland Barthes	Film merepresentasikan ketidakadilan hukum terhadap kulit hitam melalui penindasan simbolik dan dominasi hukum.
2.	(Wagner & Zheng, 2021)	<i>Semiotics, law & art: between theory of justice and theory of law</i>	Kualitatif deskriptif	Semiotika Roland Barthes	Menganalisis bagaimana simbol visual dalam film hukum membentuk pemahaman publik tentang keadilan dan ketimpangan.

3.	(Alzyou d & Makhar esh, 2023)	<i>Racism as a Tool: The Myth of Race</i>	Kualitatif, Analisis	Semiotika Roland Barthes	Ras digunakan sebagai mitos untuk melegitimasi ketidakadilan hukum struktural dalam iklan dan budaya.
4.	(Riandi ka Risdar minto & Nanda, 2024)	Representasi Premanisme dalam Film Pendek Loz Jogjakartoz	Kualitatif	Semiotika Roland Barthes	Premanisme sebagai simbol ketimpangan hukum dan perlindungan hukum selektif
5.	(Harini, Y. N. A, 2025)	Representasi Lemahnya Hukum dan Ketidakadilan di Indonesia dalam Film Penyalin Cahaya	Kualitatif, Analisis	Semiotika Roland Barthes	Hukum dipotret sebagai lembaga yang lemah terhadap korban kekerasan seksual, menunjukkan dominasi patriarki.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Penelitian oleh Maharani, S. S., dkk. (2022) yang berjudul *Representation of Racism in Antebellum Movie* mengaplikasikan teori semiotika Roland Barthes untuk mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol rasial dan representasi kekuasaan dalam film *Antebellum* menggambarkan praktik penindasan terhadap komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Studi ini menitikberatkan pada konstruksi mitos dominasi melalui simbol-simbol historis kekuasaan legal yang bersifat rasial. Walaupun fokus utama kajiannya berada pada isu ras, pendekatan semiotik terhadap struktur simbol kekuasaan ini dapat diperluas relevansinya, termasuk dalam analisis representasi hukum dalam film. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa elemen visual seperti seragam tahanan, borgol, dan

senjata tidak hanya berperan sebagai hiasan visual, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk mitos ideologis yang memperkuat narasi kekuasaan dan subordinasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam menganalisis ketidakadilan struktural dalam sinema, termasuk dalam film *Bad Guys*.

Sementara itu, Wagner dan Zheng (2021) melalui artikel *Semiotics, Law & Art: Between Theory of Justice and Theory of Law*, menyajikan telaah konseptual yang mengaitkan semiotika hukum dengan ekspresi visual dalam seni dan media. Mereka menekankan bahwa simbol-simbol hukum berperan sebagai penghubung antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai representasi yang dialami secara visual. Pendekatan ini menawarkan kerangka teoritis yang kokoh untuk memahami bagaimana pesan hukum dikomunikasikan melalui bentuk-bentuk visual seperti kostum, ruang sidang, dan citra aparat hukum. Konsep ini selaras dengan analisis terhadap *Bad Guys*, karena film tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai lembaga resmi, tetapi juga sebagai konstruksi simbolik yang dimediasi melalui citra visual. Dengan demikian, karya ini menyediakan pijakan teoritis penting untuk membedah representasi hukum dalam konteks sinematik.

Alzyoud dan Makharesh (2023) dalam studinya *Racism as a Tool: The Myth of Race*, menyoroti bagaimana media menciptakan dan menggunakan mitos tentang ras sebagai instrumen pembentukan persepsi dan kontrol sosial. Berdasarkan teori mitos Roland Barthes, mereka mengungkap bahwa makna konotatif dalam representasi visual digunakan untuk menarasikan serta naturalisasi kekuasaan, menjadikannya sebagai alat ideologi yang efektif dalam membentuk pandangan publik. Walau penelitian ini berada pada konteks non-fiksi, kontribusinya penting dalam mengungkap bagaimana mitos mampu menormalisasi ketimpangan hukum. Temuan ini berkorelasi dengan pembacaan terhadap film *Bad Guys*, di mana mitos mengenai “keadilan negara” direpresentasikan melalui kekerasan yang dilembagakan, sehingga memperkuat legitimasi kekuasaan negara dalam sistem penegakan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Risdarminto dan Nanda (2024) dalam *Representasi Premanisme dalam Film Pendek Loz Jogjakartoz* memanfaatkan teori semiotika Barthes untuk menganalisis bagaimana premanisme ditampilkan sebagai bentuk kekuasaan alternatif terhadap hukum formal. Melalui pengamatan terhadap simbol visual seperti atribut pakaian, topi, dan gerakan tubuh maskulin, studi ini memperlihatkan bahwa tanda-tanda tersebut berperan dalam membangun mitos mengenai keadilan jalanan sebagai bentuk penegakan hukum yang muncul dari luar sistem resmi. Temuan ini penting dalam memahami

representasi kekuasaan *vigilante*, yaitu bentuk otoritas yang dijalankan secara informal namun tetap dianggap sah oleh masyarakat. Dalam konteks film serial *Bad Guys*, wacana ini sangat relevan karena para mantan narapidana digambarkan sebagai pelaku keadilan yang meskipun di luar struktur negara, tetap memainkan peran dalam sistem penegakan hukum. Hal ini memperkuat pemahaman tentang konstruksi visual terhadap kekuasaan non-negara.

Adapun studi dari Harini (2025) yang berjudul *Representasi Lemahnya Hukum dalam Film Penyalin Cahaya* memiliki kedekatan tematik dengan penelitian ini karena mengangkat persoalan kegagalan institusi hukum dalam menangani kekerasan seksual. Melalui perspektif semiotik, penelitian ini memperlihatkan bagaimana simbol-simbol yang melekat pada institusi kampus dan aparat penegak hukum digunakan untuk membangun mitos tentang impunitas, yakni kegagalan atau keengganan sistem hukum dalam memberi keadilan kepada korban. Representasi ini tidak hanya mengilustrasikan kelemahan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana media membentuk narasi kritis terhadap ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, studi ini relevan sebagai rujukan metodologis dan tematis dalam penelitian terhadap *Bad Guys*, karena menunjukkan pola serupa dalam penggambaran runtuhnya legitimasi hukum melalui media visual. Dengan kata lain, media memiliki peran signifikan dalam mengartikulasikan kritik terhadap sistem hukum melalui strategi representasional. Kelima penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa:

1. Representasi ketidakadilan dalam media populer kerap dibangun melalui simbol dan struktur visual yang membentuk mitos sosial.
2. Semiotika Roland Barthes digunakan secara efektif untuk membongkar makna konotatif dan ideologis dari tanda-tanda visual dan naratif.
3. Baik dalam konteks lokal maupun global, media memainkan peran penting dalam menyebarkan atau menantang wacana tentang legitimasi hukum, keadilan, dan kekuasaan.

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian-penelitian tersebut dengan fokus khusus pada film serial kriminal Indonesia kontemporer (*Bad Guys*, 2025), dan analisis tentang bagaimana negara, melalui institusi hukum yang rapuh, justru mengandalkan figur mantan pelanggar hukum untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian representasi hukum dan *vigilante justice* dalam lanskap media lokal Indonesia dengan pendekatan Barthes yang terstruktur.

2.3 Kerangka Pemikiran

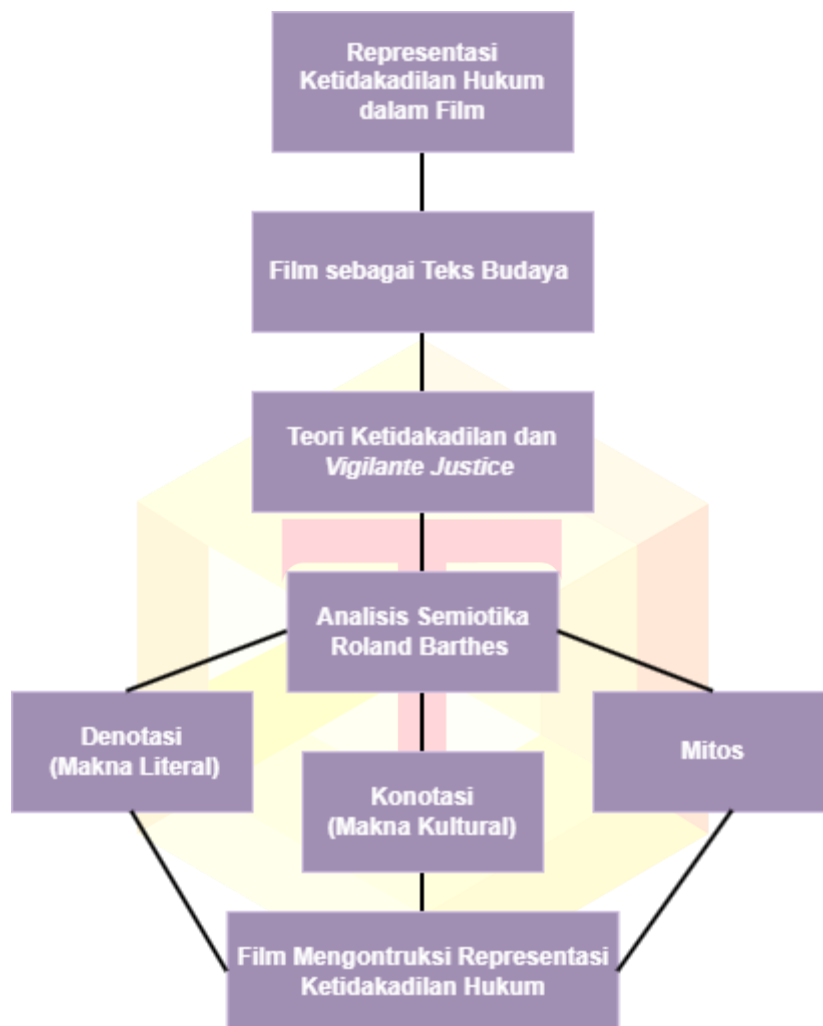
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa media, khususnya serial, tidak sekadar menyajikan cerita atau hiburan, tetapi merupakan sarana representasi yang aktif dalam membentuk dan menyebarkan makna ideologis. Film Serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia menjadi objek kajian karena merepresentasikan ketidakadilan hukum melalui narasi, karakter, dan simbol visual yang kompleks, yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes.

Melalui teori representasi Stuart Hall, film dipahami sebagai teks budaya yang menyusun realitas sosial melalui bahasa dan simbol. Representasi yang muncul dalam film tidak netral, tetapi merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma sosial, dan kepentingan ideologis. Dalam konteks ini, *Bad Guys* menampilkan aparat penegak hukum dan narapidana sebagai dua kutub wacana yang dipertukarkan posisinya: negara tidak lagi dipercaya sebagai penegak keadilan, sementara pelanggar hukum diberi peran sebagai agen keadilan alternatif. Hal ini mencerminkan krisis legitimasi hukum dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Pendekatan semiotika Barthes digunakan untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik tanda-tanda visual dan naratif dalam film serial tersebut. Barthes membedakan tiga lapisan makna, yaitu denotasi (makna literal), konotasi (makna kultural), dan mitos (makna ideologis). Dengan membongkar struktur tanda tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana simbol seperti seragam polisi, borgol, ruang interogasi, atau bahkan gestur tokoh digunakan untuk membentuk narasi ideologis tentang keadilan, kekuasaan, dan hukum.

Konsep-konsep hukum kritis dari Rawls, Fuller, Foucault, dan Santos turut memperkuat pembacaan terhadap ketidakadilan hukum yang direpresentasikan dalam film serial. Ketidakadilan tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi sebagai struktur sistemik yang bersifat prosedural, substantif, simbolik, dan epistemik. Dalam *Bad Guys*, negara digambarkan tidak mampu menjalankan keadilan secara prosedural, dan justru menciptakan keadilan melalui tindakan *vigilante* yang dilegitimasi secara naratif.

Selain itu, melalui genre aksi-*thriller* yang digunakan dalam film serial ini, struktur cerita dibangun dengan formula *vigilante justice*, di mana tokoh utama bertindak di luar hukum untuk mencapai keadilan moral. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan formal dalam sistem hukum negara digantikan oleh keadilan personal yang lebih bersifat emosional dan populis.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini memposisikan film sebagai teks budaya yang menjadi wadah bagi artikulasi ideologi hukum. Pendekatan semiotika Roland Barthes memungkinkan analisis yang mendalam terhadap makna simbolik yang tersembunyi dalam narasi dan visual film. Kerangka ini juga ditopang oleh teori representasi, teori keadilan untuk memahami bagaimana *Bad Guys* mengonstruksi representasi ketidakadilan hukum sebagai respons atas krisis legitimasi hukum di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka konseptual yang mendasari cara pandang peneliti dalam memahami realitas sosial, menentukan metode penelitian, serta membentuk relasi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Paradigma bukan sekadar metodologi, tetapi mencakup aspek realitas, pengetahuan, dan aksiologis (nilai) dari proses penelitian (Kuhn, 1962 dalam Deepublish, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif memandang realitas sosial tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui interpretasi, makna, dan konstruksi sosial yang terus berubah. Menurut Wagner dan Zheng (2021), paradigma interpretatif berfokus pada bagaimana makna diproduksi, dikonstruksi, dan dimaknai oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, terutama melalui simbol dan representasi dalam media. Dengan demikian, penelitian interpretatif tidak mencari kebenaran tunggal, melainkan menggali beragam makna subjektif dari suatu fenomena.

Karena penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, paradigma interpretatif menjadi landasan epistemologis yang sesuai. Barthes sendiri memahami makna sebagai hasil konstruksi sosial yang terbagi dalam tiga tingkat, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos (Barthes, 1972). Paradigma interpretatif memungkinkan peneliti untuk mengartikan tanda-tanda tersebut dalam konteks ideologi hukum dan struktur kekuasaan di masyarakat Indonesia.

Roman (2022) menyatakan dalam studi evaluatif terhadap paradigma interpretatif di bidang komunikasi menyatakan bahwa pendekatan ini efektif untuk mengungkap makna-makna implisit dalam media, terutama dalam teks visual yang sarat dengan simbol dan pesan ideologis. Oleh karena itu, paradigma interpretatif tidak hanya membantu mengurai representasi ketidakadilan hukum dalam film, tetapi juga memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana media membentuk kesadaran tentang keadilan, kekuasaan, dan legitimasi hukum.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2023) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makna, interpretasi, dan konstruksi sosial dari suatu fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya berbentuk apa, bagaimana, atau mengapa suatu fenomena terjadi dan dimaknai oleh subjek yang mengalaminya (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini berguna untuk menggali fenomena sosial atau kemanusiaan secara lebih mendalam dengan memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai berbagai aspek yang membentuk suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian kualitatif, tujuan utama tidak hanya untuk mengumpulkan data, tetapi juga memahami konteks, nilai-nilai, dan makna ideologis di balik fenomena yang diteliti. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam serta menggambarkan suatu fenomena secara lebih detail dan menyeluruh.

Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk memahami suatu peristiwa dengan lebih rinci berdasarkan konteks, pengalaman, serta makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok (Gunawan, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan berbagai tanda dan simbol dalam serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia guna memahami bagaimana ketidakadilan hukum direpresentasikan melalui elemen visual dan naratif. Peneliti menyampaikan sudut pandang yang lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang berarti menjelaskan secara rinci suatu kejadian, serta reflektif, yang memberikan pemahaman mengenai makna dari peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alami sehingga objek penelitian tidak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh peneliti, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih autentik dan sesuai dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2022).

Metode kualitatif lebih sesuai untuk penelitian ini dibandingkan metode kuantitatif. Studi yang bersifat kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran variabel melalui data numerik dan analisis statistik (Moleong, 2021). Namun, representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) memerlukan pendekatan yang dapat mengeksplorasi aspek visual, simbolis, dan naratif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna tersembunyi dalam elemen-elemen serial melalui interpretasi mendalam terhadap tanda-tanda yang muncul di dalamnya (Sobur, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kualitatif memberikan kebebasan bagi peneliti dalam memahami bagaimana ketidakadilan hukum dibangun melalui berbagai tanda, simbol, dan narasi dalam serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Selain itu, analisis kualitatif memungkinkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap hubungan antar karakter, perkembangan cerita, serta elemen visual dan tekstual yang mendukung pembentukan makna dalam serial. Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai dengan tujuan penelitian (Mulyana, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk mengkaji representasi ketidakadilan hukum dalam film *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Roland Barthes mengembangkan model analisis semiotika yang membagi makna menjadi tiga tingkat, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Setiap tingkat analisis memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana suatu tanda dalam serial dapat membentuk dan menyampaikan wacana tentang ketidakadilan hukum kepada penontonnya. Analisis dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Makna denotasi

Langkah ini mengidentifikasi elemen-elemen dalam serial, seperti dialog, tindakan karakter, pengambilan gambar, warna, serta elemen visual lainnya yang terlihat secara langsung oleh penonton. Pada penelitian ini, peneliti mencatat bagaimana karakter utama Jaka, seorang Komisar Besar Polisi yang kecewa terhadap sistem hukum, ditampilkan dalam interaksinya dengan aparat negara dan tiga narapidana yang ia rekrut, yakni Elias, Haidar, dan Anton, serta bagaimana momen-momen kunci dalam film serial dibentuk secara jelas. Properti visual seperti borgol dan senjata api secara harfiah melambangkan alat kekuasaan dan represi, sedangkan latar tempat seperti penjara yang gelap dan ruang interogasi yang suram secara denotatif menggambarkan suasana dalam sistem hukum. *Framing* kamera seperti *close-up* pada ekspresi wajah karakter yang tegang atau *low angle shot* pada sosok aparat secara langsung menggambarkan kekuasaan dan ketidakberdayaan korban di hadapan institusi hukum.

2. Makna konotasi

Tahap ini bertujuan menginterpretasikan makna simbolik dari elemen-elemen tersebut berdasarkan konteks budaya, sosial, dan emosional yang relevan. Relasi antar karakter serta visualisasi dalam film serial dianalisis untuk memahami bagaimana aspek-aspek tersebut membentuk makna yang lebih dalam terkait kegagalan institusi hukum, penyalahgunaan kekuasaan aparat, dan

ketidakberdayaan masyarakat di hadapan sistem peradilan yang represif. Contohnya, analisis dilakukan terhadap cara Jaka dan tim narapidananya dikonstruksi sebagai agen keadilan alternatif, serta bagaimana ekspektasi sosial terhadap institusi hukum formal direpresentasikan melalui tanda-tanda visual dalam film serial. Penggunaan warna monokromatik seperti abu-abu dan hitam di lingkungan penjara dan kantor polisi tidak hanya menunjukkan suasana muram, tetapi juga mengkonotasikan kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan, sementara penggunaan musik latar yang tegang saat adegan kekerasan aparat memperkuat konotasi ketakutan dan ketidakberdayaan masyarakat di hadapan hukum yang represif.

3. Mitos

Langkah terakhir dalam analisis ini adalah mengkaji nilai atau ideologi yang direpresentasikan melalui tanda-tanda tersebut. Fokus utama terletak pada bagaimana film serial ini membentuk persepsi audiens terhadap wacana ketidakadilan hukum yang disampaikan, serta apakah film serial ini menantang ideologi dominan tentang sistem peradilan Indonesia. Konsep *vigilante justice* yang diusung oleh Jaka dan para narapidana tidak hanya sekadar narasi dramatis, tetapi juga mencerminkan mitos bahwa keadilan sejati harus diperjuangkan di luar sistem hukum formal yang dianggap gagal melindungi rakyat kecil. Representasi aparaturnya yang korup dan tidak manusiawi membentuk mitos bahwa institusi hukum bukanlah penjaga keadilan, melainkan alat kekuasaan yang menindas, sementara penggambaran penjara sebagai ruang kekerasan bukan rehabilitasi menguatkan mitos bahwa sistem peradilan Indonesia hanya memperpanjang siklus kriminalitas tanpa memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Pendekatan semiotika ini memungkinkan penelitian menggali makna lebih dalam terkait representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025). Dengan mengkaji serial menggunakan teori Barthes, penelitian ini mengungkap cara tanda-tanda dalam film serial tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai media yang menyampaikan pesan ideologis dan sosial kepada penonton.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif manual. Film serial dianalisis dengan cara memilah adegan-adegan yang memiliki relevansi dengan tema ketidakadilan hukum yang diteliti. Setiap adegan yang dipilih kemudian dikategorikan berdasarkan tiga tahapan analisis Barthes. Data dianalisis dengan mencatat dialog, ekspresi karakter, serta penggunaan elemen

visual yang mendukung representasi ketidakadilan hukum dalam serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia.

Sebagai contoh, dalam salah satu adegan ketika Jaka pertama kali merekrut Elias, Haidar, dan Anton dari dalam penjara, denotasi dari adegan ini menunjukkan pertemuan antara seorang Komisaris Besar Polisi dengan tiga narapidana di ruang tahanan yang sempit dan remang-remang. Konotasi dari adegan ini memperlihatkan bagaimana Jaka merasa kecewa dan tidak percaya terhadap kemampuan sistem hukum formal dalam menegakkan keadilan, tetapi juga menunjukkan keyakinannya bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang berada di luar jalur institusional. Pada tingkat mitos, adegan ini dapat diinterpretasikan sebagai representasi krisis legitimasi sistem peradilan Indonesia, di mana bahkan seorang aparat hukum sendiri harus berpaling dari institusinya untuk dapat menegakkan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Pendekatan semiotika ini memungkinkan penelitian menggali makna lebih dalam terkait representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025). Dengan mengkaji film serial menggunakan teori Barthes, penelitian ini mengungkap cara tanda-tanda dalam film serial tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai medium yang menyampaikan pesan ideologis dan sosial kepada penonton.

3.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis merujuk pada elemen-elemen yang terdapat dalam film serial "Bad Guys" (2025) versi Indonesia yang diduga merepresentasikan ketidakadilan hukum. Unit analisis ini penting untuk memahami bagaimana narasi dan visual dalam film dapat membentuk persepsi penonton terhadap isu-isu hukum dan keadilan. Secara operasional, unit analisis dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bentuk utama, yakni visual, naratif, dan *setting*, yang masing-masing dijabarkan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Element-element yang terdapat dalam film serial *bad guys*

Unit Analisis	Bentuk	Elemen yang dianalisis
Karakter Tokoh	Visual	Gestur tubuh, ekspresi wajah, transformasi identitas, relasi kuasa antar tokoh

Properti dan Simbol Visual	Visual	Borgol, senjata api, seragam polisi, lambang kepolisian, dan dokumen hukum
Dialog dan Narasi Verbal	Naratif	Tuturan tentang kegagalan sistem hukum, ungkapan dilema moral, sindiran terhadap aparat dan institusi hukum
Kategori Ketidakadilan Hukum	Naratif	Ketidakadilan Prosedural, Sistemik, Simbolik, Substantif, Struktural, dan <i>Vigilante Justice</i>
Latar Tempat dan Lokasi Adegan	<i>Setting</i>	Penjara dan ruang tahanan, ruang interogasi, kantor polisi, ruang sidang pengadilan

Sumber : Data diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan tabel di atas, unit analisis dalam penelitian ini dioperasionalkan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Karakter Tokoh

Karakter merupakan elemen sentral dalam sebuah narasi film. Dalam film serial "Bad Guys", karakter utama seperti Jaka dan mantan narapidana lainnya berperan penting dalam menggambarkan dinamika ketidakadilan hukum. Jaka, sebagai protagonis, mengambil alih fungsi aparat hukum untuk menegakkan keadilan substantif. Analisis terhadap karakter ini akan mencakup bagaimana latar belakang, motivasi, dan tindakan mereka mencerminkan kritik terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, karakter-karakter pendukung yang berinteraksi dengan Jaka juga akan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka berkontribusi pada narasi ketidakadilan. Perhatian khusus untuk karakter tokoh diberikan pada:

- Gestur tubuh dan ekspresi wajah (sebagai penanda emosional).
- Transformasi identitas (narapidana → *vigilante*).
- Relasi kuasa dengan tokoh institusional (polisi, jaksa, hakim).

Karakterisasi ini penting untuk mengungkap bagaimana figur yang terpinggirkan dalam sistem hukum justru dimunculkan sebagai agen moral dalam narasi.

2. Dialog dan Narasi Verbal

Dialog dalam film tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar karakter, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ideologis. Dalam penelitian ini, dialog-dialog penting yang menyinggung isu hukum dan keadilan akan dianalisis. Perhatian akan diberikan pada bagaimana dialog tersebut membentuk pemahaman penonton tentang ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, ungkapan-ungkapan yang mencerminkan frustrasi terhadap sistem hukum atau pernyataan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum akan menjadi sorotan utama. Dialog dalam film berfungsi sebagai penanda ideologis yang menyampaikan kritik sosial secara eksplisit maupun implisit. Dialog yang menjadi fokus adalah:

- a) Tuturan tentang kegagalan sistem hukum.
- b) Ungkapan dilema moral ("Keadilan harus ditegakkan, meski tanpa hukum.").
- c) Sindiran terhadap aparat dan institusi hukum.

Analisis dilakukan pada level kontekstual, idiomatik, dan fungsi naratif dari tuturan-tuturan tersebut.

3. Latar Tempat dan Lokasi *Scene*

Latar tempat dalam film memberikan konteks yang penting bagi cerita. Dalam "Bad Guys", lokasi-lokasi seperti penjara, ruang interogasi, dan pengadilan akan dianalisis untuk memahami bagaimana ruang-ruang ini merefleksikan kondisi hukum dan sosial yang ada. Fokus analisis pada

- a) Penjara dan ruang tahanan: sebagai simbol represi dan kegagalan rehabilitasi di sistem pemasyarakatan
- b) Ruang interogasi gelap dan tersembunyi: mencerminkan kekerasan sistemik yang tidak terlihat publik sebagai bentuk praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
- c) Kantor polisi dan pengadilan: menggambarkan dominasi prosedural yang kerap melanggar asas keadilan.

Dengan menganalisis latar tempat, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana *setting* fisik dalam film berkontribusi pada narasi ketidakadilan.

4. Properti Simbol Visual

Objek dan simbol yang muncul secara visual dianalisis sebagai penanda konotatif dan mitologis. Termasuk di dalamnya:

- a) Simbol institusional: borgol, lambang kepolisian, senjata api, ruang sidang, ruang interogasi.
- b) Properti karakter: seragam, kostum sipil, luka fisik, pencahayaan dan komposisi warna.
- c) Artefak visual: teks legal di layar, kamera pengintai, dokumen hukum.

Simbol-simbol ini digunakan untuk mengungkap lapisan makna yang menyampaikan posisi ideologis dari sistem hukum dan kekuasaan.

Dengan menetapkan unit analisis ini, penelitian diarahkan pada pembacaan sistematis atas elemen-elemen tanda dalam film sebagai teks budaya, sehingga dapat ditelusuri bagaimana representasi ketidakadilan hukum dikonstruksi, didistribusikan, dan dipolitisasi dalam struktur narasi visual serial *Bad Guys*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data asli yang diperoleh langsung dari sumber utama untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sehingga menjamin keakuratan dan relevansinya terhadap fokus penelitian. Menurut Creswell (2023), data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual terkait fenomena yang diteliti.

Data utama diperoleh melalui observasi sistematis terhadap 10 episode. Teknik observasi non partisipatif dipilih karena peneliti tidak terlibat dalam proses produksi film, melainkan berperan sebagai pengamat teks yang dianalisis. Prosedur pengumpulan data primer dilakukan secara bertahap dan berulang sebagai berikut:

1. Penayangan Ulang Film Serial (*Repeated Viewing*)

Setiap episode ditonton secara intensif lebih dari satu kali untuk mengidentifikasi tanda-tanda visual, verbal, dan sinematik yang relevan dengan representasi ketidakadilan hukum. Peneliti mencatat secara rinci elemen-elemen berikut:

- a) Simbol hukum: borgol, seragam, logo institusi, senjata, teks legal di layar
- b) *Framing camera*: *close-up*, *low-angle*, *high-angle*
- c) Narasi verbal: dialog, monolog, narasi pengantar yang menyinggung hukum dan keadilan
- d) Latar tempat: ruang sidang, penjara, kantor polisi, ruang interogasi

2. Pencatatan Tanda dan Konteks (*Structured Notes*)

Peneliti membuat tabel pencatatan berdasarkan kategori unit analisis, yang mencakup:

- a) Waktu atau durasi adegan
- b) Jenis tanda (visual/verbal/symbolik)
- c) Makna denotatif
- d) Makna konotatif
- e) Interpretasi mitos ideologis

Contoh catatan:

Tabel 3.2 Pencatatan Tanda dan Konteks

Waktu	Tanda Dominan	Denotasi	Konotasi	Mitos
38.00-39.00	Seragam polisi, ruang gelap	Aparat negara	Represi dan kekuasaan	Negara represif melegalkan kekerasan

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

3. Interpretasi Awal Makna

Setelah pencatatan awal, peneliti mulai menghubungkan tandatanda dengan konteks hukum dan struktur wacana yang lebih luas. Proses ini bersifat eksploratif, namun tetap terarah pada pertanyaan penelitian dan struktur semiotika Barthes.

4. Koding Awal (*Preliminary Coding*)

Setiap adegan atau tanda diberi label awal (kode) seperti: “kuasa aparat”, “perlawanan sipil”, “hukum simbolik” dan sebagainya. Ini memudahkan proses analisis lanjutan dalam teknik analisis data.

Secara keseluruhan, keempat tahapan observasi ini saling melengkapi dan membentuk pondasi kokoh dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini. Pendekatan observatif yang sistematis, ditambah dengan interpretasi semiotik yang tajam, memungkinkan peneliti untuk membongkar lapisan makna tersembunyi dalam representasi ketidakadilan hukum yang ditampilkan film serial *Bad Guys*. Dengan demikian, teknik ini tidak hanya mendukung integritas data, tetapi juga memperkuat relevansi metode kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, yang kemudian digunakan peneliti untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis. Menurut (Gibran et al., 2024) data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen atau publikasi terdahulu yang dapat mendukung dan memperkaya analisis penelitian dengan memberikan landasan teori serta informasi kontekstual yang relevan.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan kontekstualisasi isu. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui:

1. Kajian pustaka
Jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel yang membahas tentang Semiotika Barthes, representasi hukum dalam media, dan teori keadilan dan kekuasaan
2. Dokumen kontekstual
Laporan LBH, Komnas HAM, ICW, dan organisasi advokasi hukum lainnya yang relevan dengan topik representasi ketidakadilan hukum di Indonesia.

Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat pemahaman terhadap konteks sosial yang dipresentasikan dalam film serial *Bad Guys* (2025)
2. Menyediakan pembandingan atau dukungan teoritis atas temuan dari observasi visual

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk mengungkap representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena bersifat interpretatif dan berfokus pada makna simbolik, kultural, dan ideologis yang dibentuk melalui sistem tanda dalam media visual. Dalam pandangan Creswell (2023), pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna subjektif dari pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif karena tidak mengutamakan pengukuran statistik, melainkan pemahaman mendalam atas konteks, narasi, dan simbol. Seperti dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2021), analisis data kualitatif mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiganya berjalan secara interaktif dan tidak selalu linier.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan semiotika Roland Barthes, yang menekankan bahwa tanda-tanda dalam media mengandung lebih dari sekadar makna literal. Barthes mengusulkan tiga tingkat makna tanda, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengamati apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks visual, tetapi juga mengungkap struktur ideologis yang tersembunyi di balik representasi media. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Tanda-Tanda Kunci

Data hasil observasi film serial diklasifikasikan ke dalam unit-unit berdasarkan elemen naratif seperti tokoh, properti visual, setting tempat, hingga dialog. Langkah ini bertujuan untuk mengorganisasi tanda-tanda yang muncul dalam film secara sistematis sebelum memasuki tahap interpretatif (Miles et al., 2021). Langkah awal dilakukan dengan mengamati dan mencatat tanda-tanda visual, verbal, dan sinematik yang muncul secara dominan dalam episode-episode yang telah ditentukan (episode 1-10). Tanda-tanda ini mencakup:

- a) Simbol hukum (seragam, lambang institusi, borgol, senjata, ruang pengadilan)
- b) Dialog atau pernyataan tokoh mengenai keadilan, hukum, atau kekuasaan
- c) Teknik sinematik (framing, lighting, blocking) yang memperkuat makna simbolik

2. Klasifikasi Tanda Berdasarkan Tiga Level Makna Barthes

Setiap tanda yang telah teridentifikasi dianalisis melalui tiga lapisan makna menurut Barthes:

- a) Denotasi: apa yang tampak di layar secara literal, misalnya borgol atau seragam aparat.
- b) Konotasi: makna tambahan yang bersifat kultural atau emosional, seperti warna suram yang menyiratkan opresi.
- c) Mitos: narasi besar yang membentuk pemahaman ideologis, seperti keadilan hanya bisa ditegakkan di luar sistem hukum formal (Monanda & Wilyanti, 2023b).

Analisis pada tahap ini bertujuan untuk menyingkap sistem nilai dan keyakinan yang secara implisit disampaikan oleh teks film.

3. Pemberian Kode Tematik Awal

Setelah dilakukan klasifikasi makna, setiap tanda dikaitkan dengan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian ini. Proses koding tematik dilakukan untuk menyederhanakan dan pengelompokan makna berdasarkan isu yang dianalisis, seperti:

- a) Kekuasaan institusional
- b) Dilema moral dalam penegakan hukum
- c) Perlawanan sipil terhadap hukum formal
- d) Representasi ketidakadilan struktural

Tahapan ini membantu menyusun hasil analisis ke dalam pola-pola pemaknaan yang lebih mudah dikembangkan dalam pembahasan selanjutnya.

4. Penafsiran Kontekstual dan Ideologis

Langkah berikutnya adalah menghubungkan hasil analisis tanda dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Dalam hal ini, peneliti memperhatikan:

- a) Hubungan antara narasi dalam film serial dan kondisi riil sistem hukum di Indonesia
- b) Keterkaitan antara representasi visual dan wacana yang berkembang di masyarakat
- c) Pola dominasi, resistensi, atau ambiguitas dalam representasi tokoh, institusi, dan hukum

Penafsiran dilakukan secara reflektif dan interpretatif, sesuai dengan paradigma kualitatif dan pendekatan interpretatif dalam kajian media.

5. Penyusunan Tabel Analisis Semiotik

Untuk mendukung transparansi proses analisis, hasil pengamatan dan penafsiran disusun ke dalam bentuk tabel analisis. Tabel ini memuat:

Tabel 3.3 Analisis Semiotik

Adegan/ Tanda	Deskripsi Visual	Denotasi	Konotasi	Mitos
Borgol	Digunakan oleh polisi saat menangkap tersangka	Alat pengikat	Represi oleh negara	Kekuasaan legal atas tubuh warga

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Dengan demikian, metode analisis semiotika Barthes dalam pendekatan kualitatif ini memberikan ruang untuk menggali konstruksi makna simbolik yang kompleks, membongkar wacana kekuasaan dalam teks film, serta menunjukkan bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap keadilan.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek krusial yang menentukan sejauh mana temuan dapat dipercaya dan diandalkan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil interpretasi dalam penelitian ini, digunakan beberapa strategi keabsahan data yang sesuai dengan pendekatan interpretatif dan metode semiotika, antara lain: triangulasi teori, ketekunan pengamatan, audit trail, dan refleksi peneliti.

1. Triangulasi Teori

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoritis dalam menafsirkan data. Selain pendekatan semiotika Roland Barthes sebagai kerangka utama, penelitian ini juga mengacu pada pemikiran John Fiske dan Stuart Hall yang menyoroti aspek pembacaan ideologis dan pertarungan makna dalam teks media.

Penggunaan berbagai kerangka ini memungkinkan interpretasi yang lebih kaya dan menghindari pembacaan yang tunggal atau bias. Teori digunakan secara komplementer untuk mengkaji representasi ketidakadilan hukum dari berbagai lapisan makna dan dimensi kekuasaan.

2. Ketekunan Pengamatan (*Prolonged Engagement*)

Peneliti melakukan pengamatan berulang terhadap materi audio visual untuk menjamin bahwa identifikasi tanda dan penafsiran dilakukan secara hati-hati dan

tidak tergesa-gesa. Setiap episode yang dianalisis ditonton berulang kali, disertai pencatatan rinci terhadap:

- a) Urutan adegan yang relevan
- b) Variasi ekspresi visual dan verbal
- c) Nuansa sinematik yang mempengaruhi penafsiran makna

Proses ini membantu meminimalkan kesalahan interpretasi dan meningkatkan ketepatan dalam memahami konteks tanda yang dianalisis.

3. *Audit Trail* (Jejak Analisis)

Seluruh proses analisis dikawal dengan dokumentasi sistematis yang mencakup:

- a) Catatan observasi
- b) Tabel unit analisis
- c) Kode tematik awal
- d) Skema klasifikasi makna (denotasi–konotasi–mitos).
- e) Hasil interpretasi bertahap

Dokumentasi ini membentuk jalur transparan yang dapat ditelusuri ulang, sehingga memungkinkan proses pengujian ulang oleh pembimbing, penguji, atau peneliti lain jika diperlukan.

4. Refleksi Peneliti (*Reflexivity*)

Sebagai bagian dari pendekatan interpretatif, peneliti menyadari bahwa subjektivitas tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, posisi peneliti sebagai individu yang memiliki pengetahuan sosial, latar akademik, serta pandangan pribadi mengenai isu hukum dan media menjadi bagian dari proses penafsiran.

Refleksi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan bias, melainkan untuk mengelolanya secara sadar dan bertanggung jawab. Peneliti secara aktif mempertanyakan asumsi sendiri selama proses analisis dan membuka ruang untuk berbagai kemungkinan makna yang muncul dari teks.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Film Serial *Bad Guys* (2025)

Platform *streaming* Vidio bekerja sama dengan *BASE Entertainment* dan *CJ ENM Hong Kong* menghadirkan adaptasi Indonesia dari film serial ini. Proses syuting telah berlangsung selama tiga bulan di berbagai lokasi di Indonesia. Film serial *Bad Guys* merupakan garapan dua sutradara yaitu Ferry Pei Irawan dan William Chandra. Film serial ini tayang perdana pada 21 Februari 2025 di platform *streaming* Vidio dan terdiri dari 10 episode yang tayang setiap hari Jumat pukul 07.00 WIB. Episode 1 dan 2 akan tersedia lebih awal untuk member Vidio Express pada 14 Februari 2025, sementara hanya episode pertama yang bisa ditonton secara gratis.



Gambar 4.1 Poster Film Serial *Bad Guys* (2025)
Sumber: IMDb (2025)

Film Serial *Bad Guys* versi Indonesia menceritakan seorang polisi bernama Jaka yang berambisi menangkap kelompok penjahat keji. Upayanya untuk menangkap mereka seorang diri gagal, hingga akhirnya ia bekerja sama dengan Sekar, seorang rekan polisi. Dalam upaya menangkap penjahat berbahaya, mereka membentuk tim khusus yang terdiri dari tiga narapidana dengan keahlian unik. Elias adalah seorang *hacker* dengan kasus *cybercrime*, Haidar memiliki latar belakang kasus penipuan identitas dan penyerangan, sementara Anton adalah mantan kriminal narkoba dan pembunuhan. Mereka harus bekerja sama untuk membongkar kejahatan besar, meskipun di tengah perjalanan, konflik dalam tim kerap terjadi. Kepercayaan menjadi hal yang sulit diraih di antara para penjahat yang kini dipaksa berada di sisi hukum.

Film serial ini melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam membangun cerita, visual, serta karakter yang ditampilkan kepada penonton. Tim produksi dan para pemeran dalam film serial *Bad Guys* Indonesia memiliki kontribusi besar dalam menciptakan suasana kriminal, penuh ketegangan, dan konflik moral yang menjadi ciri khas film serial ini. Adapun susunan tim produksi dan pemeran film serial *Bad Guys* Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar nama tim produksi dan cast

Bagian	Nama
<i>Directors</i>	Ferry Pei Irawan dan William Chandra
<i>Writers</i>	Han Jung-hoon, Ilya Aktop, Ambaridzki Ramadhantyo, Samuel Rustandi, Ajeng Sharfina, Melarissa Sjarief
<i>Cast</i>	Oka Antara (Jaka), Dwi Sasono (Anton), Randy Pangalila (Haidar), Omara N. Esteghlal (Elias), Maudy Effrosina (Sekar), Nugie (Gunawan), Ibnu Jamil (Yeremia), Afrian Arisandy (Ito), Marcellino Lafrand (Candra), Fariz Alfarazi (Jabrik), Surya Saputra (Ahmad Aziz), Kenes Andari (Sari), Nayla D. Purnama (Siska), Karlina Inawati (Ani), Patty Sandya (Rahayu), Aqila (Kinan), Neri Lentera (Ratih), Fauzan Dimas (Farhan), Justin Adiwinata (Omar)
<i>Producers</i>	Muhammad Omar Azis, Mark Francis,

	Shanty Harmayn, Sutanto Hartono, Sari Mochtan, Fauzar Nurdin, Mickey Ong, Dipo Mandala Putra, Vanesa Valensca, Tanya Yuson
<i>Composer</i>	Ofel Obaja Setiawan
<i>Cinematographers</i>	Donny Arlen dan Abdul Gerry Habir
<i>Editors</i>	Umar Syarif, Erwin Prasetya Kurniawan, Ahmad Rifai
<i>Casting Director</i>	Widya Fadjriah
<i>Art Director</i>	Ibanez Nasution
<i>Makeup Department</i>	Vanessa Nonski, Astrid Sambudiono, Greciella Siong
<i>Production Management</i>	Rizal Krisna Kamarullah, Rizky Meiramsul
<i>Assistant Directors</i>	Fanni Armadia, Rizky Fachlevi, Mario Kartawinata, Candra Adi Setiawan
<i>Sound Department</i>	Satrio Abhinowo, Dhody Al-Fayed, Andika Apriansyah, Riandy Arya, Diaz Vierdi Erwin
<i>Visual Effects</i>	Didik Juwandi A., Edbert Joshua Angga, Bopak Castello, Emom Puput, Indra Putranto
<i>Stunts</i>	Jonathan Ozoh
<i>Camera and Electrical Department</i>	Noor Aldy, Ayi, Tarmuzi Azhar
<i>Animation Department</i>	Andra Alfaretzi
<i>Casting Department</i>	Hally Ahmad
<i>Costume and Wardrobe Department</i>	Anismcaw
<i>Editorial Department</i>	Adhitya Alvianzyah, Magenta Christie, Fabrian Hendro

<i>Location Management</i>	Geri Iskandar
<i>Music Department</i>	Stefanus Effendi
<i>Script and Continuity Department</i>	Ridho Akbar
<i>Color Department</i>	William Chandra, Priscilla Jessica Huang, Christopher Ryan
<i>Production Department</i>	Ferlicia Mandagi
<i>Property Department</i>	Reo Al Farel
<i>Additional Crew</i>	Farhan Arief, Udin Bhakti, Hadza Aulia Fatimah

Sumber: IMDb (2025)

Film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia mengisahkan perjuangan seorang perwira polisi bernama Jaka yang, dalam upayanya membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang tidak dapat ditembus melalui prosedur hukum konvensional, mengambil keputusan kontroversial dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan tiga narapidana berlatar belakang kriminal yaitu Elias seorang peretas, Haidar pelaku penipuan identitas, dan Anton mantan kriminal narkoba dan pembunuhan. Konflik utama film serial ini dibangun di atas dua lapisan tegangan yang saling berkelindan: ancaman kejahatan eksternal yang semakin kompleks di satu sisi, dan krisis kepercayaan antar anggota tim yang memiliki rekam jejak kriminal di sisi lain. Melalui dinamika tersebut, film serial ini merepresentasikan gagasan bahwa sistem peradilan formal dinilai tidak mampu menegakkan keadilan secara substantif, sehingga tindakan yang melampaui batas legalitas konvensional seolah menjadi satu-satunya jalan yang tersisa sebuah konstruksi ideologis yang menjadi landasan analisis semiotika dalam penelitian ini.

Secara naratif, film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia dapat diuraikan menggunakan pendekatan struktur alur klasik yang mencakup empat tahapan, yakni eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Pembagian ini penting untuk memetakan titik-titik naratif yang akan menjadi objek analisis semiotika dalam penelitian ini.

Tahap eksposisi dibangun pada episode-episode awal film serial yang memperkenalkan tokoh sentral, yakni Jaka, seorang perwira polisi dengan reputasi tegas dan rekam jejak penanganan kasus kriminal berat. Setting cerita berlangsung

di lingkungan urban Indonesia dengan atmosfer kriminalitas yang kompleks dan sistem penegakan hukum yang penuh keterbatasan. Pada tahap ini pula diperkenalkan tiga narapidana yang akan menjadi anggota tim khusus Elias, seorang peretas yang tersandung kasus kejahatan siber Haidar, pelaku penipuan identitas dan penyerangan; serta Anton, mantan kriminal narkoba yang juga terlibat kasus pembunuhan. Bersama rekannya, Sekar, Jaka mulai merancang pembentukan tim tidak umum tersebut sebagai respons atas kegagalan metode penegakan hukum formal dalam membongkar jaringan kejahatan yang semakin sulit dijangkau.

Konflik berkembang seiring berjalannya operasi tim khusus tersebut. Ketegangan tidak hanya muncul dari ancaman eksternal berupa jaringan kejahatan terorganisir yang menjadi target operasi, tetapi juga dari dinamika internal tim yang sarat dengan ketidakpercayaan antar personal. Para narapidana yang dipaksa bekerja sama dengan aparat hukum membawa luka, kepentingan, dan agenda tersembunyi masing-masing. Konflik moral pun turut mengemuka ketika batas antara metode penegakan hukum yang sah dan tindakan di luar prosedur legal menjadi semakin kabur. Tegangan ini merepresentasikan krisis legitimasi institusi hukum yang menjadi tema utama film serial.

Puncak konflik dicapai ketika tim berada pada titik kritis, di mana ancaman dari target kejahatan mencapai tingkat tertinggi sekaligus perpecahan internal tim hampir tidak dapat dibendung. Jaka dihadapkan pada dilema moral terberat mempertahankan kejujuran prosedur hukum atau mengorbankannya demi menuntaskan misi. Pada titik ini, film serial menempatkan pertanyaan mendasar mengenai apakah keadilan substantif dapat dibenarkan meskipun dicapai melalui cara-cara yang melanggar legalitas formal sebuah momen naratif yang menjadi simpul utama membangun mitos dalam kerangka analisis Roland Barthes.

Pada tahap resolusi, tim berhasil membongkar jaringan kejahatan yang menjadi target operasi, meskipun pencapaian tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Penyelesaian konflik tidak sepenuhnya bersifat triumfalis, melainkan meninggalkan ambiguitas moral yang disengaja: kejahatan berhasil diatasi, namun dengan cara-cara yang mempertanyakan legitimasi hukum itu sendiri. Resolusi ini secara naratif memperkuat mitos bahwa keadilan di luar prosedur formal dapat dibenarkan apabila sistem yang ada dinilai gagal, sekaligus membuka ruang bagi pembaca untuk mempertanyakan kembali relasi antara hukum, moralitas, dan keadilan dalam konteks sosial Indonesia.

Film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia terdiri dari sepuluh episode yang membangun narasi secara progresif tentang krisis keadilan hukum di Indonesia. Dari kesepuluh episode tersebut, penelitian ini memilih 10 episode yang mengandung tanda-tanda semiotik dan paling relevan dengan tema ketidakadilan hukum, yaitu 10 Episode. Berikut adalah alur cerita dari masing-masing episode film serial ini yang bersumber dari olahan data penulis:

A. Episode 1

Episode 1 meletakkan fondasi utama mengenai krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari prosedural, struktural, simbolik, sistemik, dan *vigilante justice*. Episode ini menyoroti persidangan kasus peredaran 687 kg narkoba di mana Hakim Muhtar secara mencurigakan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada gembong narkoba Fery Santoso, lebih ringan dari tuntutan hukuman mati jaksa. Keputusan ini terbukti cacat secara prosedural dan sarat manipulasi, karena Hakim Muhtar sendiri kedapatan diam-diam mengonsumsi kokain yang disembunyikan di dalam pulpen di ruang kerjanya, dan terungkap oleh seorang narapidana bahwa sang hakim adalah pelanggan narkoba dari jaringan Fery.

Ketidakmampuan institusi semakin dipertegas dengan tewasnya Hakim Muhtar yang dibunuh secara rapi di ruangnya sendiri tanpa jejak alat pembunuh, serta adanya tekanan dari wartawan terhadap kepolisian atas rekam jejak kegagalan mereka menangkap pelaku pembunuhan berantai selama 20 tahun terakhir. Di sisi lain, episode ini juga menggambarkan ketidakberdayaan struktur aparat negara; di mana Jaka (Perwira Polisi) dan Yeremia (Jaksa Penegak Umum) harus pasrah kalah di pengadilan melawan kekuatan pengacara seperti Bu Sari yang membuat penjahat semakin sulit dipenjara. Jaka yang diprovokasi oleh Fery terkait kematian putrinya, akhirnya melanggar prosedur hukum yang sah dengan menganiaya tersangka secara brutal di ruang interogasi, yang menjadi representasi nyata dari lahirnya tindakan main hakim sendiri.

B. Episode 2

Episode 2 mengenai krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari prosedural, struktural, substantif, simbolik, sistemik, dan *vigilante justice*. Episode ini menyoroti proses rekrutmen paksa terhadap tiga narapidana oleh Jaka (Perwira Polisi) yang diwarnai ancaman penambahan masa tahanan secara sepihak. Tindakan ini terbukti cacat secara prosedural dan substantif karena

kebebasan yang dijanjikan hanyalah ilusi tanpa kepastian hukum, sehingga menempatkan narapidana sebatas objek yang dikendalikan oleh negara.

Ketidakmampuan institusi semakin dipertegas dengan pengakuan Jaka bahwa unit kepolisian reguler tidak bisa diandalkan, bersamaan dengan para elite hukum (Jenderal Nurdin dan Jenderal Gunawan) yang justru sibuk menutupi skandal di ruang informal. Di sisi lain, episode ini juga menggambarkan ketidakadilan simbolik melalui penggunaan sengatan listrik dan pelacak GPS *tracker* di kaki tahanan sebagai instrumen kontrol mutlak. Ketika para narapidana akhirnya memilih untuk membangun solidaritas di luar sistem karena hilangnya kepercayaan terhadap legitimasi dan niat baik aparat hukum

C. Episode 3

Episode 3 terus mengonstruksi krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari prosedural, struktural, sistemik, hingga ketidakadilan simbolik. Episode ini menyoroti investigasi awal kematian Jenderal Nurdin yang sarat akan manipulasi, di mana rekaman CCTV mendadak dinyatakan rusak dan tidak ada tanda perlawanan dari korban. Proses penyelidikan ini terbukti cacat secara struktural ketika institusi kepolisian dengan sengaja merilis berita palsu ke publik bahwa kematian tersebut murni akibat riwayat penyakit berat, demi melindungi kepentingan politik Calon Gubernur Pak Aziz.

Ketidakmampuan institusi dalam mencari kebenaran semakin dipertegas dengan adanya larangan keras dari atasan kepada Jaka untuk menyelidiki langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Di sisi lain, episode ini juga menggambarkan ketidakadilan sistemik di mana aparat seperti Jaka dan Yeremia mulai saling mencurigai rekan di dalam institusinya sendiri karena takut menjadi korban pengkhianatan selanjutnya. Kewenangan ini digambarkan ketika Jaka kembali menyalahgunakan simbol kekuasaan (moncong pistol) untuk menekan narapidananya, membuktikan bahwa kepatuhan hukum kini hanya didapatkan melalui ketakutan.

D. Episode 4

Episode 4 dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari substantif, sistemik, dan ketidakadilan simbolik. Episode ini menyoroti percakapan kritis antara Jaka dan Haidar yang secara terang-terangan meragukan kepastian kebebasannya setelah misi rahasia kepolisian ini berakhir.

Merosotnya wibawa penegakan hukum semakin dipertegas melalui ketidakadilan simbolik ketika Jaka menyalahgunakan otoritas dan senjatanya dengan menodongkan pistol langsung ke dada Ipang untuk memaksakan keterangan. Tindakan aparat ini berlanjut ketika Jaka mengancam akan menembak kepala Haidar jika ia mencoba melarikan diri dari lapangan, seraya mengabaikan peringatan Sekar terkait pelanggaran prosedur operasional. Di sisi lain, institusi dan ketidakadilan sistemik digambarkan melalui terungkapnya jaringan mafia peradilan. Hal tersebut dibuktikan melalui percakapan telepon rahasia antara seorang pengacara berkedudukan tinggi (Bu Sari) dengan seorang bos kartel (Chandra) yang merencanakan kelanjutan kerja sama mereka, yang secara gamblang membuktikan bahwa penegak hukum justru menjadi bagian dari jaringan kriminal terorganisir yang seharusnya mereka berantas.

E. Episode 5

Episode 5 menceritakan krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan bentuk ketidakadilan substantif dan prosedural. Episode ini menyoroti perdebatan tajam antara Jaka dan Sekar terkait janji pembebasan bersyarat para narapidana, di mana Jaka mengakui bahwa bentuk nyata janji tersebut ternyata berada di luar kendalinya. Hal ini terbukti cacat secara substantif karena hukum negara gagal memberikan kepastian fungsional dan perlindungan terhadap narapidana yang telah dieksploitasi tenaganya, yang memicu Sekar untuk menyindir Jaka sebagai seorang pengkhianat.

Merosotnya wibawa penegakan hukum semakin dipertegas melalui ketidakadilan prosedural ketika Jaka menyalahgunakan fasilitas institusi resmi dengan menginterogasi Ito secara paksa di bawah ancaman pembunuhan. Jaka secara agresif menyudutkan tersangka dan menodongkan pistol tepat ke kepalanya demi mendapatkan pengakuan tentang siapa pembunuh putrinya. Tindakan aparat membuktikan seragam dan senjata yang seharusnya menjadi simbol pelindung negara, pada kenyataannya telah bergeser berfungsi sebagai alat kekerasan sewenang-wenang demi memfasilitasi dendam pribadi sang aparat.

F. Episode 6

Episode 6 terus menceritakan krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari prosedural, struktural, simbolik, substantif, dan *vigilante justice*. Episode ini menyoroti tindakan Jaka yang menangkap tersangka Ito secara sepihak tanpa koordinasi atasan, seraya secara terang-terangan meremehkan dan

mengabaikan protokol resmi kepolisian demi mencari kebenaran tentang putrinya. Tindakan yang cacat secara prosedural ini semakin rumit ketika dihadapkan pada ketidakadilan struktural, di mana Ito dengan angkuh menantang Jaka karena merasa kebal hukum dan terlindungi di balik celah sistem akibat ketiadaan bukti formal yang bisa menjatuhnya.

Merosotnya wibawa penegakan hukum semakin dipertegas melalui ketidakadilan simbolik ketika Jenderal Gunawan merespons laporan penggunaan kekerasan oleh Jaka bukan dengan memedulikan penegakan kebenaran atau nasib tersangka, melainkan hanya mengkhawatirkan dampak skandal tersebut terhadap citra institusi dan karir pribadinya. Di sisi lain, episode ini juga membongkar ketidakadilan substantif dengan membiarkan narapidana dieksploitasi tenaganya tanpa jaminan perlindungan ketika Gunawan (Jenderal Polisi) menolak tegas permintaan Jaka untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anton, Haidar, dan Elias dengan dalih bahwa operasi mereka tidak memiliki dasar resmi sejak awal. Puncak dari rentetan frustrasi dan disfungsi sistem ini memicu aksi main hakim sendiri (*vigilante justice*) ketika Jaka, yang terus-menerus diprovokasi oleh Ito, akhirnya kehilangan kendali dan memukuli tersangka secara brutal di luar batas kewenangan interogasi yang sah.

G. Episode 7

Episode 7 terus mengonstruksi krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari prosedural, struktural, sistemik, dan *vigilante justice*. Episode ini menceritakan kegagalan teknis kepolisian yang berakibat fatal secara prosedural, di mana Ito akhirnya dibebaskan dari pengadilan bukan karena ia terbukti tidak bersalah, melainkan akibat pelanggaran prosedur penangkapan (penggunaan kekerasan oleh Jaka) yang justru menjadi bumerang bagi aparat ketika disorot oleh media.

Merosotnya wibawa penegakan hukum semakin dipertegas melalui ketidakadilan struktural dan sistemik ketika Sekar membongkar adanya hegemoni jaringan korupsi terstruktur berupa aliran dana miliaran rupiah ke rekening penegak hukum (Sari, Nurdin, dan Mokhtar) dari perusahaan-perusahaan milik Gubernur Ahmad Aziz. Kegagalan sistemik institusi ini berlanjut dengan berbagai upaya penyelesaian kejahatan melalui lobi-lobi informal seperti dari pertemuan tertutup antara Yeremia dan Jenderal Gunawan yang memilih membebaskan tersangka demi menutupi skandal kekerasan dan menyelamatkan muka peradilan, hingga pertentangan informal antara Sekar dan Pak Aziz di pasar yang berujung

pada tawar-menawar skandal politik. Negara ini memicu lahirnya tindakan main hakim sendiri di mana Jaka secara eksplisit meninggalkan asas hukum formal negara dan beralih mengadopsi cara-cara mafia dengan mengancam akan menghancurkan keluarga Ito demi memuaskan dendam pribadinya.

H. Episode 8

Episode 8 terus mengonstruksi krisis keadilan dan disfungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan prosedural dan *vigilante justice*. Episode ini menyoroti pergeseran fokus penegakan hukum di mana aparat penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (Yeremia), secara tegas membenarkan pengabaian prosedur penyelidikan pembunuhan demi agenda politik. Yeremia menegaskan tugas utamanya adalah memastikan para politisi yang korup bertanggung jawab, meskipun hal tersebut harus mengorbankan pencarian pelaku pembunuhan yang sebenarnya, yang merepresentasikan bagaimana hukum negara sering kali hanya menjadi formalitas belaka yang tidak mampu menyentuh aktor kekuasaan yang sesungguhnya.

Merosotnya wibawa penegakan hukum semakin dipertegas melalui praktik *vigilante justice* ketika tokoh di luar sistem, yaitu Ito, menyandera Omar di ruang parkir bawah tanah yang gelap. Tindakan ini menyimbolkan ruang di luar pengawasan hukum negara, di mana aktor akar rumput berani menghakimi elit penguasa secara langsung tanpa melalui pengadilan resmi. Ancaman Ito bahwa "anak ini harus mati" di hadapan Jaka mengonstruksikan mitos bahwa pembunuhan di luar hukum adalah bentuk keadilan alternatif yang secara moral dibenarkan, mencerminkan keputusan masyarakat ketika sistem keadilan formal dianggap sudah terlalu busuk untuk memberikan jawaban.

I. Episode 9

Episode 9 mempertegas puncak krisis legitimasi dan disfungsi sistem peradilan melalui representasi ketidakadilan prosedural dan ketidakadilan simbolik secara terang-terangan. Episode ini membongkar bagaimana hukum secara sistematis yang dimanipulasi, yang terlihat dari dibebaskannya Omar anak dari Gubernur Pak Aziz dari tuduhan penyebaran video asusila akibat penghilangan identitas pelapor dari *database* pengadilan dan hilangnya barang bukti. Kekebalan hukum ini semakin diperparah ketika Omar dengan angkuh berlindung di balik lembar putusan hakim, menggunakan dokumen hukum tersebut sebagai tameng simbolik untuk menutupi kejahatannya.

Kegagalan sistemik institusi hukum ini berujung pada hilangnya kepercayaan secara total, yang secara berlawanan disuarakan oleh Bu Dewi (istri dari Jaksa Penuntut Umum Yeremia) saat ia mengusir kepolisian dari rumahnya karena aparat dinilai gagal menangkap pelaku yang menghancurkan hidup putrinya. Ketika Jaka akhirnya secara sepihak melepaskan perangkat pelacak GPS *tracker* dari para narapidana, membatalkan janji pembebasan bersyarat mereka, dan mendeklarasikan bahwa keseluruhan misi resmi kepolisian tersebut hanyalah rekayasa omong kosong yang ia manfaatkan demi agenda personalnya untuk mencari pembunuh putrinya. Momen ini menandakan degradasi total prosedur kepolisian yang beralih menjadi alat untuk memfasilitasi dendam pribadi aparaturnya.

J. Episode 10

Episode 10 menjadi penutup yang mengonstruksi puncak krisis keadilan dan kegagalan fungsi sistem hukum yang kronis di Indonesia, dengan menampilkan berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari ketidakadilan prosedural dan *vigilante justice*. Episode menegaskan kecurangan sistemik melalui adegan kilas balik persidangan Omar, di mana aparat penegak hukum terbukti menerima suap dari pihak Gubernur untuk menghilangkan bukti CCTV agar Omar divonis bebas. Hal ini mempertegas bahwa ruang sidang telah kehilangan fungsi moralnya sebagai pencari kebenaran dan berubah menjadi panggung yang melindungi kaum berkuasa dari jerat hukum.

Yeremia yang frustrasi dengan kegagalan sistem, melakukan intimidasi bersenjata dan penganiayaan fisik terhadap Omar hingga korban berteriak kesakitan. Konflik moral memuncak ketika Jaka mencekik Yeremia dengan penuh emosi, namun ia seketika teringat ucapan mendiang putrinya, Siska, yang menganggapnya sebagai "superhero". Momen ini menjadi penyelesaian emosional di mana Jaka akhirnya melepaskan cekikannya dan berteriak menolak untuk menjadi pembunuh, meskipun ia memiliki alasan "keadilan". Keputusan Jaka untuk menahan diri menyampaikan pesan bahwa kejahatan struktural tidak boleh dilawan dengan kejahatan personal karena hanya akan menciptakan rantai kekerasan baru.

4.1.2 Unit Analisis dan Alasan Pemilihan Scene

Unit analisis dalam penelitian ini adalah adegan (*scene*) yang terdapat dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Pemilihan adegan sebagai unit analisis didasarkan pada pertimbangan bahwa *scene* merupakan satuan naratif

terkecil yang secara mandiri mengandung tanda-tanda denotatif, konotatif, dan mitos yang dapat dianalisis menggunakan kerangka semiotika Roland Barthes. Setiap adegan memiliki konteks visual, dialog, dan situasi yang cukup untuk dilakukan pembacaan tanda secara menyeluruh.

Adapun untuk film serial ini, pemilihan *scene* yang digunakan adalah 10 (sepuluh) episode dalam film serial itu. *Scene* mengandung tanda verbal berupa dialog yang merujuk pada ketidakadilan hukum, kegagalan institusi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, *scene* melibatkan interaksi antara aparat hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) dengan tokoh lain yang memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara. Ketiga, *scene* mengandung simbol-simbol institusi hukum formal seperti toga hakim, ruang sidang, seragam dinas, senjata, atau dokumen hukum yang digunakan dalam konteks yang menyimpang dari fungsinya. Keempat, *scene* merepresentasikan salah satu dari enam kategori ketidakadilan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, yakni ketidakadilan prosedural, struktural, substantif, sistemik, simbolik, dan *vigilante justice*.

Scene yang tidak memenuhi kriteria di atas seperti adegan aksi fisik murni tanpa muatan simbolis yang berkaitan dengan sistem hukum, adegan percakapan sehari-hari antar karakter, atau adegan yang berfungsi sebagai penghubung narasi semata tidak dimasukkan sebagai unit analisis. Hal ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis pada tanda-tanda yang secara langsung dengan pertanyaan penelitian tentang representasi ketidakadilan hukum.

Berdasarkan kriteria tersebut, dari keseluruhan 10 episode film serial Bad Guys (2025) versi Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi *scene-scene* yang memenuhi syarat sebagai unit analisis. Adegan-adegan di seluruh 10 episode dengan distribusi yang mencerminkan tingkat representasi ketidakadilan hukum di masing-masing episode. Berikut adalah tabel unit analisis lengkap beserta kategori ketidakadilan yang direpresentasikan:

A. Episode 1

Tabel 4.2 Unit Analisis Episode1

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	09.00 – 09.55	Hakim Muhtar membacakan vonis penjara seumur hidup kepada Fery Santoso atas kasus narkoba 687 kg, lebih ringan dari tuntutan	<i>Scene</i> ini mengandung dialog eksplisit tentang putusan hukum yang	Prosedural	Toga hakim, palu hakim, dan ruang sidang

		hukuman mati jaksa. Fery menyiratkan bahwa ia sudah mengetahui putusan sebelumnya.	janggal dan melibatkan interaksi antara hakim, jaksa, dan terdakwa yang memperlihatkan relasi kuasa tidak setara di ruang sidang formal.		
2.	10.15 – 10.27	Hakim Muhtar diam-diam mengeluarkan kokain yang tersimpan dalam pulpen di ruang kerjanya setelah sidang.	<i>Scene</i> mengandung simbol institusi hukum formal (pulpen hakim, ruang kerja resmi) yang digunakan dalam konteks menyimpang dari fungsinya sebagai penegak hukum.	Prosedural	Pulpen berisi kokain dan ruang kerja hakim
3.	11.29 – 11.55	Hakim Muhtar ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher. Tim INAFIS menyatakan tidak ada alat pembunuh yang tertinggal. Gunawan menyebut pembunuhan ini terlalu rapi dan bersih.	<i>Scene</i> memperlihatkan kegagalan institusi hukum dalam mengungkap kejahatan yang melibatkan aparat internalnya sendiri dan mengandung simbol otoritas.	Prosedural	Tubuh hakim berpakaian dinas, dan ruang kerja berantakan

4.	31.37 – 31.50	Anton mengungkapkan kepada Jaka bahwa Hakim Muhtar adalah pelanggan narkoba Ferry kebenaran yang datang dari narapidana, bukan dari mekanisme pengawasan institusional.	<i>Scene</i> merujuk pada kegagalan mekanisme pengawasan institusi hukum dan memperlihatkan relasi kuasa tidak setara antara narapidana dan aparat.	Prosedural	Dialog Anton dan konteks ruang informal
5.	22.15 – 23.13	Yeremia pasrah setelah kalah sidang melawan pengacara Bu Sari. Yeremia menyatakan pengacara seperti Sari membuat proses memasukkan penjahat ke penjara semakin sulit.	<i>Scene</i> memperlihatkan dominasi struktur sosial yang timpang di mana pengacara elite mampu membalikkan proses hukum, dan mengandung dialog eksplisit tentang kegagalan sistem.	Struktural	postur pasrah Yeremia dan seragam dinas polisi
6.	24.40 – 25.00	Pembunuh bayaran mengaku kepada Jaka bahwa ia hanya pelaksana perintah Ferry mengungkapkan struktur kekuasaan kriminal di balik rangkaian pembunuhan.	<i>Scene</i> ini menunjukkan struktur kekuasaan yang melindungi kelompok berkuasa dan memperlihatkan subordinasi kelompok lemah.	Struktural	Postur tidak berdaya pembunuh bayaran, dan suasana gelap

7.	21.15 – 22.00	Sekar menemukan bukti narkoba di ruang kerja Hakim Muhtar. Jaka merespons dengan pernyataan bahwa hakim ternyata tidak sebersih yang selama ini dikira.	<i>Scene</i> mengandung simbol institusi hukum formal (ruang kerja hakim, atribut jabatan)	Simbolik	Ruang kerja hakim dan barang bukti narkoba
8.	13.40 – 13.51	Wartawan mengkonfrontasi Gunawan dengan catatan kegagalan institusi kepolisian yang tidak berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai selama 20 tahun.	Pada <i>Scene</i> ini kegagalan sistemik institusi hukum dalam jangka panjang dan memperlihatkan pertanggungjawaban publik yang tidak terpenuhi	Sistemik	Ekspresi defensif Gunawan, konteks wawancara publik resmi
9.	36.52 – 38.03	Fery memprovokasi Jaka dengan menyebut kematian anaknya akibat ketidakberanian Jaka bertindak di luar hukum. Jaka kehilangan kendali dan memukul Fery berkali-kali di luar prosedur interogasi resmi.	<i>Scene</i> memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara dalam interogasi dan merepresentasikan vigilante justice melalui kekerasan aparat di luar prosedur resmi sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem.	<i>Vigilante Justice</i>	Kekerasan fisik Jaka, dialog provokatif Fery dan ruang interogasi gelap

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

B. Episode 2

Tabel 4.3 Unit Analisis Episode 2

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	08.55 – 09.44	Jaka mengancam menambah masa tahanan dua kali lipat kepada Anton, Haidar, dan Elias yang menolak direkrut. Rekrutmen dilakukan secara paksa tanpa prosedur, dokumen, atau saksi resmi apapun.	<i>Scene</i> ini menunjukkan pada proses hukum yang tidak dijalankan sesuai prinsip keterbukaan dan melibatkan interaksi aparat dengan narapidana yang memperlihatkan relasi kuasa tidak setara.	Ketidakadilan Prosedural	Dialog ancaman Jaka, postur dominan aparat, basecamp gelap tanpa atribut resmi
2.	03.28 – 03.35	Elias memohon kepada Sekar agar tidak diperlakukan berlebihan dengan berjanji tidak akan melarikan diri. Sekar menolak tegas dan memperingatkan Elias untuk tidak bertingkah.	<i>Scene</i> memperlihatkan dominasi struktur sosial yang timpang antara aparat dan narapidana serta relasi kuasa yang tidak setara	Ketidakadilan Struktural	Gelang GPS di kaki Elias
3.	00.46 – 00.55	Anton yang baru dikeluarkan dari penjara mempertanyakan apakah kebebasannya bersifat nyata dan resmi menunjukkan ketidakpastian tentang status hukumnya sebagai	<i>Scene</i> merujuk pada kegagalan substansi hukum dalam menjamin kepastian hak dasar bagi narapidana yang	Ketidakadilan Substantif	Pakaian tahanan yang dilepas, ekspresi tidak percaya Anton, suasana luar penjara

		narapidana yang direkrut negara.	bekerja sama dengan negara.		
4.	07.01 – 07.20	Jaka menggunakan sengatan listrik kepada narapidana yang dianggap tidak kooperatif tanpa kehadiran saksi resmi atau mekanisme pengawasan apapun.	<i>Scene</i> mengandung simbol kekerasan institusional dan memperlihatkan relasi dominasi aparat atas narapidana yang menciptakan ketertundukan melalui rasa sakit.	Ketidakadilan Simbolik	Alat sengatan listrik
5.	08.20 – 08.50	Sekar memasang GPS <i>tracker</i> di kaki ketiga narapidana sebagai syarat wajib operasi. Hanya Jaka dan Sekar yang memiliki otoritas melepasnya menunjukkan kontrol fisik penuh negara atas tubuh narapidana.	<i>Scene</i> ini mengandung simbol kontrol fisik negara atas tubuh narapidana yang menciptakan relasi dominasi dan ketertundukan melalui pengawasan teknologi.	Ketidakadilan Simbolik	GPS <i>tracker</i> di kaki dan dialog aturan Sekar
6.	10.33 – 10.50	Jaka menegaskan operasi bersifat rahasia dan tim tidak akan mendapat bantuan dari unit kepolisian lain. Ia juga mengakui temuan polisi reguler tidak cukup substansial.	<i>Scene</i> memperlihatkan pada ketimpangan yang melekat dalam institusi hukum yang	Ketidakadilan Sistemik	Dialog rahasia Jaka

			beroperasi tertutup tanpa mekanisme pengawasan dan koordinasi resmi.		
7.	31.00 – 31.50	Jenderal Nurdin berpura-pura tidak tahu tentang kasus Hakim Muhtar meskipun Gunawan menyindir bahwa Nurdin biasanya sangat memperhatikan detail.	<i>Scene</i> memperlihatkan ketimpangan yang melekat dalam institusi hukum melalui negosiasi informal antar pejabat tinggi yang saling melindungi kepentingan masing-masing.	Ketidakadilan Sistemik	Pakaian seragam dinas dan ekspresi waspada Nurdin
8.	13.50 – 14.21	Anton menolak keras bekerja sama dengan polisi. Haidar mengajak Anton membangun solidaritas sesama narapidana untuk bekerja demi kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan institusi hukum.	<i>Scene</i> merepresentasikan <i>vigilante justice</i> melalui penolakan terhadap legitimasi institusi hukum.	<i>Vigilante Justice</i>	Dialog penolakan Anton dan ruang tanpa pengawasan aparat

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

C. Episode 3

Tabel 4.4 Unit Analisis Episode 3

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	00.40-01.13	Menampilkan investigasi awal kematian Jenderal Nurdin di lokasi terapis petugas melapor bahwa rekaman CCTV rusak dan tidak ada tanda perlawanan pada korban.	<i>Scene</i> ini menjelaskan pada proses hukum yang tidak bisa dijalankan secara transparan akibat bukti yang hilang dan mengandung simbol investigasi resmi yang gagal.	Ketidakadilan Prosedural	TKP terapis, tim INAFIS berseragam, dan dialog laporan bukti yang rusak
2.	04.45-05.15	Menampilkan Elias menemukan siaran berita resmi kepolisian yang menyatakan bahwa Jenderal Nurdin meninggal karena riwayat penyakit berat saat bertugas.	<i>Scene</i> ini mengandung simbol institusi hukum formal yang digunakan untuk menutup kebenaran dan memperlihatkan dominasi struktur kekuasaan dalam mendefinisikan narasi resmi.	Ketidakadilan Struktural	Layar laptop dengan siaran berita dan logo institusi kepolisian
3.	08.50-09.40	Menampilkan percakapan di mana Gunawan mengakui Nurdin dibunuh, namun melarang Jaka ke TKP karena kasus tersebut menyentuh kepentingan elit	<i>Scene</i> memperlihatkan kepentingan kewenangan hukum dan memperlihatkan	Ketidakadilan Struktural	Dialog Gunawan dan Jaka, suasana percakapan tertutup

		politik, yaitu calon gubernur bernama Pak Aziz.	relasi kuasa yang tidak setara antara aparat dan kekuasaan politik.		
4.	07.25-07.59	Menampilkan Jaka dan Yeremia yang mencurigai adanya manipulasi informasi resmi terkait kematian Nurdin, serta peringatan untuk berhati-hati agar nasib mereka tidak seperti Nurdin dan Muhtar.	<i>Scene</i> ini menunjukkan pada ketimpangan sistemik dalam institusi hukum di mana aparat tidak bisa mempercayai rekan satu institusinya sendiri akibat korupsi yang meluas.	Ketidakadilan Sistemik	Dialog berbisik Jaka dan Yeremia,
5.	32.25-32.35	Menampilkan Jaka yang menegur keras tindakan gegabah Anton dan memberikan ancaman dengan moncong pistol polisi apabila ia kembali berulah.	<i>Scene</i> ini mengandung simbol senjata aparat yang digunakan sebagai instrumen dominasi dan memperlihatkan relasi kuasa yang sangat timpang antara aparat dan narapidana.	Ketidakadilan Simbolik	Postur mengancam dan ekspresi tunduk Anton

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

D. Episode 4

Tabel 4.5 Unit Analisis Episode 4

No	Menit	Deskripsi Scene	Alasan Pemilihan Scene	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	04.55-05.30	Menampilkan percakapan antara Jaka dan Haidar mengenai kepercayaan dan kepastian nasib setelah misi selesai Haidar menyatakan ketidakyakinannya bahwa Jaka akan membebaskannya.	<i>Scene</i> ini menunjukkan kegagalan substansi hukum dalam menjamin hak kebebasan dasar yang setara bagi narapidana yang bekerja sama dengan negara.	Ketidakadilan Substantif	Dialog Haidar dan Jaka dan ruangan tertutup tanpa saksi resmi
2.	00.50-01.05	Menampilkan Jaka yang menodongkan pistol langsung ke dada Ipang untuk memaksa keterangan tentang Nurdin, hingga Ipang ketakutan dan menyebut nama Chandra.	<i>Scene</i> mengandung simbol senjata aparat yang digunakan sebagai alat dominasi untuk memaksa keterangan dan memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara dalam interogasi ilegal.	Ketidakadilan Simbolik	Pistol yang diarahkan ke dada, ekspresi gemetar Ipang dan ruangan gelap
3.	06.20-06.50	Menampilkan Jaka yang menugaskan Haidar ke lapangan setelah GPS dilepas, tanpa senjata, dan mengancam akan menembak kepalanya jika kabur, sambil mengabaikan peringatan Sekar.	<i>Scene</i> ini mengandung simbol kontrol fisik negara dan ancaman kekerasan ekstrim sebagai instrumen dominasi, serta	Ketidakadilan Simbolik	GPS <i>tracker</i> yang dilepas, ancaman verbal Jaka dan ekspresi khawatir Sekar yang diabaikan

			memperlihatkan pengabaian terhadap prosedur yang menciptakan relasi dominasi absolut.		
4.	36.50-37.10	Menampilkan percakapan telepon rahasia antara Bu Sari (seorang pengacara) dan Chandra (bos kartel) mengenai kelanjutan kerja sama mereka pasca kematian Nurdin.	Scene ini memperlihatkan pada ketimpangan yang melekat dalam institusi hukum melalui kolusi antara pengacara dan jaringan kriminal yang beroperasi secara sistematis.	Ketidakadilan Sistemik	Telepon genggam, ekspresi waspada Chandra dan konteks percakapan rahasia tertutup

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

POLITEKNIK
TEMPO

E. Episode 5

Tabel 4.6 Unit Analisis Episode 5

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	09.50-10.40	Menampilkan perdebatan antara Jaka dan Sekar mengenai janji pembebasan bersyarat narapidana. Jaka mengakui bahwa realisasi janji tersebut di luar kendalinya, sementara Sekar menyindirnya sebagai pengkhianat.	<i>Scene</i> ini menunjukkan pada kegagalan substansi hukum dalam menjamin hak narapidana yang bekerja sama dengan negara dan memperlihatkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.	Ketidakadilan Substantif	Dialog konfrontatif Sekar dan Jaka, ekspresi frustrasi, lorong gelap sebagai latar
2.	33.50-35.05	Menampilkan Jaka yang secara agresif menyudutkan Ito ke dinding dan menodongkan pistol tepat ke kepalanya untuk menginterogasi paksa terkait pembunuhan anak Jaka.	<i>Scene</i> ini menunjukkan proses hukum yang tidak dijalankan sesuai prosedur dan memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara dalam interogasi yang melanggar hak tersangka.	Ketidakadilan Prosedural	Pistol di kepala Ito, postur agresif Jaka dan dialog emosional

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

F. Episode 6

Tabel 4.7 Unit Analisis Episode 6

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1.	03.36-04.11	Menampilkan Jaka yang menangkap Ito tanpa koordinasi atasan dan mengabaikan Sekar tentang protokol. Jaka menegaskan bahwa peraturan tidak selalu bisa menyelamatkan situasi dan ia perlu mengetahui kebenaran tentang kematian putrinya.	<i>Scene</i> pada proses hukum yang tidak dijalankan sesuai prinsip keterbukaan dan konsistensi aturan, dan melibatkan dialog langsung tentang pengabaian protokol.	Ketidakadilan Prosedural	Dialog Jaka mengabaikan Sekar dan penangkapan tanpa prosedur,
2.	04.40-05.18	Menampilkan Ito yang menantang Jaka dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Ito merasa terlindungi karena mengetahui kelemahan sistem hukum yang tidak bisa menjangkaunya tanpa bukti formal.	<i>Scene</i> ini memperlihatkan pada dominasi kelompok berkuasa yang terlindungi secara struktural dari jangkauan hukum dan memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara.	Ketidakadilan Struktural	Ekspresi percaya diri Ito, postur menantang, dialog tentang ketiadaan bukti
3.	07.35-08.23	Menampilkan Jenderal Gunawan yang merespons laporan penggunaan kekerasan oleh Jaka bukan dengan mempertanyakan kebenaran atau melindungi hak terduga, melainkan dengan mengkhawatirkan dampak skandal tersebut	<i>Scene</i> ini memperlihatkan pada penggunaan hukum sebagai alat perlindungan kepentingan institusional dan	Ketidakadilan Simbolik	Dialog telepon Gunawan dan prioritas karir atas kebenaran

		terhadap citra institusi dan karir pribadi mereka.	memperlihatkan dominasi wacana citra atas kebenaran.		
4	13.17-13.42	Menampilkan Jaka yang memperjuangkan keringanan hukuman bagi Anton, Haidar, dan Elias. Gunawan menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa operasi tidak memiliki dasar resmi sejak awal sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan keringanan.	Scene ini mengandung kegagalan substansi hukum dalam menjamin hak narapidana yang sudah memenuhi kewajiban yang diminta negara.	Ketidakadilan Substantif	Dialog konfrontatif Jaka dan Gunawan, ekspresi marah Gunawan, konteks ruangan tertutup
5	06.25-07.17	Tergambar Jaka yang menuntut jawaban dari Ito tentang alasan pembunuhan anaknya. Ito merespons provokatif, membuat Jaka kehilangan kendali dan memukul Ito secara brutal di luar prosedur interogasi yang sah.	Scene ini merepresentasikan kekerasan aparat di luar prosedur resmi sebagai reaksi langsung terhadap kejahatan yang menimpa keluarganya.	<i>Vigilante Justice</i>	dialog provokatif Ito, ruang basecamp gelap tanpa saksi resmi

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

G. Episode 7

Tabel 4.8 Unit Analisis Episode 7

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1	29.50-30.05	Menampilkan Ito yang dinyatakan bebas dan melewati kerumunan wartawan yang mengkonfrontasi Jaka dan Gunawan. Wartawan mempertanyakan proses penangkapan yang menggunakan kekerasan namun gagal membuktikan kesalahan tersangka.	<i>Scene</i> ini menunjukan proses hukum yang gagal berjalan sesuai prosedur dan memperlihatkan pertanggungjawaban publik atas kegagalan institusi.	Ketidakadilan Prosedural	kerumunan wartawan, dialog pertanggungjawaban, seragam dinas Gunawan
2	34.10-34.50	Menampilkan Sekar yang melaporkan temuan aliran dana miliaran rupiah secara rutin ke rekening Sari, Nurdin, dan Mokhtar. Dana tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar atas nama Ahmad Aziz (gubernur).	<i>Scene</i> ini merujuk pada dominasi struktur kekuasaan politik yang melindungi jaringan korupsi dari pertanggungjawaban hukum formal.	Ketidakadilan Struktural	Dialog pengungkapan data, suasana basecamp gelap dan informal
3	04.25-05.06	Menampilkan pertemuan tertutup antara Yeremia dan Gunawan. Yeremia menyatakan kasus tidak bisa dibawa ke pengadilan karena video kekerasan Jaka (yang sedang diskors) telah tersebar, dan mengancam akan membebaskan Ito.	<i>Scene</i> memperlihatkan ketimpangan yang melekat dalam institusi hukum melalui negosiasi informal antar pejabat yang menentukan nasib kasus	Ketidakadilan Sistemik	Ruangan formal tertutup, dialog negosiasi informal, video kekerasan sebagai alat tekanan

4	27.45-29.35	Sekar mengkonfrontasi Pak Aziz secara informal di pasar terkait transfer uang bulanan ke kelompok kriminal dan mengancamnya dengan skandal Pilkada. Pak Aziz akhirnya setuju untuk bernegosiasi secara tertutup.	<i>Scene</i> memperlihatkan ketimpangan sistemik di mana penegakan hukum hanya bisa dilakukan melalui negosiasi informal dan ancaman, bukan melalui proses hukum formal yang transparan.	Ketidakadilan Sistemik	Seragam dinas Pak Aziz, lorong pasar sepi dan ekspresi waspada Aziz
5	08.10-09.10	Menampilkan Jaka yang mengancam akan menghancurkan keluarga Ito sebagai bentuk balasan dendam personal, dengan sengaja meninggalkan logika hukum formal demi memaksakan pengakuan tersangka.	<i>Scene</i> menunjukkan ancaman kekerasan personal aparat di luar prosedur sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem dalam menjangkau pelaku.	<i>Vigilante Justice</i>	Dialog ancaman personal Jaka, ekspresi tenang Ito, ruang interogasi gelap tanpa saksi

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

H. Episode 8

Tabel 4.9 Unit Analisis Episode 8

No	Menit	Deskripsi Scene	Alasan Pemilihan Scene	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1	20.15-20.45	Yeremia memberitahu Sekar bahwa para politisi itu kotor/korup, dan tugasnya adalah memastikan mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun harus mengesampingkan pencarian pembunuh.	Scene ini merujuk pada ketimpangan sistemik korupsi politik yang sudah melekat dan memperlihatkan kegagalan institusi	Ketidakadilan Prosedural	Dialog Yeremia dan Sekar, ekspresi determinasi Yeremia, konteks percakapan informal tertutup
2	32.20-32.55	Ito menyandera Omar di parkiran bawah tanah yang gelap, mengancam akan membunuhnya karena menganggapnya pantas mati, dan menantang Jaka yang mencoba mencegahnya.	Scene ini merepresentasikan kekerasan individu tanpa otoritas hukum yang sah sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem melindungi masyarakat.	Vigilante Justice	Omar tersandera, parkiran bawah tanah gelap, dialog ancaman

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

I. Episode 9

Tabel 4.10 Unit Analisis Episode 9

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1	02.45-03.25	Yeremia menemukan bahwa Omar dibebaskan dari tuduhan karena kurangnya barang bukti dan hilangnya identitas pelapor dari sistem pengadilan, menunjukan campur tangan Pak Aziz.	<i>Scene</i> ini menunjukan proses hukum yang tidak berjalan sesuai prinsip konsistensi dan kejelasan aturan akibat manipulasi dari kekuasaan politik.	Ketidakadilan Prosedural	Dialog Yeremia, dokumen pengadilan, ekspresi frustrasi, bukti yang hilang dari sistem
2	17.50-18.05	Bu Dewi (istri JPU) secara eksplisit mengusir pihak kepolisian dari kediamannya dan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap institusi tersebut akibat lambatnya penangkapan pelaku.	Adegan secara eksplisit merujuk pada kegagalan proses hukum dalam memberikan perlindungan tepat waktu kepada korban dan memperlihatkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi.	Ketidakadilan Prosedural	Ekspresi marah Bu Dewi, gestur mengusir, seragam polisi sebagai simbol institusi yang ditolak
3	33.50-34.48	Jaka secara sepihak melepaskan GPS dari para narapidana dan mendeklarasikan bahwa misi resmi dan janji pembebasan bersyarat	<i>Scene</i> ini memperlihatkan proses hukum yang tidak dijalankan sesuai prinsip	Ketidakadilan Prosedural	GPS <i>tracker</i> yang dilepas, dialog deklarasi Jaka, ekspresi terkejut

		hanyalah rekayasa untuk mencari pembunuh anaknya.	keterbukaan dan konsistensi serta mengungkap kebohongan prosedur dari awal.		narapidana, suasana dramatis
4	06.07-06.50	Omar berlindung di balik vonis hakim yang membebaskannya, sementara Jaka menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena ketakutan publik terhadap status sosial Omar sebagai anak gubernur.	Adegan mengandung simbol vonis hakim yang digunakan sebagai instrumen perlindungan elite dan memperlihatkan relasi dominasi yang diciptakan oleh status sosial dalam sistem hukum.	Ketidakadilan Simbolik	Omar yang bebas, ekspresi sadar Jaka, simbol vonis hakim sebagai tameng kekuasaan

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

POLITEKNIK
TEMPO

J. Episode 10

Tabel 4.11 Unit Analisis Episode 10

No	Menit	Deskripsi <i>Scene</i>	Alasan Pemilihan <i>Scene</i>	Kategori Ketidakadilan	Tanda Dominan
1	20.30-21.22	Melalui adegan kilas balik, Yeremia mengungkapkan kecurangan dalam sidang Omar. Aparat penegak hukum terbukti menerima suap dari pihak Gubernur untuk menghilangkan bukti CCTV agar Omar divonis bebas.	<i>Scene</i> ini memperlihatkan proses hukum yang dikompromikan oleh suap dan memperlihatkan relasi kuasa yang tidak setara antara elite politik dan institusi peradilan.	Ketidakadilan Prosedural	Adegan kilas balik sidang, dokumen hukum, dialog pengungkapan suap dan ruang sidang
2	19.47-20.00	<i>Scene</i> ini menampilkan Jaka yang berteriak memanggil Yeremia, di mana Yeremia merespon dengan melakukan intimidasi bersenjata terhadap Omar serta melakukan penganiayaan fisik hingga Omar berteriak kesakitan.	<i>Scene</i> ini merujuk pada kekerasan fisik JPU di luar kapasitas hukumnya sebagai reaksi personal terhadap kegagalan sistem melindungi anaknya.	<i>Vigilante Justice</i>	Senjata Yeremia, Omar kesakitan, teriakan Jaka, pencahayaan gelap dramatis
3	27.40-28.32	Jaka mencekik Yeremia dengan penuh emosi. Di saat yang sama, Yeremia justru tertawa kesakitan dan menyatakan akan terus memburu keadilan dengan cara apa pun.	<i>Scene</i> ini memperlihatkan di mana dua penegak hukum saling berhadapan karena	<i>Vigilante Justice</i>	Cekikan Jaka, tawa Yeremia, pencahayaan biru gelap, dialog 'cara apa pun'

			keduanya telah melampaui batas prosedur atas nama keadilan personal.		
4	28.41-29.13	Jaka teringat ucapan mendiang anaknya (Siska) yang menganggapnya sebagai superhero. Jaka kemudian melepaskan cekikannya dan berteriak menolak menjadi pembunuh, meskipun dengan alasan menegakkan keadilan.	<i>Scene</i> ini merepresentasikan penolakan terhadap <i>flashback</i> kemanusiaan dan menjadi pernyataan ideologis bahwa kekerasan atas nama keadilan tetap tidak dapat dibenarkan.	<i>Vigilante Justice</i>	<i>Flashback</i> Siska, ekspresi air mata Jaka, momen melepas cekikan, teriakan penolakan

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.1.3 Temuan Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial *Bad Guys* (2025)

Dalam menganalisis representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes dengan tiga tingkat makna: denotatif, konotatif, dan mitos. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tanda-tanda dalam film serial membentuk makna tentang sistem hukum dan merepresentasikan krisis keadilan kepada audiens:

1. Denotasi: Representasi Objek dan Naratif

Denotasi mengacu pada makna literal atau makna langsung dari elemen-elemen yang ditampilkan dalam film serial. Pada tahap ini, analisis berfokus pada apa yang terlihat dan terdengar secara faktual, seperti adegan penangkapan, pembebasan narapidana, interogasi, penggunaan kekerasan, dialog antar tokoh, serta alur pembentukan tim khusus. Denotasi menggambarkan tindakan aparat hukum yang merekrut narapidana untuk membantu penegakan hukum, konflik antar karakter, serta situasi kriminal yang menjadi inti cerita. Pada level ini, makna belum diartikan secara simbolik, melainkan dideskripsikan secara objektif sesuai representasi visual dan naratifnya.

2. Konotasi: Simbolisme dalam Hubungan Karakter

Pada tingkat konotatif, dalam film serial ini, hubungan antara aparat penegak hukum dan narapidana tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama taktis, tetapi juga menyiratkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum formal. Aparat yang melibatkan kriminal untuk menegakkan hukum menghadirkan simbol ambiguitas moral serta krisis legitimasi institusi hukum. Representasi ini mengandung makna bahwa prosedur hukum formal dianggap tidak cukup mampu menghadapi kejahatan ekstrem, sehingga dibutuhkan cara lain yang berada di luar batas hukum formal.

3. Mitos: Kritik Sosial dalam Film

Pada tingkat mitos, pada film serial ini membentuk narasi bahwa keadilan substantif lebih penting dibanding kepatuhan terhadap prosedur hukum formal. Mitos yang dikonstruksi adalah gagasan bahwa pelanggaran terhadap hukum dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih besar. Melalui representasi tersebut, film serial ini menyampaikan kritik sosial terhadap sistem peradilan yang dianggap lamban, tidak tegas, dan gagal memberikan rasa keadilan. Mitos ini secara tidak langsung menormalisasi praktik vigilante justice serta membangun persepsi bahwa legitimasi moral dapat mengungguli legitimasi hukum.

Melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, penelitian ini menunjukkan bahwa film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia tidak hanya menyajikan kisah aksi kriminal dan penegakan hukum, tetapi juga menawarkan kritik sosial terhadap sistem peradilan dan praktik keadilan di masyarakat. Tanda-tanda dalam film serial, baik melalui aspek visual, simbolis, maupun mitos yang

dibangun, memperlihatkan bagaimana karya ini berusaha menantang dan merepresentasikan realitas ketidakadilan hukum.

Dengan demikian, film serial ini berfungsi sebagai media kritik sosial yang mengajak audiens untuk memahami bahwa hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Representasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa ketidakadilan hukum dapat bersifat sistemik dan terstruktur, serta dinormalisasi dalam kehidupan sosial.

4.2 Analisis Hasil Semiotika Roland Barthes

4.2.1 Ketidakadilan Prosedural

Ketidakadilan prosedural muncul saat proses hukum tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip moralitas formal. Dalam pandangan Lon L. Fuller, keadilan hukum bukan hanya bergantung pada isi hukum, tetapi juga pada prosedur yang dijalankan, seperti keterbukaan, konsistensi, dan kejelasan aturan. Ketidakadilan prosedural dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia direpresentasikan dalam Episode 1,2,3,5,6,7,8,9 dan 10 dimana sidang pengadilan yang tampak berjalan formal dan sah ternyata menyimpan praktik korupsi dibalikinya. Representasi ketidakadilan prosedural dalam episode ini digambarkan dalam scene berikut:

Tabel 4.12 Episode 1 scene menit ke 09.00-09.55

Baris	Isi
Objek/ Visual	

Dialog/Suara	Hakim Muhtar: “Baiklah, sidang hari ini akan kami putuskan. Menyatakan terdakwa saudara Fery Santoso melakukan tindak pidana peredaran narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 687 kg. Dengan ini kami menjatuhkan pidana terdakwa saudara Fery Santoso adalah penjara seumur hidup” Fery: “Hei Jak kan dah gua bilang ga bisa nyetopin gua pake hukum.. kaya ga tau aja”
Denotasi	Scene menampilkan tiga hakim bertoga merah yang duduk di meja majelis sidang. Hakim Ketua membacakan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Fery Santoso atas kasus peredaran narkoba golongan I sebanyak 687 kg. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman mati.
Konotasi	Toga merah secara umum merupakan simbol institusional dari otoritas dan legitimasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan toga dalam scene ini menegaskan posisi hakim sebagai representasi kekuasaan hukum yang seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak.
Mitos	Mitos yang terbentuk adalah sidang formal yang tampak sah sebagai kedok dari praktik korupsi, seolah-olah itulah cara kerja sistem peradilan yang sudah seharusnya dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.13 Episode 1 scene menit ke 10.15-10.27

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Tidak ada dialog. Hakim Muhtar menyimpan kokain di pulpen dan ingin mengonsumsinya di ruangnya sendiri.

Denotasi	Scene menampilkan Hakim Muhtar yang secara diam-diam mengeluarkan kokain yang tersimpan dalam pulpen di ruang kerjanya setelah sidang selesai. Tidak ada saksi dan tidak ada dialog hanya tindakan tersembunyi seorang hakim yang mengonsumsi narkoba di balik pintu tertutup ruang jabatannya.
Konotasi	Pulpen merupakan simbol yang erat diasosiasikan dengan kewenangan hukum alat yang digunakan hakim untuk menandatangani putusan yang menentukan nasib seseorang. Pulpen yang berisi kokain secara konotatif dipahami publik sebagai pembalikan total dari makna simbol tersebut
Mitos	Mitos yang dibangun adalah di balik formalitas dan simbol-simbol kewenangan hukum, terdapat praktik ilegal yang tersembunyi dan tidak tersentuh oleh mekanisme pengawasan apapun.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.14 Episode 1 scene menit ke 11.29-11.55

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Petugas INAFIS: "Empat sentimeter, sangat dalam" Jaka: "Ini serangan Pak, bukan self-defense" Petugas INAFIS: "Alat pembunuh juga tidak kami temukan. Sepertinya dibawa pelaku" Gunawan: "Rapi. Bersih. Terlalu bersih untuk pembunuhan biasa"

Denotasi	Hakim Muhtar ditemukan tewas dengan luka sayatan sedalam empat sentimeter di leher. Tim INAFIS melakukan olah TKP dan menyatakan tidak ada alat pembunuh yang tertinggal. Jaka menyimpulkan ini adalah serangan terencana. Ruangan tampak rapi tanpa tanda-tanda perlawanan berlebih.
Konotasi	Ruang kerja hakim secara umum merupakan simbol kesakralan dan kekuasaan tertinggi institusi peradilan. Oleh karena itu, kematian hakim di dalam ruangnya sendiri menimbulkan konotasi runtuhnya benteng terakhir kewenangan hukum dari dalam.
Mitos	Mitos yang dibangun dalam scene ini adalah pengungkapan korupsi hakim bukan sebagai sesuatu yang mengejutkan, melainkan sebagai konfirmasi dari kecurigaan yang sudah lama dipegang masyarakat sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan lagi.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.15 Episode 1 scene menit ke 31.37-31.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Anton: "Yang Ferry bilang itu bener, hakim itu memang pelanggannya dia, orang sok suci yang bersembunyi di balik jubah"
Denotasi	Scene menampilkan Anton di ruang interogasi yang remang dan bergumam bahwa informasi Ferry tentang Hakim Mochtar terbukti benar hakim tersebut adalah pelanggan narkoba dari jaringan Ferry. Anton menyebut hakim sebagai orang yang bersembunyi di balik jubah. Tidak ada orang lain yang mendengar pernyataan ini.

Konotasi	Pencahayaan redup dengan satu lampu gantung secara umum dalam konteks sinematografi merupakan simbol kerahasiaan dan kebenaran yang tersembunyi dari pengawasan publik. Oleh karena itu, frasa " <i>bersembunyi di balik jubah</i> " dalam scene ini mempresentasikan adanya penyalahgunaan simbol jabatan sebagai instrumen untuk menutupi tindakan yang bertentangan.
Mitos	Mitos yang dibangun dalam scene ini adalah pengungkapan korupsi hakim bukan sebagai sesuatu yang mengejutkan, melainkan sebagai konfirmasi dari kecurigaan yang sudah lama dipegang masyarakat sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan lagi.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.16 Episode 2 *scene* menit ke 08.55-09.44

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Haidar: "Ini serius? kita? bantu polisi tangkep penjahat?" Anton: "Untungnya buat gua apa?" Sekar: "Kalau kalian berhasil menangkap pembunuhnya, akan ada pembebasan bersyarat" Haidar: "Pembebasan bersyarat?" Anton: "Gua si ga mau ya, bebas tapi masih berurusan sama polisi males gua"

	Haidar: "Bayaran segitu kurang bos buat berurusan sama polisi, terus ngapain pake ada aturan-aturan segala" Jaka: "Kalian kira kalian punya pilihan!!? ga ada negosiasi ya! kabur kayak tadi lagi saya tambahin masa tahanan kalian 2 kali lipat"
Denotasi	Scene menampilkan proses rekrutmen paksa tiga narapidana oleh Jaka dan Sekar. Narapidana mempertanyakan keuntungan yang mereka dapat dan menolak terlibat. Jaka merespons dengan ancaman penambahan masa tahanan dua kali lipat apabila mereka tidak mau bekerja sama, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi.
Konotasi	Ancaman " <i>kabur lagi saya tambahin masa tahanan 2 kali lipat</i> " secara umum dipahami sebagai bentuk pemaksaan bukan prosedur hukum yang resmi. Tidak adanya dokumen, saksi, atau prosedur formal dalam proses ini secara konotatif dipahami publik sebagai praktik di luar jalur hukum yang sah.
Mitos	Scene ini menampilkan aparat berwenang memaksa narapidana bekerja sama tanpa prosedur resmi demi tujuan yang dianggap lebih besar. Media membangun persepsi bahwa ancaman dari aparat kepada tahanan adalah hal yang wajar terjadi di balik layar sistem hukum

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.17 Episode 3 scene menit ke 00.40-01.13

Baris	Isi
Objek/ Visual	 The image shows a man lying down, looking up at a person in a white coat who is holding a card over his head. The man is looking up with a concerned expression. The person in the white coat is wearing gloves and holding the card with both hands. The background is dark and blurry. The word 'Vidio' is visible in the bottom right corner of the image.

Dialog/ Suara	Kematian Jenderal Nurdin dikarenakan dibunuh oleh pembunuh misterius di tempat terapis Polisi: "Korban ditemukan oleh terapis langganannya. Kami sudah periksa saksi dan dia punya ***. CCTV di sekitarnya rusak" Jenderal Gunawan: "Ada luka lain?" Polisi: "Gak ada Jenderal, di tubuh korban tidak ada tanda-tanda perlawanan" Jenderal Gunawan: "Hubungi keluarganya minta izin untuk melakukan autopsi dan cek apakah ada kandungan hapsah di tubuhnya sekaligus cek CCTV 1 bulan kebelakang"
Denotasi	Scene menampilkan investigasi awal kematian Jenderal Nurdin di lokasi tempat terapis. Petugas melaporkan bahwa CCTV di sekitar lokasi dalam kondisi rusak sehingga tidak ada rekaman yang bisa dijadikan bukti. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan di tubuh korban. Gunawan memerintahkan autopsi dan pengecekan rekaman CCTV satu bulan ke belakang.
Konotasi	Tidak adanya tanda-tanda perlawanan pada tubuh korban yang merupakan jenderal berpengalaman secara konotatif dipahami publik sebagai indikasi bahwa kematian ini tidak wajar namun dirancang agar terlihat wajar dengan rusaknya CCTV di sekitar lokasi kematian seorang pejabat tinggi secara umum diasosiasikan dengan penghilangan bukti yang disengaja.
Mitos	Media membangun persepsi bahwa rusaknya CCTV dan hilangnya jejak bukti di sekitar kematian adalah pola yang sudah biasa terjadi sebagai bagian normal dari cara sistem hukum bekerja ketika berhadapan dengan kasus yang menyentuh kepentingan kekuasaan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.18 Episode 5 scene menit ke 33.50-35.05

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Angkat tangan" Ito: "Hahahaha" Jaka: "Kenapa kamu ANJING!!!" Ito: "Hahahaha ampun pak polisi" Jaka: "Kenapa kamu bunuh anak saya!!!?" Ito: "Bukan saya yang membunuh anak bapak" Jaka: "Coba kamu jawab yang benar atau saya tembak kepala kamu!!"
Denotasi	Visual menampilkan Jaka (berstatus polisi) secara agresif menyudutkan Ito ke dinding, menodongkan pistol tepat ke kepalanya dengan dialog mengkonfirmasi bahwa Jaka sedang melakukan interogasi paksa di bawah ancaman pembunuhan ("saya tembak kepalamu") demi mendapatkan pengakuan terkait pembunuhan anaknya.
Konotasi	Seragam dan senjata yang direpresentasikan sebagai fasilitas pelindung negara dari institusi resmi telah bergeser maknanya menjadi instrumen kekerasan untuk memfasilitasi vendeta (dendam) pribadi sang aparat.
Mitos	Pelanggaran prosedur dan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat dapat dimaklumi apabila didasari oleh motif traumatis personal. Media membentuk cara berpikir bahwa tindakan brutal seorang penegak hukum adalah respons psikologis yang wajar dan manusiawi ketika menyangkut keluarganya.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.19 Episode 6 *scene* menit ke 03.36-04.11

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar :Pak jaka" Jaka: "Pak Gunawan ga perlu tau soal ini.. nanti aja kalo uda ada hasilnya ya..." Sekar: "Tapi ini ga sesuai dengan protokol dan instruksi" Jaka: "Persetanlah dengan protokol. Tolong biar saya proses dia dulu (yang dimaksud investigasi Ito di base camp timnya jaka)" Sekar: "Peraturan itu ngga bisa seenaknya aja diabaikan" Jaka: "Sejauh ini kamu ga sadar juga!!? peraturan ga selamanya menjadi juru selamat kita kar. Saya perlu tau kebenaran tentang putri saya" Sekar: "Oke"
Denotasi	Scene menampilkan Jaka yang menangkap Ito tanpa koordinasi atasan dan mengabaikan Sekar tentang protokol. Jaka menegaskan bahwa peraturan tidak selalu bisa menyelamatkan situasi dan ia perlu mengetahui kebenaran tentang kematian putrinya.
Konotasi	Aparat yang mengabaikan protokol penangkapan secara umum diasosiasikan dengan penyalahgunaan wewenang. Pernyataan Jaka " <i>persetanlah dengan protokol</i> " secara konotatif dipahami publik sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip dasar proses hukum yang seharusnya berjalan secara transparan dan konsisten.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah melanggar protokol demi kebenaran adalah tindakan yang dapat dimaklumi sehingga penonton menerima sebagai hal yang wajar bahwa proses hukum formal bisa dikesampingkan atas nama keadilan personal.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.20 Episode 7 scene menit ke 29.50-30.05

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Pak Jaka dan Jenderal Gunawan berada dikelilingi wartawan dan Ito melewati kerumunan itu (Sepertinya dinyatakan tidak bersalah terhadap tuduhannya dan dinyatakan bebas) Wartawan 1: "Pak Gunawan, apa komentar bapak tentang penangkapan yang viral itu? " Wartawan 2: "Bagaimana status tersangka pak? Apakah sudah dibuktikan bersalah? kalau tidak dibuktikan bersalah konsekuensinya apa pak?" Wartawan 3: "Masyarakat mulai resah pak, polisi seharusnya melindungi kita. Kalo orang bisa dengan dipukuli tanpa bukti, kami minta perlindungan sama siapa lagi pak?"
Denotasi	Scene menampilkan Ito yang dinyatakan bebas dan melewati kerumunan wartawan yang mengkonfrontasi Jaka dan Gunawan.
Konotasi	Ito yang berjalan bebas melewati kerumunan secara konotatif dipahami publik sebagai kegagalan telak proses hukum tersangka yang diyakini bersalah lolos bukan karena tidak bersalah melainkan karena proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah aparat melanggar prosedur meskipun dengan niat menegakkan kebenaran hasilnya justru membebaskan pelaku dan merugikan korban, secara budaya sistem hukum Indonesia lebih sering gagal melindungi rakyat daripada berhasil menegakkan keadilan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.21 Episode 8 scene menit ke 20.15-20.45

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Yeremia: "Mengungkap kasus korupsi itu juga banyak menyelamatkan banyak orang sekar. Jelas-jelas buktinya dimana-mana, tapi kamu malah mikirin pembunuh yang ga jelas nyarinya dari mana. Ya saya pikir kamu ga senaif itu" Sekar: "Maksud bapak apa ya?" Yeremia: "Kita sama-sama tau sekar.. politisi-politisi itu tidak ada yang bersih dan saya hanya memastikan mereka bertanggung jawab apa yang mereka lakukan itu aja"
Denotasi	Yeremia memberitahu Sekar bahwa para politisi itu kotor/korup, dan tugasnya adalah memastikan mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.
Konotasi	Hukum negara hanyalah formalitas belaka yang tidak mampu menyentuh aktor kekuasaan. Ia secara tersirat menunjukkan bahwa keadilan sejati justru sedang diupayakan di belakang layar, di luar ruang sidang.
Mitos	sistem keadilan formal sudah terlalu busuk hingga aparat penegak hukum seperti JPU (Yeremia) sendiri pun harus menggunakan cara-cara yang tidak prosedural demi mencapai keadilan substantif.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.22 Episode 9 scene menit ke 02.45-03.25

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Tim Jaka sedang melihat Elias melakukan investigasi melalui Laptop canggih Haidar: "Terdakwa Omar dibebaskan dari tuduhan penyebaran video asusila karena kurangnya barang bukti..? bangsat ngehe banget ini hakim" Sekar: "Tapi aneh, disini nama pelapor nya sama korbannya nggak ada" Jaka: "ini ada kemungkinan pak Aziz menutupi kasus. Coba cek di galeri kemungkinan wajah-wajah yang punya background berani bawa anak gubernur ke persidangan"
Denotasi	Omar (anak gubernur) dengan dalih kurangnya alat bukti, bersamaan dengan temuan Jaka bahwa data identitas pelapor telah dihilangkan dari sistem administrasi pengadilan.
Konotasi	Ruang pengadilan tidak lagi direpresentasikan sebagai institusi pencari kebenaran materiel, melainkan sebagai instrumen formalitas untuk melegitimasi impunitas (kekebalan hukum) kaum elit.
Mitos	Sistem peradilan secara inheren ter subordinasi oleh hierarki kekuasaan dan kapital. Media mengkonstruksi cara berpikir bahwa "hukum tumpul ke atas" adalah sebuah kewajaran sosial (<i>common sense</i>) atau realitas empiris yang lumrah terjadi, alih-alih memposisikannya sebagai suatu kecacatan sistemik yang harus direkonstruksi.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.23 Episode 9 scene menit ke 17.50-18.05

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Bu Dewi (Istrinya Yeremia) : "Saya udah ga percaya lagi sama polisi. Semua polisi yang dateng kesini bilangnya mau bantu, tapi kenyataanya.. pelaku penyebaran video asusila anak saya itu masih berkeliaran bebas. Jadi lebih baik bapak pulang"
Denotasi	Bu Dewi, yang berstatus sebagai istri dari seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU), secara eksplisit menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian dan mengusir mereka dari kediamannya akibat lambatnya penangkapan pelaku.
Konotasi	Penolakan terhadap aparat penegak hukum yang diinisiasi oleh individu dari lingkaran internal sistem peradilan (keluarga JPU) yang merepresentasikan disfungsi dan krisis legitimasi institusi secara absolut.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah ketidakpercayaan terhadap aparaturnegara merupakan sebuah keniscayaan. Kekecewaan struktural dibingkai sebagai <i>common sense</i> , sehingga secara tidak langsung menormalisasi hancurnya kredibilitas sistem hukum di mata publik.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.24 Episode 9 scene menit ke 33.50-34.48

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka melepaskan GPS kaki ketiga narapidana Jaka: "Ini kesempatan kalian buat kabur. Kalian bebas" Haidar: "Maksudnya? terus Jaksa tai itu bagaimana pak?" Elias: "Kan mba sekar masihh.." Jaka: "Bukan urusan kamu! sekar bukan lagi urusan kalian.. itu urusan saya" Anton: "Jak, kita satu tim.. lu ga mungkin ngadepin mereka sendirian" Jaka: "Kamu pikir kamu pahlawan ton? iya? kalian bertiga cuman alat! alat buat saya! dari awal saya udah ingetin kalian nggak ada perjanjian bersyarat. Itu janji omong kosong saya! kalian mau tau kenapa saya ngomong seperti itu? supaya kalian mau membantu cari pembunuh anak saya! kalian lihat orang didekat saya? hancur! mati semuanya!"
Denotasi	Jaka secara sepihak melepaskan perangkat pelacak GPS dari para narapidana dan mendeklarasikan bahwa misi resmi kepolisian tersebut merupakan rekayasa belaka untuk mengeksploitasi mereka demi kepentingan pencarian pembunuh anaknya.
Konotasi	Atribut dan prosedur kepolisian direpresentasikan bukan sebagai instrumen pelayanan publik, melainkan terdegradasi maknanya menjadi fasilitas privat yang dikendalikan untuk memfasilitasi ambisi dan vendeta (dendam) personal aparaturnegara.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah kode etik oleh polisi sebagai tindakan yang rasional atau manusiawi apabila didasari oleh motif traumatis personal. Eksploitatif di dalam tubuh institusi penegak hukum dibentuk agar terlihat lumrah, sehingga mengaburkan batas antara kejahatan jabatan (white-collar crime) dan justifikasi psikologis pelakunya

Tabel 4.25 Episode 10 *scene* menit ke 20.30-21.22

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Yeremia: "Ya terus siapa dong? Pak Nurdin...? Pak Mukhtar...? Atau Sari? Justru mereka semua yang bikin gua jadi engga bisa ketemu anak gua sendiri. Mereka semua dibayar sama gubernur ga becus itu, demi menutupi kelakuan bocah ini (Omar)" Kemudian scene menceritakan <i>flashback</i> persidangan Omar kasus penyebaran video asusila Vanessa (anaknya Yeremia) Bu Sari: "Kami ingin mengajukan permohonan.." Yeremia: "Pak Nurdin, dia yang udah ngilangin <i>footage</i> CCTV Hotel tempat anak gua dan bocah ini melakukan. Sari, yang jadi pengacara bocah ini (Omar), lu tau sendirikan <i>track recordnya</i> seperti apa. Pak Muhtar jadi hakimnya. Mereka semua itu seharusnya orang-orang yang menegakkan hukum jakk, tapi justru hukum bisa dibeli orang tai kaya begini!"
Denotasi	Melalui adegan kilas balik, Yeremia mengungkap kecurangan dalam sidang Omar. Aparat penegak hukum terbukti menerima suap dari pihak Gubernur untuk menghilangkan bukti CCTV agar Omar divonis bebas.
Konotasi	Ruang sidang tidak lagi dimaknai sebagai tempat mencari kebenaran, melainkan berubah fungsi menjadi panggung transaksional yang melindungi kaum elit dari jerat hukum.
Mitos	Korupsi yang dilakukan aparat tidak lagi digambarkan sebagai penyimpangan oknum, melainkan dinormalisasi sebagai kenyataan sistemik yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.2.2 Ketidakadilan Struktural

Ketidakadilan struktural terjadi ketika sistem hukum mencerminkan dominasi struktur sosial yang timpang. Boaventura de Sousa Santos menjelaskan bahwa sistem hukum modern seringkali mendominasi dan menyingkirkan kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara kelompok yang berkuasa justru terlindungi oleh mekanisme yang sama. Ketidakadilan struktural dalam serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia direpresentasikan dalam Episode 1,2,3,6, dan 7 di mana sistem hukum secara aktif melindungi kelompok elite dari jangkauan investigasi, sementara tim yang bekerja di luar prosedur justru lebih berhasil mendekati kebenaran. Representasi ketidakadilan struktural dalam episode ini digambarkan dalam *scene* berikut:

Tabel 4.26 Episode 1 *scene* menit ke 22.15–23.13

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: <i>"Kalah sidang lagi... sama Bu Sari."</i> Yeremia: <i>"Gara-gara pengacara seperti dia, kita makin susah masukin penjahat ke penjara. Walaupun berhasil... ya paling hukumannya ringan."</i> Jaka: <i>"Kita... soal kasus Ferry, kita masih bisa ajukan banding lagi nggak?"</i> Yeremia: <i>"Udah seumur hidup, Pak. Mau diapain lagi?"</i> Suasana audio hening dengan hanya suara langkah kaki bergema di lorong yang kosong, menciptakan kesan kekalahan yang sunyi.
Denotasi	Scene menampilkan Jaka dan Yeremia yang berdiri di lorong pengadilan setelah persidangan Ferry selesai. Yeremia menyatakan frustrasinya bahwa kehadiran pengacara seperti Sari membuat proses memasukkan penjahat ke penjara semakin sulit, dan walaupun berhasil, hukumannya hanya akan

	ringan. Jaka merespons dengan nada pasrah bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan.
Konotasi	Pernyataan Yeremia " <i>gara-gara pengacara seperti dia</i> " secara konotatif merepresentasikan kesadaran institusional bahwa sistem hukum formal secara struktural tidak mampu bersaing dengan kekuatan representasi legal yang dimiliki oleh kelompok elite.
Mitos	Mitos yang dibangun pada <i>scene</i> ini menormalisasi pandangan bahwa pengacara mahal adalah instrumen struktural yang secara konsisten menguntungkan kelompok kekuasaan dan memperlemah kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara adil.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.27 Episode 1 *scene* menit ke 24.40-25.00

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Siapa kamu? Kamu..yang bunuh hakim Muhtar? hahh!? ngaku!! Pembunuh bayaran: "Saya cuma disuruh buat bunuh lo doang bang" Jaka: "Lalu siapa yang bunuh kamu?" Pembunuh bayaran: "Bang Ferry"
Denotasi	Scene menampilkan Jaka yang menginterogasi pembunuh bayaran dan berhasil mendapatkan pengakuan bahwa ia hanyalah pelaksana perintah. Pembunuh bayaran mengungkapkan bahwa Ferry adalah orang yang menyuruhnya membunuh Jaka. Terungkap ada tingkatan kekuasaan di balik rangkaian pembunuhan yang terjadi.

Konotasi	Secara umum seseorang yang hanya berperan sebagai pelaksana perintah dalam jaringan kejahatan secara umum diasosiasikan dengan individu yang berada di lapisan paling bawah dari struktur kekuasaan.
Mitos	Mitos membangun persepsi struktur sosial yang timpang di mana kelompok lemah selalu menjadi korban dan alat dari kelompok berkuasa adalah kondisi yang sudah melekat dan sulit diubah dalam sistem hukum yang ada

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.28 Episode 2 scene menit ke 03.28-03.35

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Elias: "ehh.. mba mba.. saya janji ga ke mana-mana kok" Sekar: "ngga usah aneh-aneh!"
Denotasi	Scene menampilkan Elias yang memohon kepada Sekar agar tidak diperlakukan berlebihan dengan menjanjikan tidak akan melarikan diri. Sekar merespons dengan tegas menolak permintaan tersebut dan memperingatkan Elias untuk tidak bertindak.
Konotasi	Respons tegas Sekar " <i>nggak usah aneh-aneh</i> " mempresentasikan narapidana tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau menyuarakan hak sistem secara struktural menempatkan mereka sebagai objek yang harus dikendalikan, bukan subjek hukum yang memiliki hak dasar.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah menormalisasi pandangan bahwa kelompok marginal dalam narapidana selalu berada dalam posisi subordinat yang tidak dapat keluar dari stigma sosialnya, bahkan ketika sistem sendiri yang membutuhkan mereka.

Tabel 4.29 Episode 3 scene menit ke 04.45-05.15

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Elias: <i>"Pak.... pak Jaka ada berita Nurdin"</i> Suara berita dari laptop: <i>"Kami segenap jajaran institusi kepolisian turut mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Jenderal Nurdin saat sedang bertugas. Berdasarkan pemeriksaan beliau memang memiliki riwayat penyakit berat"</i>
Denotasi	Scene menampilkan Elias yang menemukan berita resmi tentang kematian Jenderal Nurdin. Institusi kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Nurdin meninggal karena riwayat penyakit berat saat bertugas. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran berita sebagai narasi resmi yang bersifat publik.
Konotasi	Secara umum, pernyataan resmi institusi yang menutup kasus kematian pejabat dengan alasan penyakit tanpa investigasi terbuka secara umum diasosiasikan dengan upaya melindungi pihak-pihak berkuasa dari pertanggungjawaban hukum.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah pernyataan resmi dari lembaga negara lebih dipercaya publik daripada fakta yang sesungguhnya sehingga penonton menerima sebagai hal yang wajar bahwa kelompok elite selalu terlindungi oleh narasi institusional yang dirancang untuk menutup kebenaran.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.30 Episode 3 scene menit ke 08.50 – 09.40

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Maksudnya apa pak? Pak Nurdin kan mati karena dibunuh bukan karena sakit" Gunawan: "Saya tahu, kamu pasti kaget.. tapi situasi kita lagi sulit Jak. Kasus ini sudah sampai ke Pak Aziz (gubernur), tadi tekanan dari berbagai sisi. Kalo kita gegabah tim kita terancam.. kamu, Sekar, dan para narapidana tidak boleh ketahuan kepada publik sebelum kita temuin pelakunya" Jaka: "Terus saya bisa dapetin apa kalo ga dikasih izin investigasi langsung ke TKP?" Gunawan: "Prioritas kamu adalah supaya tim kita tidak ketahuan. Kita mulai investigasi kalo berita sudah beredar. Saya akan bantu kirim laporan ke kasus untuk membantu penyelidikan kamu"
Denotasi	Scene menampilkan percakapan antara Jaka dan Gunawan mengenai kematian Nurdin. Gunawan mengakui bahwa Nurdin dibunuh, namun meminta Jaka untuk tidak bergerak gegabah karena kasus telah menyentuh kepentingan Pak Aziz, seorang calon gubernur. Jaka tidak diberi izin untuk melakukan investigasi langsung ke TKP dan diminta menunggu hingga berita beredar terlebih dahulu.
Konotasi	Penyebutan nama Pak Aziz sebagai calon gubernur secara konotatif merepresentasikan kekuasaan politik berada di atas kewenangan hukum investigasi dihentikan bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena pelaku terhubung dengan jaringan kekuasaan yang lebih besar. Instruksi Gunawan kepada Jaka untuk menunggu dan tidak bertindak langsung mengindikasikan prosedur hukum dimanipulasi demi melindungi kepentingan elite politik.

Mitos	Mitos yang dibangun adalah bahwa hukum di Indonesia secara struktural tunduk pada kekuasaan politik. Film serial ini menormalisasi pandangan bahwa seorang aparat yang jujur pun tidak bisa bergerak bebas ketika kasusnya menyentuh kepentingan elite sistem tidak hanya gagal menegakkan keadilan, tetapi secara aktif menghalanginya.
-------	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.31 Episode 6 *scene* menit ke 04.40-05.18

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Kamu ga sebersih yang kamu kira" Ito: "Kalo saya ga bersih pasti saya udah di penjara pak Jaka. Pak Jaka, dengan membawa kesini bukan kami bersih saya harap ini pujian bagi saya. Pak Jaka ga punya bukti satupun yang mengarah ke saya kan?" Jaka: "Tau saya kamu congkak seperti ini" Ito: "Terus rencana bapak apa? mau gebukin saya sampai saya ngaku?" Jaka: "Yang pasti saya akan bikin membayar semua tindakan yang kamu buat, supaya kamu tau.. NYAWA ORANG BUKAN MAINAN!!"
Denotasi	Scene menampilkan Ito yang menantang Jaka dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Ito merasa terlindungi karena mengetahui kelemahan sistem hukum yang tidak bisa menjangkaunya tanpa bukti formal.
Konotasi	Tersangka yang berani menantang aparat karena tahu dirinya tidak bisa dijerat hukum secara umum diasosiasikan dengan seseorang yang terlindungi oleh struktur kekuasaan. Secara konotatif kelompok berkuasa

	memiliki akses terhadap perlindungan struktural yang tidak dimiliki oleh warga biasa.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah hukum hanya efektif menjerat kelompok lemah sementara kelompok berkuasa selalu memiliki celah untuk lolos sehingga menerima sebagai hal yang wajar bahwa sistem hukum tidak pernah benar-benar setara dalam penerapannya.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.32 Episode 7 *scene* menit ke 34.10-34.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar: "Izin pak, Sari, Nurdin, dan Mokhtar mereka menerima uang miliaran di tanggal dan di waktu yang sama. Beda perusahaan, tapi selalu berbarengan dan ternyata semua perusahaan itu atas nama Pak Ahmad Aziz pak" Jaka: "Ahmad Aziz... gubernur?" Sekar: "Iya, saya sudah ketemu sama dia, saya udah buka kartu AS-nya, sampai akhirnya dia mau ketemu langsung dan bicara empat mata sama saya"
Denotasi	Scene menampilkan Sekar yang melaporkan temuan data keuangan kepada Jaka dan tim. Sekar mengungkapkan bahwa Sari, Nurdin, dan Mokhtar secara konsisten menerima transfer uang miliaran pada tanggal dan waktu yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang semuanya terdaftar atas nama Ahmad Aziz gubernur.
Konotasi	Secara konotatif merepresentasikan bahwa jaringan korupsi ini bukan kejahatan spontan melainkan sistem yang dirancang dengan cermat untuk menyamarkan aliran dana ilegal

Mitos	Mitos yang dibangun adalah bahwa korupsi di Indonesia beroperasi melalui jaringan bisnis yang terstruktur dan terhubung langsung dengan kekuasaan politik seseorang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah adalah bagian dari jaringan kejahatan yang sama yang seharusnya ia berantas.
-------	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.2.3 Ketidakadilan Substantif

Ketidakadilan substantif terjadi apabila substansi hukum tidak menjamin kebebasan dasar yang setara bagi semua orang. Teori keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ketika hukum ada secara formal tetapi tidak hadir secara fungsional bagi korban, maka keadilan substantif telah gagal. Ketidakadilan substantif dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia direpresentasikan dalam Episode 2,4,5, dan 6 di mana hukum formal terbukti tidak mampu melindungi korban kejahatan, sehingga mendorong tim untuk melanggar batas prosedur demi keadilan yang nyata. Representasi ketidakadilan substantif dalam episode ini digambarkan dalam scene berikut:

Tabel 4.33 Episode 2 scene menit ke 00.46-00.55

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Anton : "ini serius nih gua bebas!?"
Denotasi	Scene menampilkan Anton yang baru saja dikeluarkan dari penjara dan melepas pakaian tahanannya. Ia mempertanyakan secara langsung apakah

	kebebasannya bersifat nyata dan resmi, menunjukkan ketidakpastian tentang status hukumnya.
Konotasi	Pertanyaan Anton " <i>ini serius nih gua bebas!?</i> " secara konotatif merepresentasikan bahwa kebebasan yang diterima Anton bukan merupakan hak yang diberikan oleh sistem hukum secara resmi, melainkan sebuah kondisi sementara yang tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, ketidakpastian ini mengindikasikan substansi hukum gagal memberikan kejelasan dan kepastian hak dasar kepada individu yang berada dalam program kerja sama dengan negara.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah bahwa kebebasan dalam sistem hukum Indonesia tidak selalu merupakan hak yang dijamin secara substantif, melainkan sesuatu yang bisa diberikan dan dicabut kembali oleh negara sesuai kepentingannya.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.34 Episode 4 scene menit ke 04.55-05.30

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Bagaimana saya tau kamu ga bakal kabur?" Haidar: "Ya ga bisa. Sama kaya saya ga bisa pastiin bapak lepasin kita setelah ini, saya ga tau alasan bapak ngelakuin ini..tapi saya yakin itu penting. Saya juga yakin bapak juga tau kalo cuman saya yang bisa bantu bapak untuk dapetin apa yang bapak mau"

Denotasi	Scene menampilkan percakapan antara Jaka dan Haidar mengenai kepercayaan dan kepastian nasib setelah misi selesai. Jaka mempertanyakan kemungkinan Haidar melarikan diri. Haidar merespons dengan membalik pertanyaan dan ia pun tidak bisa memastikan bahwa Jaka akan membebaskan mereka setelah misi berakhir, namun tetap meyakini bahwa kerjasamanya dibutuhkan.
Konotasi	Pernyataan Haidar <i>"saya ga bisa pastiin bapak lepasin kita setelah ini"</i> secara konotatif dipahami publik sebagai gambaran bahwa narapidana yang bekerja sama dengan sistem tidak memiliki kepastian hukum atas hak kebebasan mereka
Mitos	Mitos yang dibangun adalah narapidana tidak berhak mendapat kepastian dan perlindungan yang setara meskipun mereka sudah memenuhi kewajiban yang diminta negara. Media membangun persepsi ketidakpastian nasib narapidana yang bekerja sama dengan aparat adalah hal yang wajar terjadi.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.35 Episode 5 scene menit ke 09.50-10.40

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: <i>"Aahh itu keluar kendali saya, saya bantu sampaikan ke atasan setelah itu..."</i> Sekar: <i>"Jadi mereka belum tentu bebas seperti apa bapak janjikan? Lucu.. Pak Jaka lho yang minta saya untuk mengikuti jejak almarhum ayah saya, sebagai seorang pengkhianat. Sekarang siapa yang pengkhianat?"</i> Jaka: <i>"Ya mungkin saya seperti ayah kamu. Ya ga masalah, yang penting saya bisa nebus semua masalah saya. Kalo memang dengan itu kamu"</i>

Denotasi	<i>Scene</i> menampilkan perdebatan antara Jaka dan Sekar mengenai janji pembebasan bersyarat yang diberikan kepada tiga narapidana. Jaka mengakui bahwa realisasi janji tersebut berada di luar kendalinya dan harus menunggu persetujuan atasan. Sekar menyindir Jaka dengan menyebutnya pengkhianat sama seperti almarhum ayahnya karena tidak bisa memenuhi janjinya kepada narapidana yang sudah bekerja sama.
Konotasi	Secara konotatif merepresentasikan aparat di lapangan tidak memiliki kewenangan nyata untuk memenuhi janji sendiri sistem tingkatan institusional menghalangi realisasi keadilan yang sudah dijanjikan.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah janji negara kepada warganya termasuk kepada mereka yang sudah berkorban untuk sistem tidak memiliki kekuatan hukum yang nyata. Hukum secara substantif gagal melindungi hak-hak dasar bahkan bagi mereka yang sudah memenuhi kewajibannya..

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.36 Episode 6 *scene* menit ke 13.17-13.42

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jenderal Gunawan: "Waktu operasi sudah berakhir. Ini terlalu riskan dan mereka seharusnya kembali ke penjara" Jaka: "Anton, Haidar, Elias udah kerja keras untuk tim kita pak, mereka seharusnya dapat keringan bukan dibalikin ke penjara" Jenderal Gunawan: "EMANG GA ADA DASARNYA DARI AWAL! kenapa sekarang jadi penting? hah!?. JAKA! memang kamu diskors tapi kamu polisi"

Denotasi	<i>Scene</i> menampilkan Jaka yang memperjuangkan keringanan hukuman bagi Anton, Haidar, dan Elias atas kontribusi mereka dalam operasi. Gunawan menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa operasi tidak memiliki dasar resmi sejak awal sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan keringanan apapun kepada ketiga narapidana tersebut.
Konotasi	Penolakan Gunawan dengan alasan " <i>emang ga ada dasarnya dari awal</i> " secara konotatif dipahami publik sebagai pengakuan bahwa negara menggunakan narapidana sebagai alat tanpa memberikan jaminan hak yang setara sebagai imbalannya.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah janji keringanan hukuman kepada narapidana adalah sesuatu yang tidak perlu ditepati karena dari awal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.2.4 Ketidakadilan Sistemik

Ketidakadilan sistemik merujuk pada ketimpangan yang sudah melekat dalam struktur dan institusi hukum itu sendiri. Santos menyebut hal ini sebagai bentuk dominasi epistemik ketika sistem hukum formal dikendalikan oleh jaringan kepentingan yang terorganisir dan melindungi dirinya sendiri dari upaya reformasi. Ketidakadilan sistemik bukan lagi soal oknum, melainkan soal arsitektur kekuasaan yang bekerja secara kolektif untuk mempertahankan status quo. Ketidakadilan sistemik dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia direpresentasikan dalam Episode 1,2,3,4, dan 7 di mana konspirasi jaringan kekuasaan terungkap dan memperlihatkan bahwa institusi hukum telah disusupi dan dikendalikan dari dalam. Representasi ketidakadilan sistemik dalam episode ini digambarkan dalam scene berikut:

Tabel 4.37 Episode 1 scene menit ke 13.40–13.51

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Wartawan: “Tapi bapak punya catatan gagal pak, bapak gagal menangkap pembunuhan berantai 20 tahun lalu. Lalu bisa mengungkap identitasnya setelah 3 tahun setelah dia meninggal.”
Denotasi	Scene menampilkan wartawan yang mengkonfrontasi Jaka dengan catatan kegagalan institusi kepolisian dalam menangkap pelaku pembunuhan berantai selama 20 tahun.
Konotasi	Secara umum kegagalan institusi kepolisian selama 20 tahun dalam menangkap satu pelaku kejahatan diasosiasikan dengan disfungsi sistemik yang jauh melampaui kesalahan individual.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah kegagalan berulang institusi hukum dalam menangani kejahatan serius adalah kondisi yang sudah biasa dan dapat diterima dalam sistem peradilan Indonesia. Media membangun persepsi ketidakmampuan institusi kepolisian untuk menyelesaikan kasus besar dalam jangka waktu yang wajar adalah bagian dari realitas sistem yang tidak perlu dipertanyakan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.38 Episode 2 scene menit ke 10.33-10.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Operasi ini rahasia, jangan harap kalian akan dapat bantuan dari polisi lain. Berdasarkan temuan polisi terakhir, kita kekurangan temuan yang substansial" (Sambil memberikan fasilitas laptop kepada Elias)
Denotasi	Scene menampilkan Jaka menegaskan bahwa operasi ini bersifat rahasia dan tim tidak akan mendapat bantuan dari unit kepolisian lain. Jaka juga mengakui bahwa temuan polisi reguler selama ini tidak cukup substansial untuk melanjutkan kasus.
Konotasi	Dalam pemahaman umum masyarakat, sebuah operasi kepolisian yang sah seharusnya memiliki koordinasi antar unit, transparansi internal, dan mekanisme pengawasan institusional.
Mitos	Film serial ini menormalisasi cara berpikir bahwa operasi hukum yang efektif harus dilakukan secara rahasia dan terpisah dari sistem resmi. Media membangun persepsi bahwa institusi hukum formal yang transparan justru tidak efektif, sehingga penonton menerima sebagai hal yang wajar bahwa keberhasilan penegakan hukum hanya bisa dicapai di luar pengawasan publik dan di luar koordinasi institusional yang resmi.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.39 Episode 2 *scene* menit ke 31.00-31.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jenderal Gunawan: "Ngomong-ngomong, gimana pendapat pak Jenderal terhadap kasus pak Muhtar?" Jenderal Nurdin: "Tragis, tragiss.. tragis.., tapi saya tidak tahu banyak tentang itu" Jenderal Gunawan: "Tumben lho, biasanya pak Jendral tu ngeliat hal-hal detail yang tidak dilihat orang lain lho. Iyakan pak?" Jenderal Nurdin: "Gun, itukan hanya kata orang. Saya harap tim bentukan kamu bisa segera menangkap biang kerok. Hati-hati aja kamu"
Denotasi	<i>Scene</i> menampilkan pertemuan informal antara dua jenderal kepolisian di ruangan mewah. Gunawan menanyakan pendapat Nurdin tentang kasus kematian Hakim Muhtar. Nurdin menyatakan tidak mengetahui banyak tentang kasus tersebut meskipun Gunawan menyindir bahwa Nurdin biasanya memperhatikan hal-hal detail.
Konotasi	Pernyataan Nurdin " <i>saya tidak tahu banyak tentang itu</i> " di tengah sindirian Gunawan bahwa Nurdin biasanya sangat detail secara konotatif dipahami publik sebagai pengingkaran yang disengaja bukan ketidaktahuan yang sesungguhnya.
Mitos	<i>Scene</i> ini menunjukkan keputusan-keputusan penting dalam sistem hukum tidak dibuat di ruang resmi yang transparan, melainkan melalui pertemuan informal antar pejabat tinggi yang saling melindungi kepentingan masing-masing.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

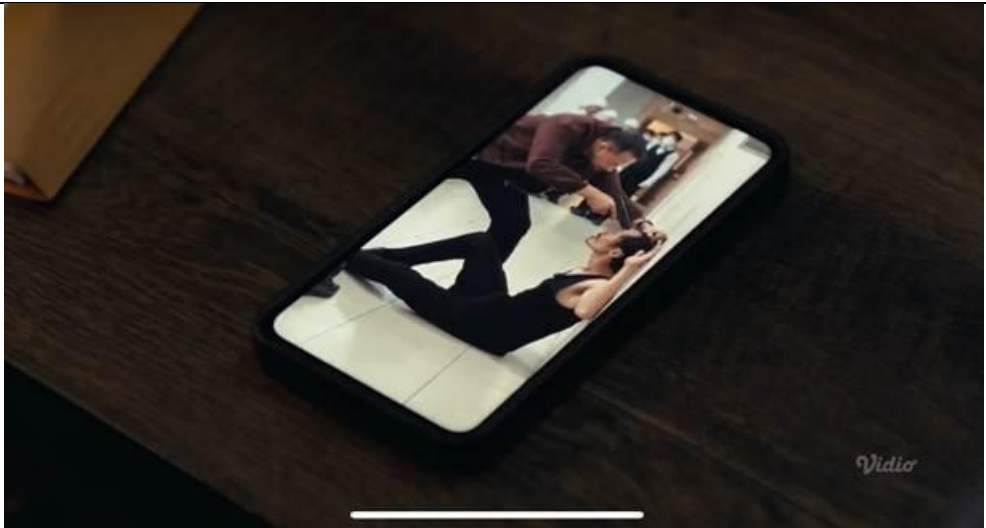
Tabel 4.40 Episode 3 scene menit ke 07.25-07.59

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Yaa.. kalo menimbang belakangan ini saya juga gak yakin beliau meninggal karena sakit pak" Yeremia: "Maksud pak Jaka, ada pihak yang sengaja memanipulasi info kematian pak Nurdin.. siapa? terus buat apa? kita tetep harus hati-hati pak. Dalam situasi seperti ini menurut saya ga semua orang bisa kita percaya begitu saja.. jangan sampai nasib kita seperti pak Nurdin.. pak Muhtar"
Denotasi	Scene menampilkan percakapan antara Jaka dan Yeremia yang mempertanyakan kebenaran narasi resmi kematian Jenderal Nurdin. Yeremia menyatakan kecurigaan bahwa ada pihak yang sengaja memanipulasi informasi kematian Nurdin dan mengingatkan Jaka untuk tidak sembarangan mempercayai orang termasuk di dalam institusi mereka sendiri.
Konotasi	Aparat yang tidak bisa mempercayai rekan satu institusinya sendiri secara umum diasosiasikan dengan kondisi institusi yang sudah mengalami kerusakan dari dalam. Penyebutan nama Nurdin dan Muhtar sebagai contoh nasib buruk secara konotatif dipahami publik sebagai tanda bahwa ketidakadilan ini bukan kejadian tunggal melainkan pola berulang yang sudah melekat dalam sistem siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran berpotensi menjadi korban berikutnya.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah ketidakpercayaan antar aparat dalam satu institusi hukum adalah kondisi yang wajar terjadi ketika sistem sudah dikompromikan oleh kepentingan kekuasaan. Media membangun persepsi bahwa bahaya terbesar bagi penegak hukum yang jujur bukan datang dari penjahat di luar, melainkan dari dalam institusi mereka sendiri

Tabel 4.41 Episode 4 scene menit ke 36.50-37.10

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Telepon berdering dan Chandra mengangkat telepon dari bu Sari Chandra: "Bu Sari..." Bu Sari: "Pak Chandra, ada yang mau saya bicarakan soal kerjasama kita kedepan" Chandra: "Saya juga bu, posisi kita sedang tidak aman sejak pak Nurdin.." Bu Sari: "Jangan bahas disini.. terutama tentang eee teman lama kita. Besok bisa ketemu?" Chandra: "Bisa"
Denotasi	Scene menampilkan percakapan telepon antara Bu Sari seorang pengacara dan juga Chandra seorang bos kartel. Keduanya membicarakan kelanjutan kerja sama mereka setelah posisi mereka terasa tidak aman pasca kematian Jenderal Nurdin. Bu Sari meminta agar pembicaraan sensitif tidak dilakukan melalui telepon.
Konotasi	Seorang pengacara yang berkomunikasi secara rahasia dengan bos kartel untuk membicarakan kerja sama secara umum diasosiasikan dengan praktik kolusi antara penegak hukum dan pelaku kejahatan. Frasa Bu Sari "<i>jangan bahas disini.. terutama tentang teman lama kita</i>" secara konotatif dipahami publik sebagai indikasi jaringan kepentingan tersembunyi yang sudah lama terjalin antara institusi hukum formal dan dunia kriminal.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah kerja sama rahasia antara pengacara dan pelaku kejahatan terorganisir adalah bagian dari cara sistem hukum sesungguhnya beroperasi di balik layar dan institusi hukum formal tidak pernah benar-benar terpisah dari jaringan kepentingan kriminal yang seharusnya ia berantas.

Tabel 4.42 Episode 7 *scene* menit ke 04.25-05.06.00

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Yeremia: "Terus terang Pak Jenderal, saya tidak bisa proses kasus ini. Pak Jenderal nugasin penyidik utama yang lagi di skors untuk menyelidiki kasus ini... silahkan pak" (menunjukkan video Jaka menodong pistol ke Ito) "Video itu udah tersebar di mana-mana. Jadi kita tidak bisa bawa kasus ini ke pengadilan. Jadi apa? Jadi becandaan sistem peradilan kita kalau seperti itu pak" Gunawan: "Tapi ini demi melakukan tugas pak" Yeremia: "Kita semua ingin kasus ini selesai, tapi keberadaan Pak Jaka dalam kasus ini adalah liabilitas besar dalam hukum" Gunawan: "Pak Yeremia, kita sesama penegak hukum yang sama-sama menggunakan nurani, kita sama-sama tau mana yang bener kan ya pak?"
Denotasi	<i>Scene</i> ini menyatakan kasus tidak bisa dibawa ke pengadilan karena penyidik utamanya Jaka sedang dalam status skors. Yeremia memberi ultimatum kepada Gunawan untuk segera menemukan bukti konkrit atau Ito akan dibebaskan.
Konotasi	Pertemuan tertutup antara Yeremia dan Gunawan secara konotatif merepresentasikan keputusan-keputusan penting dalam sistem hukum tidak dibuat di ruang sidang yang transparan, melainkan melalui negosiasi informal antar pejabat. Frasa Yeremia "<i>jadi becandaan sistem peradilan kita</i>" secara umum adalah sistem sendiri menyadari kerapuhannya namun lebih memilih untuk melindungi citra institusi daripada menegakkan kebenaran.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah bahwa sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan kesempurnaan prosedur dan citra institusi daripada kebenaran

Tabel 4.43 Episode 7 *scene* menit ke 27.45-29.35

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar: "Oooohh gitu ya pak, seperti Mokhtar, Nurdin, dan Sari maksudnya pak?" Pak Aziz: "Dek Sekar nanya seperti ini darimana?" Sekar: "Saya dari kepolisian pak" Pak Aziz: "Aaahhh yayaya" Sekar: "Bapak tenang aja, saya cuma mau bicara" Pak Aziz: "Nanti bicaranya sama asisten saya aja ya" " Sekar: "Ini soal 20M pak, saya tau soal pembayaran 20M yang bapak lakukan dan bapak transfer ke rekening mereka dari rekening bapak itu dilakukannya setiap bulan pak. Kira-kira kalau ada skandal ribut-ribut sebelum pilkada gini.. akan repot pak" Pak Aziz: "Hati-hati dek Sekar kalo berasumsi yaa"
Denotasi	Sekar mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya transfer uang sebesar 20 Milyar per bulan dari rekening Pak Aziz ke rekening Mokhtar, Nurdin, dan Sari. Sekar menggunakan informasi tersebut sebagai tekanan agar Pak Aziz mau bekerja sama dengan kepolisian. Pak Aziz merespons dengan hati-hati dan akhirnya setuju untuk berbicara di tempat lain.
Konotasi	Seragam dinas pemerintah yang dikenakan Pak Aziz secara konotatif merepresentasikan bahwa kekuasaan politik formal digunakan sebagai perisai untuk menyembunyikan keterlibatan dalam jaringan kejahatan. Lokasi percakapan di tengah keramaian pasar bukan di kantor resmi menyiratkan bahwa negosiasi antara aparat hukum dan elite politik terjadi di ruang informal, jauh dari transparansi publik. Tekanan Sekar tentang skandal menjelang pilkada mengindikasikan bahwa momentum politik

	dimanfaatkan sebagai alat negosiasi hukum dan politik saling bersilangan dalam satu transaksi informal.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah bahwa jaringan korupsi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari jaringan kekuasaan politik elite yang maju dalam kontestasi demokrasi adalah bagian dari sistem kejahatan yang sama yang ingin diberantas oleh hukum. Pandangan bahwa penegakan hukum terhadap elite terjadi melalui negosiasi dan tekanan informal, bukan melalui proses hukum yang transparan dan formal.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.2.5 Ketidakadilan Simbolik

Ketidakadilan simbolik adalah bentuk ketidakadilan ketika hukum digunakan sebagai alat wacana dominan yang menciptakan ketertundukan. Michel Foucault menyatakan bahwa hukum kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan melalui pembentukan narasi legal yang terlihat netral, padahal menciptakan relasi dominasi dalam masyarakat. Ketidakadilan simbolik dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia direpresentasikan dalam Episode 1,2,3,4,6, dan 9 di mana negara melalui aparatnya secara umum mengakui ketidakmampuannya sendiri dengan merekrut narapidana untuk menjalankan misi yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum formal. Representasi ketidakadilan simbolik dalam episode ini digambarkan dalam scene berikut:

Tabel 4.44 Episode 1 scene menit ke 21.15–22.00

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka dan sekar melakukan investigasi di ruangan Muhtar setelah Muhtar meninggal karena dibunuh oleh pembunuh misterius Sekar: “Dia make pak. Pak hakim Muhtar dibunuh setelah dibalik dari ruang sidang. Tapi jangan-jangan ada kaitannya.” Jaka: “Ternyata sebersih apa yang kita kira”
Denotasi	Scene menampilkan Sekar menemukan bukti bahwa hakim mengonsumsi narkoba dan menduga ada kaitan antara kebiasaan tersebut dengan pembunuhannya. Jaka merespons dengan pernyataan yang mengindikasikan bahwa citra bersih hakim selama ini tidak sesuai dengan kenyataannya.
Konotasi	Penemuan barang bukti narkoba di ruang tersebut secara konotatif dipahami publik sebagai runtuhnya simbol paling sakral dari institusi peradilan tempat yang seharusnya menjadi pusat kebenaran justru menjadi lokasi praktik ilegal.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah institusi hukum yang tampak bersih dan berwibawa di mata publik sesungguhnya menyimpan praktik ilegal yang dinormalisasi di kalangan internal sehingga hal yang wajar bahwa tidak ada institusi hukum yang benar-benar bersih dari kepentingan dan pelanggaran.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.45 Episode 2 *scene* menit ke 07.01-07.20

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka memakai sengatan listrik kepada narapidana Jaka: "bikin susah! kalian"
Denotasi	<i>Scene</i> menampilkan Jaka yang menggunakan sengatan listrik kepada narapidana sambil mengucapkan kekesalannya. Tindakan kekerasan fisik ini dilakukan oleh aparat terhadap tahanan yang dianggap tidak kooperatif, tanpa ada mekanisme pengawasan atau saksi resmi yang hadir.
Konotasi	Sengatan listrik yang digunakan Jaka secara konotatif merepresentasikan bahwa hukum dalam praktiknya digunakan sebagai alat untuk aparat memiliki kewenangan penuh atas tubuh narapidana tanpa batas moral maupun hukum yang jelas.
Mitos	Dalam perspektif Foucault, sengatan listrik ini adalah wujud paling langsung dari hukum sebagai alat wacana dominan yang menciptakan ketertundukan bukan melalui persuasi atau prosedur, melainkan melalui rasa sakit yang memaksa kepatuhan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.46 Episode 2 *scene* menit ke 08.20-08.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar: "Kami butuh kalian untuk menangkap seorang pembunuh. Selama investigasi ini berjalan kalian wajib menggunakan GPS kaki, cuman pak Jaka dan saya yang boleh melepas."
Denotasi	Scene menampilkan pemasangan GPS tracker di kaki ketiga narapidana sebagai syarat wajib selama operasi berlangsung. Sekar menegaskan bahwa hanya ia dan Jaka yang memiliki otoritas untuk melepas alat tersebut, menunjukkan kontrol penuh aparat atas pergerakan narapidana selama misi berlangsung.
Konotasi	<i>GPS tracker</i> di kaki narapidana secara konotatif merepresentasikan bahwa meskipun narapidana dikeluarkan dari penjara untuk menjalankan misi negara, mereka tetap diperlakukan sebagai objek yang harus diawasi dan dikendalikan secara fisik.
Mitos	<i>GPS tracker</i> ini bentuk modern dari <i>surveillance</i> sebagai instrumen kekuasaan yang menciptakan ketertundukan tanpa memerlukan kekerasan fisik secara langsung cukup dengan kehadiran alat pengawas yang terus-menerus mengingatkan narapidana bahwa mereka tidak pernah benar-benar bebas.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.47 Episode 3 scene menit ke 32.25-32.35

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Tindakan gegabah kamu tu membahayakan TIM! bikin ulah lagi, kau bertemu dengan moncong pistol polisi. Paham!?" Anton: "Sorry jak"
Denotasi	Scene menampilkan Jaka yang menegur Anton secara keras atas tindakan gegabah yang membahayakan tim dengan mengancam akan menggunakan senjata apabila Anton kembali bertindak di luar kendali.
Konotasi	Ancaman senjata dari aparat kepada seseorang yang berada di bawah kendalinya secara umum diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan berlebihan yang melampaui batas prosedur resmi.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah aparat berwenang menggunakan ancaman kekerasan sebagai instrumen kendali terhadap individu yang berada di bawah otoritasnya.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.48 Episode 4 scene menit ke 00.50-01.05

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Tau apa kamu soal Nurdin?" Ipang: "Gak tau pak (gemetar sambil ketakutan)" Jaka menodongkan pistol ke dadanya Ipang Jaka: "Ngomong bangsat.." Ipang: "Chandra" Anton: "Urusannya apa sama Chandra" Ipang: "Chandra yang punya spa"
Denotasi	Scene menampilkan Jaka yang menodongkan pistol langsung ke dada Ipang untuk memaksa keterangan tentang Nurdin. Ipang yang ketakutan dan gemetar akhirnya mengungkapkan nama Chandra sebagai pemilik spa yang terhubung dengan kasus.
Konotasi	pistol yang diarahkan langsung ke tubuh seseorang oleh aparat untuk memaksa keterangan secara umum diasosiasikan dengan interogasi ilegal yang melanggar hak dasar tersangka. Gemetar dan ketakutan Ipang secara konotatif dipahami publik sebagai gambaran ketertundukan total yang diciptakan melalui ancaman kekerasan fisik bukan melalui prosedur hukum yang sah dan bermartabat.
Mitos	Mitos membangun persepsi bahwa memaksa keterangan melalui ancaman kekerasan fisik adalah bagian wajar dari cara kerja penegakan hukum di lapangan sehingga media menerima sebagai hal yang normal bahwa hukum dijalankan melalui dominasi dan ketakutan, bukan melalui prosedur yang menghormati hak dasar setiap individu.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.49 Episode 4 scene menit ke 06.20-06.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar: "Saya yakin ini sangat beresiko pak!" Jaka mengabaikan Sekar, kemudian Haidar memamerkan bahwa GPS di kakinya sudah dilepas Jaka: "Haidar yang akan turun, tapi ga bawa pistol, ga bawa pisau.. semuanya yang saya pegang. Eh! kalo kamu sampe coba kabur... saya ngga akan segan-segan tembak kepalamu"
Denotasi	Scene menampilkan Jaka yang memutuskan menugaskan Haidar untuk turun ke lapangan setelah GPS di kakinya dilepas. Sekar menyatakan keberatan atas risiko keputusan tersebut namun diabaikan oleh Jaka. Jaka menegaskan bahwa Haidar tidak boleh membawa senjata apapun dan mengancam akan menembak kepala Haidar apabila mencoba melarikan diri.
Konotasi	Pengabaian terhadap suara yang mempertanyakan prosedur dalam hal ini Sekar secara umum diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang otoriter dan tidak akuntabel. GPS yang dilepas dari kaki Haidar secara konotatif dipahami publik sebagai simbol bahwa kendali fisik negara atas tubuh narapidana bisa diberikan dan dicabut sewaktu-waktu sesuai kepentingan aparat bukan berdasarkan hak yang dijamin hukum.
Mitos	Aparat memiliki kewenangan penuh untuk mengancam nyawa individu yang berada di bawah kendalinya demi kelancaran operasi yang dianggap penting. Media membangun persepsi bahwa pengabaian terhadap prosedur dan ancaman kekerasan ekstrim dari aparat adalah hal yang dapat diterima selama tujuannya dianggap benar.

Tabel 4.50 Episode 6 *scene* menit ke 07.35-08.23

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar menelepon Jenderal Gunawan dan berbicara ditelepon Jenderal Gunawan: "Sekar" Sekar: "Izin pak. Terduga kasus pembunuhan Muhtar, Siska, Sari dan Nurdin sudah tertangkap, tapi kami masih belum punya bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan kejahatan tersebut." Jenderal Gunawan: "Jaka gimana?" Sekar: "Pak Jaka.. pak Jaka penuh emosi pak" Jenderal Gunawan: "Maksudnya?" Sekar: "Dia memakai kekerasan untuk menarik pengakuan dari terduga" Jenderal Gunawan: "Aduh. Sekar itu tidak bisa dibiarkan terus, kalo orang itu bukan pelakunya dan kekerasan ini terbongkar instansi kita yang jadi taruhannya adalah karir kamu dan saya bukan Jaka dan juga para kriminal itu" Sekar: "Iya siap"
Denotasi	Gunawan merespons bukan dengan mempertanyakan kebenaran atau melindungi hak terduga, melainkan dengan mengkhawatirkan dampak terhadap citra institusi dan karir pribadi mereka.
Konotasi	Kekhawatiran utama Gunawan yang tertuju pada karir dan citra institusi bukan pada kebenaran atau hak terduga secara konotatif dipahami publik sebagai bukti bahwa institusi hukum lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri daripada keadilan yang seharusnya dilayaninya.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah melindungi citra institusi dari skandal adalah prioritas utama pejabat hukum.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.51 Episode 9 scene menit ke 06.07-06.50

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Sekar: "24 Oktober 2023. Atas nama pengadilan untuk sidang kasus penyebaran video asusila, dengan pengacara Sari Manalu dan hakim Muhtar. Betul? JAWAB! " Omar: "Iya, tapi kasus itu.. kasus akal-akalan si jablay. Lagian ya.. saya disitu nggak terbukti deh bersalah" Jaka: "Ya memang anak gubernur teladan seperti kamu ga mungkin masuk penjara, tapi sekarang pertanyaanya orang mana yang berani laporkan kamu ke polisi?"
Denotasi	Omar berargumen menggunakan dokumen vonis hakim untuk mengklaim secara sah bahwa dirinya tidak terbukti bersalah, meskipun Jaka menyadari bahwa hal tersebut merupakan implikasi dari ketakutan publik terhadap status sosialnya.
Konotasi	Lembar putusan pengadilan yang digunakan oleh elit pelaku kejahatan dimaknai oleh masyarakat luas sebagai simbol supremasi kekuasaan atas keadilan.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah media menormalisasi wacana bahwa kebenaran legal-formal terlepas dari kebenaran moral. Mitos bekerja ketika film mengkondisikan khalayak untuk mewajarkan rekayasa putusan pengadilan oleh penguasa sebagai suatu kelumrahan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.2.6 Vigilante Justice

Vigilante justice atau main hakim sendiri berakar dari kondisi di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan institusi hukum formal dalam menegakkan keadilan. Menurut Johnston (1996), vigilantisme adalah tindakan yang direncanakan oleh warga sipil sebagai reaksi terhadap kejahatan atau penyimpangan sosial yang tidak mampu ditangani oleh sistem resmi. Dalam konteks media, *vigilante justice* sering direpresentasikan sebagai bentuk keadilan alternatif yang secara moral dibenarkan meskipun secara hukum melanggar. Mitos *vigilante justice* dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia mencapai puncaknya dalam Episode 1,2,6,7,8, dan 10 dimana tindakan diluar hukum dinormalisasi secara naratif sebagai satu-satunya jalan menuju keadilan yang sesungguhnya. Representasi mitos *vigilante justice* dalam episode ini digambarkan dalam scene berikut:

Tabel 4.52 Episode 1 scene menit ke 36.52–38.03

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: <i>"Yang saya taati itu hukum. Kalo saya ikuti moral saya kamu sudah mati dari kapan tau"</i> Fery: <i>"Mungkin itu yang selalu selangkah di belakang Jak, lo selalu pake alesan hukum dan aturan lo itu supaya lo ga bertindak. Akhirnya lo ga punya nyali.. anak lo dibunuh mati"</i> Jaka kemudian memukul Ferry berkali-kali.
Denotasi	Ferry memprovokasi Jaka dengan menyebut kematian anaknya sebagai akibat dari ketidakberanian Jaka untuk bertindak di luar hukum. Provokasi

	tersebut membuat Jaka kehilangan kendali dan memukul Ferry berkali-kali di luar prosedur interogasi yang resmi.
Konotasi	Seorang aparat yang memukul tersangka dalam interogasi secara umum diasosiasikan dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prosedur hukum yang berlaku.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah aparat yang kehilangan orang yang dicintai akibat kejahatan berhak untuk melampiaskan amarah dan melakukan kekerasan personal terhadap pelaku sebagai bentuk keadilan yang dapat dibenarkan secara moral.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.53 Episode 2 scene menit ke 13.50-14.21

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Anton: "Lu mau kerja sama polisi? hah? lu makan tai! sono" Haidar: "ahh.. makanya kita sama-sama gak suka kan? kenapa engga lu bantu gua, gua bantu lu. Semakin cepet kita keluar dari sini semakin baik yakan?"
Denotasi	<i>Scene</i> menampilkan percakapan antara Anton dan Haidar tanpa kehadiran aparat. Anton secara tegas menolak bekerja sama dengan polisi dan mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap institusi hukum. Haidar merespons dengan mengajak Anton untuk membangun solidaritas sesama narapidana bekerja sama bukan untuk kepentingan polisi, melainkan untuk kepentingan mereka sendiri agar bisa keluar dari situasi ini lebih cepat.

Konotasi	Pernyataan Anton <i>"lu mau kerja sama polisi? lu makan tai!"</i> secara konotatif dipahami publik sebagai ekspresi ketidakpercayaan total terhadap legitimasi institusi hukum sebuah sikap yang lahir dari pengalaman langsung sebagai korban sistem yang tidak adil. Ajakan Haidar <i>"lu bantu gua, gua bantu lu"</i> secara konotatif merepresentasikan pembentukan perjanjian informal di luar sistem solidaritas yang dibangun bukan atas dasar hukum.
Mitos	<i>Scene</i> ini menunjukkan mereka yang pernah diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum berhak untuk membangun tatanan dan solidaritas mereka sendiri di luar sistem tersebut. Media membangun persepsi ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, narapidana memilih untuk bergerak berdasarkan logika dan kepentingan mereka sendiri daripada tunduk pada sistem yang tidak pernah melindungi mereka.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.54 Episode 6 scene menit ke 06.25-07.17

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Tolong jawab satu pertanyaan saya, apa salah anak saya?" Ito: "Setiap hari itu pasti ada orang-orang yang meninggal pak Jaka" Jaka: "BAJINGANN!! JAWAB ANJING!! KENAPA BUNUH ANAKK SAYA" Ito: "Dengar pendapat saya, saya percaya didunia ini selalu ada orang-orang yang ga pantas untuk hidup!" Jaka: "ANJING! (Sambil memukul ito). Kamu pantaskan kamu busuk dipenjara!"
Denotasi	Tergambar Jaka yang menuntut jawaban dari Ito tentang alasan pembunuhan anaknya. Ito merespons dengan pernyataan provokatif bahwa ada orang-orang yang tidak pantas hidup. Provokasi tersebut membuat Jaka

	kehilangan kendali sepenuhnya dan memukul Ito secara brutal di luar prosedur interogasi yang sah.
Konotasi	Secara konotatif pernyataan Ito " <i>selalu ada orang-orang yang ga pantas untuk hidup</i> " yang dibalas dengan kekerasan fisik dapat dipahami publik sebagai benturan antara dua logika keadilan yang sama-sama berada di luar sistem hukum formal merepresentasikan kegagalan total sistem dalam menyediakan mekanisme keadilan yang sah.
Mitos	Tindakan main hakim sendiri adalah respons yang manusiawi dan wajar ketika sistem hukum tidak mampu memberikan jawaban atas penderitaan personal secara budaya menerima sebagai sesuatu yang normal bahwa batas antara penegakan hukum dan <i>vigilante justice</i> menjadi kabur ketika motivasinya adalah kehilangan yang nyata dan mendalam.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.55 Episode 7 *scene* menit ke 08.10-09.10

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "Mantan marinir.. banting stir jadi kaki tangan mafia, perampokan, pembakaran, penculikan sampai dengan pembunuhan berencana. Saya baca semua hal berkas kamu, sampe perempuan ga bersalah" Ito: "Saya sudah bilang pak. Bukan saya" Jaka: "Tapi tetep ada hubungannya sama kamu kan?" arahannya tetap ada ditangan kamu. Okee... saya akan ikuti cara main kamu. Kamu sudah berhasil merampas keluarga saya sekarang giliran saya hancurin keluarga kamu. Mungkin nanti baru terasa kamu baru ngomong"

Denotasi	<i>Scene</i> ini menampilkan Jaka mengancam akan menghancurkan keluarga Ito sebagai balasan atas perampasan keluarganya mengikuti logika Ito dalam menggunakan orang-orang terdekat sebagai instrumen tekanan.
Konotasi	Ancaman Jaka " <i>giliran saya hancurin keluarga kamu</i> " secara konotatif dipahami publik sebagai momen di mana aparat sepenuhnya meninggalkan logika hukum dan mengadopsi logika kriminal sebagai metode penegakan keadilan.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah membalas kejahatan dengan ancaman respons yang dapat dimaklumi ketika institusi hukum terbukti tidak efektif yang menerima sebagai sesuatu yang wajar bahwa batas antara penegak hukum dan vigilante menjadi semakin tipis ketika sistem gagal memberikan keadilan.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.56 Episode 8 *scene* menit ke 32.20-32.55

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Ito: "Maju selangkah saya patahin leher anak ini" Omar: "Pakk... pakk tolong jangan pak, bapak inget kan janji bapak pak (ditujukan ke pak Jaka)" Jaka: "Apa sebenarnya kamu inginkan dari anak ini to?" Ito: "Bukan urusan bapak! ngapain bapak ngabisin energi buat dia? mestinya anak ini harus mati" Jaka: "Bukan kamu yang punya hak nentuin siapa hidup siapa mati!" Ito: "Berisik pak Jaka... tunggu saja. Nanti juga ada kabarnya, bapak bisa nemuin anak ini dimana"

Denotasi	Ito menyandera Omar di parkir bawah tanah yang gelap, mengancam akan membunuhnya, dan menantang Jaka yang mencoba mencegahnya
Konotasi	Parkiran yang gelap menyimbolkan ruang di luar pengawasan hukum negara. Cengkeraman Ito di leher Omar mengkonotasikan kekuatan paksa (<i>coercive power</i>) masyarakat akar rumput yang akhirnya berani menghakimi elit penguasa secara langsung tanpa pengadilan.
Mitos	Pembunuhan di luar hukum (<i>extrajudicial killing</i>) oleh masyarakat sipil dapat dibenarkan ketika sistem hukum negara terlalu lemah untuk menghukum elit.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.57 Episode 10 *scene* menit ke 19.47-20.00

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Jaka: "YEREMIAAAA!!!" Yeremia: "HEYYY. STOPP! Berani maju satu langkah lagi, gua bunuh anak ini" (suara Yeremia memukul Omar) Omar: "AHHHH" (suara Omar kesakitan)
Denotasi	<i>Scene</i> ini menampilkan Jaka yang berteriak memanggil Yeremia, di mana Yeremia merespons dengan melakukan intimidasi bersenjata terhadap Omar serta melakukan penganiayaan fisik hingga Omar berteriak kesakitan.
Konotasi	Aksi penyanderaan oleh aparat penegak hukum ini secara kultural dimaknai sebagai lambang keputusan masyarakat. Ketika sistem hukum formal dianggap gagal dan lambat, kekerasan personal dikonotasikan sebagai jalan pintas untuk mengambil alih otoritas keadilan secara paksa.

Mitos	Mitos yang dibangun adalah Tindakan main hakim sendiri (penganiayaan) ditingkai sedemikian rupa seolah-olah merupakan tindakan heroik dalam mencari keadilan.
-------	---

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.58 Episode 10 scene menit ke 27.40-28.32

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Yeremia: "JAKA! Sampai kapanpun aku akan tetap mencari keadilan buat anak gue.. apapun caranya. KHAKHAKHA" (tertawa meringis kesakitan saat dicekik Jaka)
Denotasi	Jaka mencekik Yeremia dengan penuh emosi. Di saat yang sama, Yeremia justru tertawa kesakitan dan menyatakan akan terus memburu keadilan dengan cara apa pun.
Konotasi	Tawa Yeremia saat dicekik menyimbolkan kondisi psikologis yang hancur akibat trauma ketidakadilan. Hal ini mengonotasikan bahwa kerusakan sistem hukum mampu mengubah seorang abdi negara menjadi sosok yang anarkis dan rela menghalalkan segala cara demi dendam pribadi.
Mitos	Sistem hukum yang menindas akan melahirkan "monster-monster" baru di masyarakat. Tindakan anarkis sebagai respons emosional yang wajar dari seorang ayah yang menjadi korban ketidakadilan penguasa.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Tabel 4.59 Episode 10 *scene* menit ke 28.41-29.13

Baris	Isi
Objek/ Visual	
Dialog/ Suara	Scene menceritakan <i>flashback</i> saat Siska masih hidup Siska: "Aku bangga punya ayah kaya ayah, superhero yang berjuang demi keadilan" Kemudian scene lanjut ke aslinya Jaka: "AHHHHH!!! Kalo semua ini terserah saya.. kamu sudah mati, tapi Siska ga mau ayahnya jadi seorang pembunuh. Meskipun atas nama keadilan!"
Denotasi	Jaka teringat ucapan mending anaknya (Siska) yang menganggapnya sebagai "superhero". Jaka kemudian melepaskan cekikannya dan berteriak menolak menjadi pembunuh, meskipun dengan alasan menegakkan keadilan.
Konotasi	Keputusan Jaka untuk menahan diri mengkonotasikan kembalinya batas moral antara penegak hukum sejati dan pelaku kriminal. Adegan ini secara umum aksi main hakim sendiri dan pembalasan dendam pribadi tidak akan pernah bisa melahirkan keadilan yang sesungguhnya.
Mitos	Mitos yang dibangun adalah kejahatan struktural tidak boleh dilawan dengan kejahatan personal, karena hanya akan menciptakan rantai kekerasan baru. Tindakan menahan diri dan patuh pada moralitas justru dinaturalisasi sebagai bentuk kepahlawanan yang paling murni.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

4.3 Pembahasan

Pembahasan ini menyajikan pola-pola makna yang dihasilkan dari analisis semiotika Roland Barthes terhadap 48 scene terpilih dalam 10 episode dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia. Pembahasan ini berfokus pada tiga hal, yaitu pola besar yang muncul dari keseluruhan data, muatan ideologis yang dibentuk dari film serial tersebut, serta keterkaitannya dengan kerangka teori representasi Stuart Hall, film sebagai teks budaya, semiotika Barthes, konsep ketidakadilan hukum, dan *vigilante justice*.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa film serial *Bad Guys* (2025) tidak sekadar menghadirkan aksi-thriller sebagai tontonan hiburan, melainkan secara sistematis membangun wacana tentang kegagalan sistem hukum Indonesia. Dalam kerangka Stuart Hall (1997), media tidak menggambarkan realitas secara diam, tetapi aktif membangun makna sosial melalui proses seleksi, pembingkaihan, dan penyusunan tanda. Film serial memilih simbol-simbol hukum tertentu, menempatkannya dalam konteks yang menyimpang dari fungsi normatifnya, lalu membiarkan makna tersebut terakumulasi lintas episode hingga membentuk alasan yang konsisten.

Keenam kategori ketidakadilan hukum, yaitu Ketidakadilan prosedural, struktural, substantif, simbolik, sistemik, dan *vigilante justice* secara merata di seluruh sepuluh episode, bukan terkonsentrasi pada episode tertentu. Pola penyebaran ini mencerminkan konstruksi ideologis yang terencana bahwa ketidakadilan hukum bersifat menyeluruh dan berlapis, bukan persoalan oknum individual yang dapat dipisahkan.

Film sebagai teks budaya, film serial ini mengelola fungsi ganda yang perlu dibaca secara kritis. Di satu sisi, merepresentasikan persoalan hukum yang memiliki korespondensi empiris nyata seperti korupsi yudisial, impunitas elit, ketidakpastian hak narapidana, kegagalan fungsi pengawasan internal, dan subordinasi peradilan terhadap kepentingan politik. Persoalan-persoalan ini bukan imajinasi bebas melainkan realitas struktural yang telah terdokumentasi oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, LBH Jakarta, dan ICW. Dalam kapasitas ini, film serial menjalankan fungsi positif film sebagai medium kritik sosial. Film serial ini merespons realitas tersebut mengandung muatan yang lebih bermasalah. Dengan secara konsisten menempatkan tindakan di luar hukum sebagai satu-satunya solusi yang efektif, serial ini tidak hanya mengkritik kegagalan sistem,

tetapi sekaligus mewajarkan pesimisme terhadap kemungkinan reformasi dari dalam.

Analisis tiga tingkat Roland Barthes, yaitu denotasi, konotasi dan mitos mengungkapkan cara kerja ideologis serial ini secara berlapis:

1. Tingkat Denotasi

Film serial ini membangun pola pembalikan simbolik seperti toga hakim bersanding dengan korupsi narkoba, senjata aparat digunakan untuk mengintimidasi, seragam dinas dijadikan perisai kejahatan, dan GPS *tracker* berubah menjadi alat kontrol atas tubuh narapidana. Setiap simbol otoritas hukum hadir bukan untuk mengukuhkan legitimasinya, melainkan untuk mempertanyakannya bahkan pada makna paling harfiah sekalipun.

2. Tingkat Konotasi

Tingkat konotasi terdapat dua pola makna mendominasi. Pertama, ketimpangan antara aparat dan kelompok lemah, di mana pihak lemah tidak memiliki ruang negosiasi maupun perlawanan sebuah pola yang memperkuat tesis Foucault tentang hukum sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Kedua, kegagalan institusi yang bertentangan sebagai prosedur hukum yang seharusnya menjamin keadilan justru menjadi instrumen penghalangnya.

3. Tingkat Mitos

Tingkat mitos membentuk dua pandangan secara bersamaan bahwa sistem hukum Indonesia secara struktural tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diubah, serta bahwa tindakan di luar hukum merupakan respons yang secara moral dapat dibenarkan terhadap kondisi tersebut. Sebagaimana diuraikan Roland Barthes, mitos bekerja dengan mengubah struktur ideologis menjadi sesuatu yang tampak alami dan tidak perlu dipertanyakan.

Temuan paling utama dalam penelitian ini adalah representasi ketidakadilan dalam film serial ini tidak pernah dibatasi pada level oknum. Berbeda dari narasi populer yang umumnya memusatkan masalah pada satu figur antagonis, *Bad Guys* (2025) secara konsisten menampilkan ketidakadilan sebagai fenomena struktural yang saling berkelindan.

Keenam kategori ketidakadilan berfungsi sebagai lapisan-lapisan yang saling menopang ketidakadilan prosedural menjadi gejala paling kasat mata dari disfungsi sistem, ketidakadilan struktural terwujud dalam pola perlindungan yang

berulang lintas episode, ketidakadilan substantif merepresentasikan wajah paling manusiawi dari kegagalan tersebut, ketidakadilan simbolik beroperasi melalui inversi fungsi simbol-simbol otoritas, ketidakadilan sistemik memperlihatkan bahwa korupsi bukan anomali melainkan pola terorganisasi, dan *vigilante justice* muncul sebagai muara kumulatif dari seluruh lapisan kegagalan di atasnya. Keenam lapisan ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu argumen ideologis yang kohesif tentang krisis keadilan hukum Indonesia.

Representasi *vigilante justice* dalam film serial ini melampaui definisi konvensional Johnston (1996) yang membatasinya pada tindakan warga sipil tanpa kewenangan resmi. Yang ditemukan dalam *Bad Guys* (2025) adalah perluasan yang jauh lebih kompleks, *vigilantisme* justru dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Jaka yang memukul tersangka, mengancam keluarga Ito, dan memanipulasi misi demi agenda pribadi dan Yeremia yang menganiaya Omar sebagai balas dendam atas kematian putrinya keduanya adalah figur yang secara jabatan paling berkewajiban menjaga supremasi hukum.

4.3.1 Pola Representasi Ketidakadilan Hukum

Ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) membangun secara berlapis melalui tanda-tanda visual dan naratif yang secara kumulatif. Setiap episode menyumbangkan lapisan makna baru yang memperkuat nilai serupa bahwa institusi hukum formal tidak dengan sendirinya menjamin keadilan substantif. Representasi ini tidak hanya disampaikan melalui dialog atau plot, tetapi terutama melalui cara film serial memilih, menyusun, dan membingkai tanda-tanda visual yang melingkupi praktik hukum itu sendiri.

Hukum yang muncul secara berulang dan saling memperkuat. Ketidakadilan prosedural tampak ketika mekanisme hukum formal justru berfungsi sebagai celah yang melindungi pelaku yang paling jelas ketika Ito lolos bukan karena tidak bersalah, melainkan karena cacat prosedur penangkapan. Ketidakadilan struktural termanifestasi dalam pola perlindungan yang konsisten terhadap Fery dan Gubernur Ahmad Aziz, yang posisi sosialnya menjadi benteng dari jangkauan hukum. Ketidakadilan substantif melalui kondisi narapidana yang dilibatkan dalam program negara tanpa jaminan hak yang memadai mereka menjalankan kewajiban, tetapi tidak menerima perlindungan yang setara. Ketidakadilan sistemik terlihat dari pola korupsi yudisial yang melibatkan Hakim Muhtar, yang memperlihatkan bahwa penyimpangan bukan anomali individual melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar. Ketidakadilan simbolik bekerja melalui pembalikan fungsi simbol-simbol kewenangan hukum dari representasi

keadilan menjadi instrumen kontrol dan dominasi. Sementara *vigilante justice* muncul sebagai respons kumulatif terhadap kelima bentuk kegagalan di atasnya, ketika jalur formal dianggap tidak lagi dapat diandalkan.

Representasi ini yang menjadikan secara ideologis adalah tidak semata-mata bergantung pada dialog. Film serial ini membangun makna ketidakadilan melalui ruang-ruang dan objek-objek yang secara umum dikaitkan dengan otoritas hukum, namun ditampilkan dalam konteks yang menyimpang dari fungsi normatifnya, seperti ruang sidang, ruang interogasi, toga hakim, borgol dan senjata, GPS *tracker*, ekspresi dan gestur. Dari keseluruhan tanda tersebut, terdapat empat pola representasi utama dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Hukum hadir secara formal tetapi tidak selalu adil dengan prosedur dijalankan, sidang digelar, keputusan dijatuhkan namun seluruh proses itu dapat diarahkan untuk menghasilkan outcome yang jauh dari keadilan substantif
2. Aparat hukum tampil sebagai pemegang kuasa, tetapi kuasa itu kerap digunakan secara bermasalah bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengendalikan, mengancam, bahkan memanfaatkan pihak yang berada di bawah kewenangan mereka.
3. Narapidana tidak sekadar diposisikan sebagai pelaku kriminal yang menjalani konsekuensi hukum, tetapi sebagai subjek yang dikontrol dan dimanfaatkan oleh kepentingan yang lebih besar dari mereka.
4. Simbol-simbol hukum mengalami pembalikan makna secara konsisten dari lambang keadilan dan perlindungan menjadi penanda kontrol, manipulasi, dan penyimpangan.

Pola-pola ini tidak dapat dipahami secara memadai tanpa mengacu pada teori representasi Stuart Hall. Film serial ini tidak sekadar mencerminkan realitas hukum Indonesia secara aktif mengonstruksi makna bahwa hukum adalah arena relasi kuasa. Dalam pendekatan konstruksional Hall (1997), representasi bukan pencerminan, melainkan praktik aktif produksi makna yang menentukan bagaimana sesuatu dipahami dan dinilai. *Bad Guys* (2025) memilih untuk merepresentasikan hukum bukan sebagai sistem yang sedang berproses menuju perbaikan, melainkan sebagai struktur yang secara bawaan melayani mereka yang memiliki kuasa. Makna inilah yang secara terus-menerus diproduksi dan diperkuat melalui akumulasi tanda lintas episode.

Kerangka semiotika Barthes mempresentasikan ketidakadilan hukum dalam film serial ini dapat dibaca pada tiga tingkat yang berbeda namun saling terkait. Pada tingkat denotasi, yang tampak adalah tanda-tanda hukum dalam hakim bersidang, aparat menginterogasi, narapidana dibelenggu, GPS *tracker*

melekat di pergelangan. Pada tingkat konotasi, tanda-tanda tersebut membawa makna sosial dan kultural yang sidang tidak menghasilkan keadilan, interogasi adalah praktik kekerasan yang dilegalkan, borgol merepresentasikan ketidakberdayaan yang dibuat permanen, dan GPS *tracker* menandai tubuh narapidana sebagai milik negara. Pada tingkat mitos, akumulasi tanda-tanda tersebut membangun dan mewajarkan sebuah hukum formal tidak dengan sendirinya menghasilkan keadilan, bahwa institusi hukum lebih banyak melayani kepentingan kekuasaan daripada kepentingan kebenaran, dan bahwa kondisi demikian adalah sesuatu yang sudah wajar dan sulit diubah. Mitos ini bekerja dengan cara yang khas dan tidak diungkapkan secara langsung, tetapi dibiarkan mengendap sebagai kesimpulan yang terasa tidak dapat terhindarkan bagi penonton yang telah menyerap keseluruhan tanda.

Pola representasi yang dominan dalam film serial *Bad Guys* (2025) adalah penggambaran hukum sebagai institusi yang tampak sah secara formal, tetapi problematis secara moral dan ideologis. Keaslian formal itu yang terwujud dalam prosedur, seragam, ruang sidang, dan simbol-simbol kewenangan yang menjadi penutup yang menyembunyikan relasi kuasa yang timpang di baliknya. Film serial ini tidak menyerang hukum secara frontal, melainkan memperlihatkan kesenjangan antara apa yang diklaim oleh hukum dan kesenjangan itulah yang menjadi sumber utama makna ideologis dalam keseluruhan teks.

4.3.2 Krisis Legitimasi Hukum pada Film Serial *Bad Guys* (2025)

Krisis legitimasi hukum dapat dipahami sebagai kondisi institusi hukum secara kelembagaan tetap eksis dan beroperasi, tetapi kepercayaan publik terhadap kemampuannya menegakkan keadilan secara substantif mengalami pelemahan yang signifikan. Dalam kondisi demikian, hukum tidak runtuh secara struktural sidang tetap digelar, aparat tetap bertugas, prosedur tetap dijalankan namun seluruh mekanisme formal itu tidak lagi dipercaya mampu menghasilkan keadilan yang sesungguhnya. Film serial *Bad Guys* (2025) merepresentasikan yang menjadi latar ideologis utamanya bukan ketiadaan hukum, melainkan hukum yang ada tetapi tidak dapat diandalkan.

Krisis legitimasi dalam film serial ini tidak hanya melalui satu peristiwa tunggal, melainkan dibangun secara kumulatif melalui empat pola kegagalan yang berulang. Pertama, hukum digambarkan tidak mampu menangani kejahatan secara efektif program rekrutmen narapidana diperlukan sejak awal. Premis dasar film serial ini sendiri sudah merupakan pernyataan ideologis aparat konvensional tidak cukup, sehingga negara harus meminjam tangan para kriminal untuk

menangkap kriminal lainnya. Kedua, hukum dapat dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa. Keterlibatan Hakim Muhtar dalam jaringan korupsi narkoba dan perlindungan yang dinikmati jaringan Gubernur Ahmad Aziz memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan menentukan sejauh mana seseorang terjangkau atau terlindungi dari hukum. Ketiga, hukum tidak selalu hadir untuk melindungi pihak yang lemah. Narapidana yang direkrut menjalankan misi berbahaya tanpa jaminan hak yang memadai, berada dalam posisi tawar yang nihil terhadap negara yang memanfaatkan mereka. Keempat, hukum dapat difungsikan sebagai alat tekanan bukan sarana perlindungan ketika aparat menggunakan ancaman hukuman sebagai instrumen kendali terhadap narapidana yang terlibat dalam program.

Krisis legitimasi ini terwujud dalam sejumlah momen naratif yang secara kumulatif membentuk argumen ideologis yang konsisten. Sidang pengadilan tampil dalam format formal yang lengkap, namun di balik formalitas itu tersimpan indikasi penyimpangan yang tidak pernah benar-benar dipertanggungjawabkan secara institusional. Aparat menggunakan ancaman personal dan kekerasan dalam interogasi tindakan yang secara prosedural tidak sah, namun dalam konteks serial direpresentasikan sebagai hal yang lumrah dan bahkan perlu. Rekrutmen narapidana untuk menjalankan operasi negara secara implisit merupakan pengakuan bahwa jalur formal tidak cukup efektif untuk menghadapi kejahatan terorganisir. Operasi yang dijalankan tim berlangsung dalam kerahasiaan yang menjauhi transparansi dan pertanggungjawaban institusional. Yang paling signifikan secara ideologis adalah pergeseran lokus keadilan tidak lagi ditentukan oleh institusi formal, melainkan bergeser ke tindakan personal para tokoh yang bertindak berdasarkan penilaian moral subjektif mereka sendiri.

Krisis legitimasi ini tidak hanya disampaikan melalui plot, tetapi dikodekan secara visual melalui tanda-tanda yang mengalami pergeseran atau kehilangan makna konvensional. Toga hakim yang merupakan penanda netralitas dan otoritas yudisial yang kehilangan nilai simboliknya ketika figur yang mengenakannya terbukti terlibat dalam jaringan korupsi. Ruang sidang yang seharusnya menjadi ruang netral tempat kebenaran dicari dan keadilan ditimbang, tampil sebagai arena di mana outcome telah terkondisikan oleh kepentingan di luar prosedur. Senjata aparat yang seharusnya merepresentasikan kewenangan yang sah dan mengalami perubahan menjadi simbol kuasa personal yang digunakan melampaui batas kewenangannya. GPS *tracker* yang melekat pada tubuh narapidana melampaui fungsi teknisnya menjadi penanda subjek hukum berada dalam kondisi pengawasan total yang menghapus otonomi dan martabat personal. Ruang interogasi, pada akhirnya, tidak lagi berfungsi sebagai ruang

pencarian kebenaran, melainkan sebagai ruang produksi tekanan di mana pengakuan dan ketundukan lebih penting daripada fakta.

Krisis legitimasi yang direpresentasikan film serial ini memiliki akar yang dapat ditelusuri melalui tiga ketidakadilan hukum. Ketidakadilan prosedural memperlihatkan prosedur hukum yang diikuti dengan benar tidak secara otomatis menghasilkan keadilan prosedur dapat menjadi celah perlindungan bagi pelaku sekaligus jebakan bagi korban. Ketidakadilan struktural menunjukkan struktur kuasa sosial dan politik secara nyata mempengaruhi mereka yang memiliki kuasa tidak tunduk pada hukum dengan cara yang sama seperti mereka yang tidak memilikinya. Ketidakadilan substantif menegaskan keadilan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh pihak yang paling rentan kerap tidak tercapai meski seluruh prosedur formal telah dipenuhi. Ketiga dimensi ini bekerja secara sinergis dalam film serial, membentuk gambaran sistem hukum yang mengalami kegagalan tidak pada satu titik, melainkan pada hampir seluruh lapisan operasionalnya.

Representasi krisis legitimasi ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang film dan serial sebagai teks budaya yang tidak pernah netral secara ideologis. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, film berfungsi bukan hanya sebagai medium hiburan, tetapi sebagai ruang di mana nilai-nilai, ideologi, dan persepsi tentang institusi sosial diproduksi dan disirkulasikan. Dalam kapasitas inilah *Bad Guys* (2025) beroperasi sebagai ruang kritik terhadap institusi hukum formal yang mengundang penonton untuk mempertanyakan legitimasi institusi.

Kerangka teori representasi Hall, representasi hukum dalam media tidak pernah sekadar mencerminkan realitas mengandung dan memproduksi ideologi. Pilihan untuk merepresentasikan hukum sebagai arena yang dapat dimanipulasi, yang melayani kuasa, dan yang gagal melindungi yang lemah adalah pilihan ideologis yang membentuk cara penonton memahami dan merasakan institusi hukum di luar layar.

Film serial *Bad Guys* (2025) secara konsisten membangun wacana bahwa hukum formal kehilangan legitimasinya ketika gagal menghadirkan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan. Legitimasi, dalam logika serial ini, bukan ditentukan oleh keberadaan prosedur atau kelengkapan institusi, melainkan oleh kemampuan aktual sistem tersebut untuk melindungi yang lemah, menghukum yang bersalah tanpa pandang status, dan menghasilkan keadilan yang melampaui formalitas. Ketika ukuran-ukuran tersebut tidak terpenuhi dan film serial ini secara sistematis memperlihatkan bahwa memang tidak terpenuhi yang tersisa hanyalah

cangkang institusi yang masih beroperasi tetapi telah kehilangan dasar kepercayaan yang menopangnya.

4.3.3 Ambiguitas Moral dan Normalisasi *Vigilante Justice*

Salah satu ciri paling menonjol dari film serial *Bad Guys* (2025) adalah penolakannya terhadap pembagian moral yang sederhana. Film serial ini tidak menghadirkan tokoh yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat, melainkan menempatkan seluruh karakternya dalam zona moral yang abu-abu dan terus bergeser. Aparat hukum dapat melanggar prosedur yang seharusnya mereka jaga narapidana yang secara formal adalah pelaku kriminal dapat bertindak sebagai agen keadilan yang lebih konsisten daripada institusi yang mengurung mereka. Tindakan yang secara hukum tidak dapat dibenarkan kerap tampil dalam bingkai yang membuatnya dapat dipahami bahkan dibenarkan secara emosional. Ambiguitas moral inilah yang menjadi mesin naratif sekaligus sumber makna ideologis terdalam dalam film serial ini.

Karakter Jaka merepresentasikan ketimpangan ideologis yang paling produktif dalam film serial. Sebagai aparat hukum, ia adalah figur yang secara institusional paling berkewajiban menjaga batas-batas prosedural. Namun sejumlah tindakannya secara konsisten melampaui batas tersebut yang memukul tersangka dalam interogasi, mengancam keluarga Ito sebagai instrumen tekanan, dan memanipulasi dinamika operasi demi agenda yang sebagian bersifat personal. Film serial tidak menghadirkan tindakan-tindakan ini, melainkan sebagai respons yang dapat dimengerti dari seseorang yang beroperasi dalam sistem yang terus-menerus mengecewakan.

Anton, Haidar, dan Elias dari ketiga narapidana ini berada pada posisi yang paradoks namun berbeda. Mereka adalah narapidana subjek hukum yang telah divonis bersalah dan sedang menjalani konsekuensinya namun secara naratif diberi peran sebagai pelaksana penegakan hukum. Paradoks ini bukan sekadar alat plot, melainkan pernyataan ideologis: ketika institusi formal tidak cukup efektif, negara berpaling pada mereka yang telah dihukum oleh sistem yang sama. Posisi ini menciptakan tegangan yang tidak pernah sepenuhnya terselesaikan antara legalitas dan moralitas antara siapa yang secara formal berhak menegakkan hukum dan siapa yang secara moral lebih layak melakukannya.

Vigilante justice dalam film serial dalam spektrum yang luas, dari yang relatif tersamar hingga yang terang-terangan. Ancaman personal digunakan sebagai instrumen kendali terhadap tersangka maupun saksi. Pemukulan terjadi dalam konteks interogasi yang melampaui batas kewenangan formal. Interogasi

paksa dijalankan tanpa prosedur yang sah dan tanpa pengawasan institusional. Pemaksaan kerja sama yang diterapkan terhadap narapidana melalui kombinasi pengurangan hukuman dan ancaman konsekuensi menempatkan subjek hukum dalam posisi yang tidak memiliki ruang penolakan yang nyata.

Seluruh tindakan tersebut memenuhi karakteristik *vigilante justice* sebagaimana dirumuskan Johnston (1996) dilakukan di luar prosedur hukum formal, dilaksanakan atas penilaian moral subjektif pelakunya, dan muncul sebagai respons terhadap persepsi bahwa sistem hukum formal tidak mampu atau tidak mau menghasilkan keadilan yang membedakan representasi dalam film serial ini dari konsepsi konvensional vigilantisme adalah bahwa pelakunya bukan warga sipil tanpa otoritas, melainkan justru para pejabat hukum itu sendiri. Secara penting vigilantisme tidak lagi dapat diidentifikasi dari siapa pelakunya, melainkan dari cara tindakan itu melampaui dan menggantikan prosedur yang seharusnya mengikat mereka. Tindakan-tindakan ini secara konsisten dibingkai dalam film serial sebagai upaya mencapai keadilan substantif yang tidak dapat dicapai melalui jalur formal sebuah pembungkaman yang memiliki implikasi ideologis yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembenaran individual.

Melalui kerangka Roland Barthes, lapisan makna *vigilante justice* dalam film serial ini dapat diuraikan secara 3 tingkat:

1. Tingkat Denotasi
Tindakan-tindakan konkret pada tingkat denotasi kekerasan fisik dalam interogasi, ancaman verbal terhadap tersangka dan keluarganya, pemaksaan yang dilakukan tanpa dasar prosedural yang sah.
2. Tingkat Konotasi
Tindakan-tindakan tersebut pada tingkat konotasi tidak dibaca sebagai kriminalitas atau penyalahgunaan wewenang semata, melainkan sebagai ekspresi frustrasi yang dapat dipahami terhadap sistem hukum formal yang berulang kali terbukti tidak memadai. Konotasi ini dibentuk melalui konteks naratif yang secara cermat dibangun sebelum setiap tindakan kekerasan. Penonton telah diperlihatkan mengapa sistem gagal, sehingga ketika kekerasan terjadi, ia terasa seperti konsekuensi yang logis daripada pelanggaran yang perlu dikutuk.
3. Tingkat Mitos
Akumulasi tanda-tanda ini pada tingkat mitos menaturalisasi sebuah proposisi ideologis yang berbahaya pada tindakan kekerasan dapat tampak wajar, bahkan perlu, apabila dilakukan demi keadilan oleh figur yang motivasinya dianggap murni. Mitos ini tidak dinyatakan secara eksplisit.

Film serial *Bad Guys* (2025) secara genuine mengkritik sistem hukum yang gagal kritik itu tajam, berdasar, dan secara naratif. Namun dalam proses mengkritik kegagalan sistem, film serial ini sekaligus berpotensi menormalisasi tindakan di luar hukum sebagai respons yang legitimate terhadap kegagalan tersebut. Penonton diarahkan melalui pembingkai yang cermat, musik, sudut kamera, dan konstruksi simpati terhadap tokoh untuk memahami, jika bukan membenarkan, pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh figur-figur yang secara moral tampak memiliki alasan yang kuat.

Mekanisme normalisasi melalui konstruksi simpati. Film serial membangun latar belakang tokoh sedemikian rupa sehingga tindakan mereka yang melampaui batas hukum selalu dapat ditelusuri pada motivasi yang secara emosional dapat diterima trauma personal Yeremia, frustrasi Jaka terhadap sistem yang melindungi yang bersalah, kondisi narapidana yang tidak memiliki pilihan lain. Ketika motivasi tersebut telah tertanam dalam pemikiran penonton, tindakan yang secara prosedural tidak dapat dibenarkan menjadi sesuatu yang secara emosional dapat dipahami dan jarak antara pemahaman emosional dengan pembenaran moral itu tipis dan mudah terlampaui tanpa disadari.

Serial ini tidak mengambil posisi yang tegas dalam memisahkan ketiga hal tersebut dan yang menjadikannya secara ideologis kompleks sekaligus problematis. Keadilan, balas dendam, dan penyalahgunaan kuasa hadir dalam tindakan yang sama, dilakukan oleh tokoh yang sama, dalam momen yang sama. Ketika Yeremia menganiaya Omar, apakah itu keadilan bagi putrinya yang terbunuh, balas dendam personal yang menyamar sebagai keadilan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan yang seharusnya menuntutnya bertindak di atas kepentingan pribadi? Film serial tidak memberikan jawaban yang tuntas dan ketidaktuntasan itulah yang membiarkan penonton memilih pembacaan yang paling sesuai dengan disposisi moral mereka masing-masing.

Ambiguitas moral adalah pusat representasi Film serial *Bad Guys* (2025), bukan sekadar naratif. Film serial ini memperlihatkan dengan konsisten bahwa keadilan menjadi problematis ketika dilepaskan dari prosedur hukum yang sah yang bukan karena prosedur itu sendiri, melainkan karena tanpa prosedur, yang menentukan apa yang disebut keadilan hanyalah penilaian moral subjektif dari mereka yang kebetulan memiliki kuasa dan kapasitas untuk menjalankannya. Ketika keadilan bergantung sepenuhnya pada integritas dan motivasi individu, bukan lagi keadilan dalam pengertian institusional menjadi sesuatu yang jauh lebih rentan, jauh lebih tidak dapat diprediksi, dan jauh lebih mudah bergeser menjadi balas dendam yang terbungkus retorika kebenaran.

4.3.4 Film Serial Digital sebagai Media Kritik Sosial

Film serial *Bad Guys* (2025) hadir sebagai produk budaya populer yang didistribusikan melalui platform *streaming* digital yang tidak hanya sekadar menentukan cara penonton mengakses film serial, tetapi juga membentuk cara film serial tersebut beroperasi sebagai teks budaya. Platform *streaming* memungkinkan konsumsi yang intensif, personal, dan berkelanjutan penonton tidak hanya menonton satu episode per minggu, tetapi dapat menyerap keseluruhan narasi dalam durasi yang jauh lebih singkat, sehingga akumulasi makna ideologis yang dibangun film serial ini bekerja dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan format siaran konvensional. Dalam ekosistem media digital yang semakin mendominasi konsumsi budaya, film serial seperti *Bad Guys* (2025) berfungsi sebagai salah satu ruang utama di mana masyarakat membentuk, dinegosiasikan, dan merespons pemahaman mereka tentang realitas sosial.

Sebagai produk industri budaya, film serial *Bad Guys* (2025) memiliki fungsi ganda yang tidak dapat dipisahkan. Tontonan aksi-thriller yang dibuat untuk menarik dan mempertahankan perhatian penonton melalui ketegangan naratif, konflik karakter, dan dinamika visual yang tinggi. Di sisi lain yang menjadikannya secara analitis film serial ini sekaligus berfungsi sebagai medium representasi sosial yang secara sistematis membangun wacana tentang institusi hukum, relasi kuasa, dan keadilan dalam konteks Indonesia kontemporer. Kedua fungsi ini tidak berjalan secara terpisah justru karena dikemas dalam format hiburan yang populer dan mudah dikonsumsi, kritik sosial yang terkandung di dalamnya memiliki jangkauan dan daya yang jauh lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh wacana akademis atau jurnalisme investigatif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa film serial *Bad Guys* (2025) memuat berbagai bentuk kritik sosial yang dibangun melalui narasi, karakter, konflik, serta simbol-simbol visual yang ditampilkan sepanjang cerita. Kritik sosial tersebut dapat didefinisikan 5 aspek berikut:

1. Kritik terhadap sistem hukum yang tidak selalu adil terlihat dari prosedur formal yang dapat menjadi celah perlindungan bagi pelaku dan jebakan bagi pihak yang tidak berdaya, sebagaimana berulang kali ditampilkan melalui berbagai kasus yang berakhir jauh dari keadilan substantif.
2. Kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan aparat terlihat dari kewenangan yang dimiliki figur-figur hukum mulai dari aparat lapangan hingga pejabat yudisial yang sering digunakan melampaui batas yang semestinya, dan film serial ini tidak menutupi kenyataan tersebut di balik narasi heroik.

3. Kritik terhadap manipulasi hukum oleh pihak berkuasa ditunjukkan melalui jaringan Gubernur Ahmad Aziz dan keterlibatan Hakim Muhtar yang memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi mampu mengubah hukum menjadi instrumen yang bekerja secara selektif sesuai kepentingan tertentu.
4. Kritik terhadap lemahnya perlindungan bagi kelompok rentan terlihat dari posisi narapidana yang direkrut dalam program operasi negara tanpa pilihan dan tanpa jaminan, sehingga mencerminkan situasi ketika pihak paling lemah justru menanggung risiko terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi mereka.
5. Kritik terhadap kondisi yang melahirkan keadilan alternatif di luar prosedur formal terlihat dari kemunculan *vigilante justice* yang tidak digambarkan sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai konsekuensi sistemik dari kegagalan institusi yang terus berulang dan tidak terselesaikan.

Dalam kerangka film dan serial sebagai teks budaya sebagaimana dijelaskan pada Bab II, *Bad Guys* (2025) tidak hanya merefleksikan persoalan hukum yang hadir di masyarakat, tetapi juga secara aktif menciptakan makna mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, aparat, narapidana, dan masyarakat. Setiap elemen naratif mulai dari karakter yang ditampilkan, konflik yang dikembangkan, hingga penyelesaian yang ditawarkan merupakan pilihan representasional yang memuat dimensi ideologis. Hukum dalam film serial ini tidak dipahami sebagai sistem yang netral dan imparial, melainkan sebagai arena tempat relasi kuasa sosial berlangsung dan direproduksi. Aparat tidak semata-mata digambarkan sebagai pelayan keadilan, tetapi juga sebagai figur yang posisi dan kewenangan institusionalnya dapat menjadi sumber dominasi. Narapidana tidak hanya direpresentasikan sebagai pelaku kriminal yang menjalani hukuman, melainkan sebagai manusia yang dalam kondisi tertentu mampu menjadi agen keadilan yang lebih konsisten dibandingkan sistem yang menghukum mereka.

Kritik sosial dalam film serial ini tidak bertumpu pada satu bentuk penyampaian saja, melainkan dibentuk melalui kerja simultan berbagai elemen teks. Tanda-tanda visual ruang sidang yang tampak formal tetapi menyimpan penyimpangan, ruang interogasi yang berubah menjadi ruang pemaksaan, hingga *GPS tracker* yang melingkari pergelangan narapidana menghadirkan kritik pada level yang melampaui kesadaran diskursif penonton. Dialog memperkuat ketegangan antara prosedur formal dan realitas lapangan, sering kali melalui ketidaksesuaian yang menunjukkan jarak antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang benar-benar berlangsung. Konflik antar karakter mengekskternalisasi pertentangan antara legalitas dan moralitas, antara kepatuhan prosedural dan keadilan substantif. Simbol-simbol hukum seperti toga, borgol, senjata, dan ruang

sidang mengalami pergeseran serta pembalikan makna yang secara bertahap mengikis kepercayaan terhadap legitimasi formal yang biasanya melekat pada simbol-simbol tersebut.

Film serial *Bad Guys* (2025) menunjukkan bahwa film serial digital memiliki kapasitas menjadi ruang kritik sosial yang efektif terhadap persoalan hukum, kekuasaan, dan keadilan. Dengan memanfaatkan kekuatan format populer dengan karakter yang kompleks, narasi yang menegangkan, serta visual yang kuat dalam film serial ini menghadirkan kritik yang menyentuh persoalan struktural sistem hukum Indonesia tanpa kehilangan daya tarik sebagai hiburan. Justru karena kritik tersebut disampaikan melalui medium hiburan, bukan melalui wacana formal, film serial ini mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan berpotensi membentuk persepsi publik mengenai hukum dan keadilan dengan cara yang sulit dilakukan medium lain. Dalam konteks ini, film serial digital seperti *Bad Guys* (2025) menempati posisi penting tidak hanya dalam lanskap budaya populer, tetapi juga dalam ekologi wacana sosial yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merespons ketidakadilan di sekitarnya.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai representasi ketidakadilan hukum dalam film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Referensi Teori Klasik (Johnston, 1996)

Penelitian ini menggunakan kerangka teori elemen-elemen *vigilante justice* dari Les Johnston yang dipublikasikan pada tahun 1996 sebagai salah satu landasan konseptual utama pada Bab II. Penggunaan referensi teori yang telah berusia cukup lama ini menjadi sebuah keterbatasan, mengingat objek yang diteliti adalah produk media kontemporer, yakni film serial *Bad Guys* yang dirilis pada tahun 2025. Terdapat rentang waktu hampir tiga dekade antara perumusan teori tersebut dengan realitas sosial, hukum, dan media yang direpresentasikan di dalam film.

Konsep *vigilantisme* yang dirumuskan pada tahun 1996 cenderung dibangun pada dinamika masyarakat tradisional atau era sebelum perubahan digital, sehingga teori ini memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi keragaman bentuk kejahatan masa kini, relasi kuasa, serta fenomena *state vigilantism* (main hakim sendiri oleh aparat negara) yang termanifestasi dalam film

serial ini. Parameter klasik dari Johnston (1996) tidak sepenuhnya relevan atau cukup lengkap untuk membedah lapisan-lapisan krisis institusional dan ambiguitas moralitas aparat penegak hukum yang secara spesifik dibentuk dalam latar waktu dan sosial masyarakat di tahun 2025.

2. Tidak Dilakukannya Analisis Persepsi Penonton

Penelitian ini murni menggunakan pendekatan analisis teks media, secara spesifik menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang berfokus pada pemaknaan tanda (denotasi, konotasi, dan mitos) yang terdapat di dalam adegan-adegan (*scene*) film serial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkaji bagaimana persepsi, penerimaan, maupun pemaknaan audiens atau penonton terhadap pesan ketidakadilan hukum yang disampaikan. Pemaknaan yang dihasilkan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari pemahaman peneliti terhadap teks film itu sendiri. Hal ini menjadi keterbatasan karena makna ideologis yang dikonstruksi oleh media mungkin saja diartikan atau dinegosiasikan secara berbeda oleh khalayak penonton yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

Hal ini merupakan keterbatasan yang signifikan karena dalam kerangka teori representasi Stuart Hall, proses pemaknaan tidak hanya terjadi pada tingkat produksi teks (*encoding*), tetapi juga pada tingkat penerimaan penonton (*decoding*). Penonton yang berbeda dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hukum yang beragam mungkin akan memaknai tanda-tanda yang sama secara berbeda ada yang melakukan pembacaan dominan sesuai makna yang dimaksudkan teks, ada yang melakukan pembacaan negosiasi, dan ada pula yang melakukan pembacaan yang menolak ideologi dominan yang ditawarkan serial.

3. Tidak Dilakukannya Wawancara dengan Sutradara, Produser, dan Para Pemain

Keterbatasan kedua pada penelitian ini adalah tidak dilakukannya wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi film serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia, termasuk sutradara Ferry Pei Irawan dan William Chandra, produser, penulis skenario Ambaridzki Ramadhanty, maupun para pemeran utama seperti Oka Antara, Dwi Sasono, Randy Pangalila, dan Omara Esteghlal.

Wawancara dengan para kreator dan pemeran film serial akan memberikan dimensi analisis yang berbeda dan saling melengkapi. Dari perspektif sutradara dan penulis skenario, wawancara dapat mengungkap intensi

komunikatif yang disengaja di balik pilihan-pilihan naratif dan visual tertentu misalnya, apakah representasi ketidakadilan hukum dalam film serial ini memang dimaksudkan sebagai kritik sosial yang terencana, ataukah merupakan hasil adaptasi kreatif dari versi Korea yang kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dari perspektif para pemeran, wawancara dapat menggali bagaimana mereka menghayati dan menginterpretasikan karakter-karakter yang mereka perankan, serta bagaimana pemahaman personal mereka tentang sistem hukum Indonesia mempengaruhi penampilan mereka. Analisis yang dilakukan murni didasarkan pada apa yang tersaji di layar (visual, narasi, dan dialog), sehingga interpretasi tanda tidak dikonfirmasi langsung dengan maksud asli dari para pembuat karya.



POLITEKNIK TEMPO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis semiotika Roland Barthes terhadap 48 adegan Penelitian ini menganalisis representasi ketidakadilan hukum dalam serial *Bad Guys* (2025) versi Indonesia melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Dengan menganalisis 48 scene terpilih dari 10 episode, penelitian ini tidak bertujuan mengukur seberapa akurat serial merekam realitas sistem hukum Indonesia, melainkan mengungkap *bagaimana* serial mengonstruksi makna tentang ketidakadilan hukum melalui pemilihan, penyusunan, dan pembingkaiannya tanda-tanda visual dan naratif. Kesimpulan berikut menjawab dua rumusan masalah penelitian secara langsung.

5.1.1 Representasi Tanda-Tanda Visual dan Naratif Ketidakadilan Hukum dalam Serial *Bad Guys* (2025)

Film Serial *Bad Guys* (2025) membangun representasi ketidakadilan hukum bukan melalui satu adegan tunggal yang dramatis, melainkan melalui akumulasi sistematis tanda-tanda yang terdistribusi secara merata di seluruh sepuluh episode. Pola distribusi yang merata ini sendiri merupakan pernyataan ideologis bahwa ketidakadilan hukum bukan anomali episodik, melainkan kondisi yang berlangsung konsisten, menyeluruh, dan tidak dapat diatribusikan pada satu titik kegagalan tunggal. Penelitian ini mengidentifikasi enam pola representasi yang secara kolektif membentuk argumen ideologis yang kohesif tentang krisis keadilan hukum, yaitu:

1. Ketidakadilan Prosedural

Direpresentasikan melalui strategi inversi simbolik yang berulang melalui tanda-tanda yang secara konvensional merepresentasikan legitimasi prosedur toga hakim, ruang sidang, seragam dinas, pistol aparat secara konsisten ditampilkan dalam konteks yang menyimpang dari fungsi normatifnya. Hakim Muhtar membacakan vonis di balik toga resminya sambil menyembunyikan kokain dalam pulpen jabatannya. Jaka menggunakan seragam dan senjata institusionalnya untuk melancarkan agenda personal. Prosedur rekrutmen narapidana dilaksanakan tanpa satupun elemen prosedural yang seharusnya ada. Inversi ini membangun representasi bahwa prosedur hukum adalah *penampilan* yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan *outcome* yang berlawanan dengan tujuan deklaratifnya.

2. Ketidakadilan Struktural

Melalui tanda-tanda yang secara konsisten memperlihatkan asimetri antara mereka yang terlindungi oleh sistem dan mereka yang tidak. Postur percaya diri Ito saat menantang Jaka tanpa rasa takut, instruksi Gunawan menghentikan investigasi karena menyentuh nama Gubernur Aziz, serta transfer rutin miliaran rupiah yang menghubungkan pengacara, jaksa, dan hakim dalam satu jaringan semuanya membangun representasi bahwa aksesibilitas terhadap perlindungan hukum bukan hak yang merata, melainkan sumber daya yang terdistribusi sesuai hierarki kekuasaan.

3. Ketidakadilan Substansif

Direpresentasikan melalui kesenjangan antara kewajiban yang dibebankan kepada narapidana dan hak yang diterima sebagai imbalannya. Pertanyaan Anton "ini serius gua bebas?" setelah dikeluarkan dari penjara, pengakuan Jaka bahwa janji pembebasan bersyarat berada di luar kendalinya, serta pernyataan Gunawan bahwa "emang ga ada dasarnya dari awal" ketiganya membangun representasi bahwa negara dapat mengoperasikan kewajiban tanpa jaminan hak, dan ambiguitas hukum yang disengaja berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi negara dari tuntutan pertanggungjawaban.

4. Ketidakadilan Sistemik

Terutama melalui *lokasi* pengambilan keputusan percakapan informal antara Nurdin dan Gunawan di ruang mewah, negosiasi tertutup antara Yeremia dan Gunawan tentang nasib kasus Ito, percakapan rahasia Sari dan Chandra tentang kelanjutan kerja sama mereka. Serial secara konsisten menempatkan keputusan-keputusan terpenting di luar ruang formal yang seharusnya menjadi lokasinya, membangun representasi bahwa transparansi prosedural adalah wajah publik sistem, sementara negosiasi informal adalah cara sistem sesungguhnya beroperasi.

5. Ketidakadilan Simbolik

Mekanisme pembalikan fungsi yang paling eksplisit dalam seluruh serial. *GPS tracker* yang melingkari pergelangan narapidana merepresentasikan bahwa kebebasan fisik dapat diberikan sekaligus dicabut oleh aparat yang memegang kendali teknologinya. Pistol yang diarahkan ke dada Ipang dan ke kepala Ito dalam interogasi merepresentasikan bahwa senjata negara dapat beroperasi sebagai instrumen kepentingan personal. Ruang sidang pada episode 10 merepresentasikan bukan arena pencarian kebenaran, melainkan infrastruktur

produksi impunitas yang dapat difungsikan oleh siapapun yang mampu membeli aktor-aktor kunci di dalamnya.

6. *Vigilante Justice*

temuan yang secara konseptual paling signifikan dalam penelitian ini, vigilantisme tidak hadir sebagai tindakan warga sipil yang frustrasi terhadap sistem sebagaimana didefinisikan Johnston (1996) melainkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh figur-figur yang secara institusional paling berkewajiban menjaga supremasi hukum. Jaka dan Yeremia adalah pelaku *vigilante justice* dalam serial ini. Serial membingkai tindakan-tindakan mereka dalam konteks naratif yang secara cermat membangun pembenaran emosionalnya terlebih dahulu trauma Jaka atas kematian anaknya, kehancuran Yeremia akibat kegagalan sistem melindungi putrinya.

Keenam kategori ini tidak berdiri sendiri sebagai temuan terpisah. Mereka berfungsi sebagai lapisan-lapisan representasi yang saling menopang: ketidakadilan prosedural menyediakan celah bagi ketidakadilan struktural untuk beroperasi ketidakadilan struktural menghasilkan ketidakadilan substantif bagi yang paling lemah; ketidakadilan substantif dan sistemik bersama-sama mengikis legitimasi institusi; ketidakadilan simbolik menaturalisasi erosi itu melalui inversi tanda; dan *vigilante justice* muncul sebagai muara kumulatif dari keseluruhan kegagalan di atasnya. Bersama-sama, keenam lapisan ini membentuk satu argumen representasional yang kohesif: bahwa ketidakadilan hukum dalam serial ini direpresentasikan sebagai fenomena totalitas, bukan episode.

5.1.2 Makna Denotatif, Konotatif, dan Mitos Menurut Semiotika Roland Barthes

Analisis tiga tingkat Barthes dalam penelitian ini bukan sekadar kerangka pembacaan adalah alat untuk membongkar cara kerja ideologis yang membuat representasi dalam serial ini terasa seperti kebenaran, bukan seperti konstruksi. Berikut adalah temuan pada masing-masing tingkat beserta sintesisnya.

Pada tingkat denotasi, yang tampak adalah sistem hukum yang sedang beroperasi: hakim bersidang dengan toga resminya, aparat menginterogasi tersangka, narapidana mengenakan perangkat pengawasan di tubuhnya, ruang sidang tergelar lengkap dengan seluruh atributnya. Semua tanda pada level ini menghadirkan *penampilan* kelengkapan institusional hukum tampak ada, prosedur tampak berjalan, institusi tampak berfungsi. Itulah yang menjadikan pembacaan pada dua tingkat berikutnya menjadi bermakna: serial tidak

merepresentasikan ketiadaan hukum, melainkan hukum yang hadir secara formal namun beroperasi secara menyimpang.

Pada tingkat konotasi, tanda-tanda denotatif tersebut membawa muatan makna kultural dan sosial yang secara fundamental mempertanyakan legitimasi penampilan formalnya. Toga hakim yang secara denotatif adalah seragam jabatan secara konotatif berubah menjadi *kostum* yang memisahkan penampilan dari substansi ketika pemakainya menyembunyikan kokain dalam pulpen jabatannya. Pistol aparat yang secara denotatif adalah alat pertahanan institusional secara konotatif bergeser menjadi instrumen kepentingan personal ketika diarahkan ke kepala tersangka demi memenuhi kebutuhan dendam satu individu. *GPS tracker* yang secara denotatif adalah alat pemantauan teknis secara konotatif berubah menjadi penanda kondisi kepemilikan negara atas tubuh narapidana yang tidak pernah benar-benar bebas. Percakapan informal antar pejabat tinggi yang secara denotatif adalah obrolan biasa secara konotatif mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan yang seharusnya dibuat di ruang formal justru dikondisikan di luar jangkauan pengawasan publik.

Pada tingkat mitos, akumulasi tanda-tanda denotatif dan konotatif tersebut menaturalisasi dua proposisi ideologis yang bekerja secara sinergis. Mitos pertama, sistem hukum Indonesia secara struktural tidak dapat dipercaya dan tidak dapat direformasi dari dalam. Mitos ini tidak disampaikan melalui pernyataan eksplisit tokoh manapun diperlihatkan secara berulang melalui tanda-tanda yang secara kumulatif menumpuk menjadi evidensi yang terasa empiris. Korupsi yudisial direpresentasikan bukan sebagai penyimpangan oknum yang dapat diisolasi, melainkan sebagai jaringan terkoordinasi yang mencakup hakim, jaksa, pengacara, jenderal polisi, dan gubernur secara bersamaan. Itulah cara mitos Barthes beroperasi bukan melalui argumen, melainkan melalui akumulasi yang tampak seperti fakta.

Temuan ini menegaskan satu hal yang menjadi inti dari seluruh penelitian: representasi ketidakadilan hukum dalam serial *Bad Guys* (2025) adalah *konstruksi semiotik yang terencana*, bukan rekaman realitas. Serial memilih tanda-tanda tertentu, menempatkannya dalam konteks tertentu, dan membingkainya dengan cara tertentu dan dari keseluruhan pilihan itu muncul sebuah wacana ideologis yang kohesif tentang krisis keadilan. Tugas semiotika Barthes adalah membongkar mekanisme konstruksi itu, mengungkap bahwa apa yang terasa seperti kebenaran yang "sudah sewajarnya diketahui" sesungguhnya adalah hasil dari rangkaian keputusan representasi yang dapat dan perlu dibaca secara kritis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang terbagi menjadi saran akademis dan saran praktis:

5.2.1 Saran Akademis

1. Mengingat penelitian ini murni berfokus pada analisis teks media, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji bagaimana penerimaan dan persepsi audiens (*audience reception*) terhadap film serial *Bad Guys* (2025). Hal ini penting untuk melihat apakah mitos mengenai ketidakadilan hukum dan normalisasi *vigilante justice* diterima (*dominant*), dinegosiasikan (*negotiated*), atau justru ditolak (*oppositional*) oleh penonton dari berbagai latar belakang.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggabungkan analisis teks dengan metode wawancara mendalam kepada pihak pembuat film (sutradara, produser, dan aktor). Hal ini bertujuan untuk membongkar motif, intensi, dan proses kreatif di balik layar terkait pemilihan wacana kritik sosial, sehingga pemaknaan tidak hanya berhenti pada interpretasi teks oleh peneliti, melainkan mencakup dimensi produksi.

5.2.2 Saran Praktis

1. Penonton diharapkan dapat meningkatkan literasi media agar lebih kritis dalam mengonsumsi produk budaya populer. Penonton perlu menyadari bahwa film adalah konstruksi ideologis. Meskipun film ini menawarkan *vigilante justice* sebagai solusi moral yang seolah memuaskan di layar kaca, tindakan main hakim sendiri di dunia nyata tetaplah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak bisa dinormalisasi.
2. Pembuat film serial disarankan juga tetap bijak dan berhati-hati dalam mengatasi ambiguitas moral di dalam alur cerita. Sineas memiliki tanggung jawab moral untuk tidak terjebak pada kekerasan sepenuhnya sebagai satu-satunya jalan keluar dari permasalahan sistemik.

5.2.3 Saran Sosial

1. Institusi hukum diharapkan dapat menjadikan hal ini sebagai alarm sekaligus momentum untuk mempercepat perubahan struktural, membersihkan institusi dari praktik kolusi, dan meningkatkan transparansi penanganan kasus. Pemulihan komitmen institusi sangat penting agar masyarakat

merasa terlindungi dan tidak beralih mencari keadilan alternatif di luar jalur hukum resmi.

2. Masyarakat diharapkan semakin peka dan kritis dalam mengawal kasus-kasus hukum di sekitarnya agar tidak terjadi ketidakadilan struktural yang mengorbankan kelompok rentan. Lebih dari itu, masyarakat harus terus diedukasi untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur dukungan sosial yang beradab dan mengawasi jalannya peradilan, alih-alih menormalisasi tindakan main hakim sendiri yang hanya akan memicu rantai kekerasan baru di tengah masyarakat.



POLITEKNIK TEMPO

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh, M. (2025). Gender construction in original Netflix film: A representation study. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(1), 48–68.
<https://doi.org/10.46539/gmd.v7i1.529>
- Al Fiatur Rohmaniah. (2021). Kajian semiotika Roland Barthes. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 124–134.
<https://doi.org/10.51339/ittishol.v2i2.308>
- Alzyoud, S., & Makharesh, A. (2023). Racism as a tool: The myth of race to improve companies' profiles and stifle the dilemma. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://www.researchgate.net/publication/369032803>
- Annisa Febyanti, Bilqisti Kurrotul Aini, Andi Laila Qadrianti Putri, Berliana Putri Wiraka, Muhammad Althaf Faishal, & Nurul Amaliyah Putri. (2024). Pelanggaran pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam hukum acara pidana terkait kasus kekerasan dalam penyidikan. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 371–384.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1240>
- Ayomi, P. N. (2021). Gosip, hoaks, dan perempuan: Representasi dan resepsi khalayak terhadap film pendek "Tilik." *Rekam*, 17(1), 51–61.
<https://doi.org/10.24821/rekam.v17i1.4910>
- Bad Guys* diakses melalui <https://www.vidio.com/premier/11020/bad-guys> pada 20 Mei 2026
- Bastiar, D. (n.d.). Representasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam film. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<https://doi.org/10.22236/komunika.v9i2.9352>
- Bateson, R. (2021). The politics of vigilantism. *Comparative Political Studies*, 54(6), 923–955. <https://doi.org/10.1177/0010414020957692>
- Batubara, A. R., & Pratomo, N. W. (n.d.). Analisis semiotika Roland Barthes dalam film Mencuri Raden Saleh karya Angga Dwimas Sasongko. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Bethari, R. A. (2024). Kekuasaan dan seksualitas: Homofobia sebagai konstruksi sosial dalam perspektif Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(3), 430–436.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v7i3.75812>

By, S., & Nkrumah, D. O. (n.d.). A theoretical examination of contributing factors to the proliferation of political vigilantism: Evidence from Ghana. [Nama jurnal tidak tersedia].

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2023/12/CATAHU-LBH-Jakarta-2023.pdf>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Cupido, A. C. (2021). *The development of vigilantism in South Africa* [Tesis Magister, Stellenbosch University]. <https://scholar.sun.ac.za>

Dix, A. (2008). *Beginning film studies*. Manchester University Press.

Eren, İ., & Aktan, E. Ö. A. (2024). Beyond the silver screen: Exploring future public life through sociological film analysis. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241296074>

Fadilatul Janah, R. (n.d.). Penghapusan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia. [Nama jurnal tidak tersedia].

Fuady, M. N. (2023). Film sebagai teks budaya yang mengonstruksi makna ideologis. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/download/671/516/3586>

Gardenier, M. (2022). *Towards a vigilant society: From citizen participation to anti-migrant vigilantism*. British Academy. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197267080.001.0001>

Gbambu, A. R., Alawode, S. O., & Kassim, M. (2025). Film and tradition: Female representation in Northern Ghanaian cinema. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), 8–21. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2025.5.1.573>

Gibran, F., Zein, S., Kulsum, U., & Wijayani, Q. N. (2024). Fungsi dan peran media massa dalam film Habibie Ainun (analisis semiotika Roland Barthes). *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 4(1), 118–122. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1468>

- Gjylbegaj, V., & Radwan, A. F. (2025). Portrayal of gender roles in Emirati television dramas: A content analysis. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1506875>
- Gramigna, R., & Madisson, M. L. (2023). Unravelling semiotics in 2022: A year in review. *Sign Systems Studies*, 51(3–4), 709–733. <https://doi.org/10.12697/SSS.2023.51.3-4.09>
- Greenfield, S., Osborn, G., & Robson, P. (2025). Genre and cinematic justice: Towards a "rights-based" analysis. In S. Greenfield, G. Osborn, & P. Robson (Eds.), *Indian cinema and human rights: An intersectional tale* (pp. 25–43). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-6028-2_3
- Gunawan, I. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2022). Fenomena main hakim sendiri dalam masyarakat dan pandangan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Inspiring: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 75–84. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/20816>
- Idris, M. F. (2021). Access to justice for disability in the perspective of John Rawls theory (case of Demak Regency Indonesia). *Journal of Law and Legal Reform*, 2(3), 391–400. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486>
- Intan Sahwa, Hana Salsabila, Jubilla Hafitri, Annisa Salsabila, & David Nugraha Saputra. (2025). Vigilantisme dan ketimpangan penegakan hukum: Studi kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 503–516. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5924>
- Johnston, L. (1996). What is vigilantism? *British Journal of Criminology*, 36(2), 220–236. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014083>
- Kellner, D., & Ryan, M. (1988). *Camera politica: The politics and ideology of contemporary Hollywood film*. Indiana University Press.
- Krisnadi, L. A. (2023). Kritik terhadap ideologi pembangunan: Perspektif epistemicide Boaventura de Sousa Santos. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 337–346. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59925>

- Leliana, I., Ronda, M., & Lusianawati, H. (2021). Representasi pesan moral dalam film Tilik (analisis semiotik Roland Barthes). *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(2), 142–156. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.11302>
- Lu, S. (2023). How existing literary translation fits into film adaptations: The subtitling of neologisms in Harry Potter from a multimodal perspective. *Visual Communication*. <https://doi.org/10.1177/14703572221141959>
- Mogoş, A. A., & Trofin, C. (2025). Romanian televisuality in the post-broadcast era: Visual signature of popular news TV talk shows. *Media and Communication*, 13. <https://doi.org/10.17645/mac.9423>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Monanda, D., & Wilyanti, L. S. (2023). Kajian semiotika Roland Barthes pada cerpen Tamu karya Budi Darma. *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.33087/aksara.v7i1.491>
- Mulyana, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muswede, T. (2025). Student activism and the decolonial discourse in South African higher education: Analysis of the #FeesMustFall documentary (2018). *African Perspectives of Research in Teaching and Learning*, 9(2). <https://doi.org/10.70875/v9i2article7>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2022). Excerpt from justice as fairness. In A. Metcalf (Ed.), *Ethics of data and analytics* (pp. 277–281). Auerbach Publications. <https://doi.org/10.1201/9781003278290-41>
- Reddan, M. C., Garcia, S. B., Golarai, G., Eberhardt, J. L., & Zaki, J. (2024). Film intervention increases empathic understanding of formerly incarcerated people and support for criminal justice reform. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(44), e2322819121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2322819121>
- Riandika Risdarminto, R., & Nanda, E. (2024). Representasi premanisme dalam film pendek Loz Jogjakartoz (analisis semiotika Roland Barthes). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)*, 5(3). <https://journal.stmiki.ac.id>

- Rizov, V. (2023). Cinema. In V. Rizov, *Urban crime control in cinema: Fallen guardians and the ideology of repression* (pp. 15–46). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-12978-0_2
- Sakina Shepia Maharani, Ainal Mardiyah, Nur Fatihah, Arita Destianingsih, & Ari Satria. (2022). Representation of racism in Antebellum movie. *Journal of Pedagogy and Education Science*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.56741/jpes.v1i1.4>
- Sobur, A. (2022). *Semiotika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suliandi, M., & Wagiman, W. (2024). Edukasi larangan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 535–548.
<https://doi.org/10.62335/2hgf4b52>
- Syahrul Huda, A., & Solli Nafsika, S. (2023). Film sebagai media dalam mengubah cara pandang manusia dalam prinsip kemanusiaan. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Tebaldi, C., & Nygreen, K. (2022). Opening or impasse? Critical media literacy pedagogy in a posttruth era. *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies*, 22(2), 143–153.
<https://doi.org/10.1177/15327086211065810>
- Temuan Komnas HAM soal Kekerasan Aparat ke Warga Wadas: Ada yang Ditendang, Dipukul Kepalanya
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/16033741/temuan-komnas-ham-soal-kekerasan-aparat-ke-warga-wadas-ada-yang-ditendang?page=all>.
- The principles of justice theory in the aspect of criminal. (2023). *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/JLPG/130-08>
- Wagner, A., & Zheng, Y. (2021). Eduardo C. B. Bittar (2020): Semiotics, law & art: Between theory of justice and theory of law. *International Journal of Legal Discourse*, 6(2), 381–390. <https://doi.org/10.1515/ijld-2021-2060>
- Welsh, A., Fleming, T., & Dowler, K. (2011). Constructing crime and justice on film: Meaning and message in cinema. *Contemporary Justice Review*, 14(4), 457–476.
<https://doi.org/10.1080/10282580.2011.616376>
- Wijaya, T. (2021). Konsekuensi representasi propaganda budaya dan ideologi dalam film. *IMAJI: Film, Fotografi, Televisi & Media Baru*, 12(2).
<https://doi.org/10.52290/i.v12i2.47>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis



Alffito Deannofal adalah penulis dari Tugas Akhir ini. Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2004, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ngudiarto dan Ibu Shofiatul Umah. Saat ini penulis berdomisili di daerah Cakung, Jakarta Timur. Untuk keperluan korespondensi akademis maupun komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui alamat email: alffitod3annofal@gmail.com

Perjalanan pendidikan penulis dimulai di SDN 20 Pagi (2010-2016), kemudian melanjutkan ke MtsN 20 (2016-2019), dan menempuh pendidikan menengah atas di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta (2019-2022). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi untuk meraih gelar Sarjana Terapan (S.Tr) pada program studi Ilmu Komunikasi di Politeknik Tempo.

Berkat ketekunan, motivasi tinggi, serta usaha dan doa yang konsisten, penulis berhasil menyelesaikan program studi tersebut pada tahun 2026 dengan judul Tugas Akhir: "REPRESENTASI KETIDAKADILAN HUKUM DALAM FILM SERIAL "BAD GUYS" (2025) VERSI INDONESIA (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)". Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, memperkaya wawasan keilmuan, serta membawa manfaat bagi masyarakat kas.

Lampiran 2 Cek Plagiasi Turnitin



**POLITEKNIK
TEMPO**

POLITEKNIK TEMPO
Gedung TEMPO Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210

☎ 021-5360409 ✉ admin@politekniktempo.ac.id
🌐 www.politekniktempo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 010/Poltem-Perpus/Plagiasi/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reva Wijayanti, S.IP.
NIK : 22NA0020
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Dengan ini kepala Perpustakaan Politeknik Tempo menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : Alffito Deannofal
NIM : 221310006
Prodi / Angkatan : Produksi Media / 2022
Judul : Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film Serial "Bad Guys" (2025)
Versi Indonesia (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Tugas akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi *Turnitin* dengan hasil 6% dan dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku pada setiap bab naskah skripsi/TA yang telah disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk sidang akhir dan pengurusan surat bebas pustaka.

Jakarta, 04 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,



**POLITEKNIK
TEMPO**

Reva Wijayanti, S.IP.

Tembusan :

1. Wadir Akademik
2. Ketua Program Studi

Top Sources

5% Internet sources
1% Publications
2% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.kapanlagi.com	<1%
2	Internet	eskripsi.usm.ac.id	<1%
3	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
4	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
5	Internet	123dok.com	<1%
6	Internet	ejournal.appisi.or.id	<1%
7	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
8	Internet	docplayer.info	<1%
9	Internet	jurnal.erapublikasi.id	<1%
10	Internet	digilib.unimed.ac.id	<1%
11	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

12	Internet	www.layar.id	<1%
13	Internet	eprints.iainu-kebumen.ac.id	<1%
14	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
15	Internet	jurnal.mediaakademik.com	<1%
16	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
17	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
18	Internet	www.dailysia.com	<1%
19	Internet	mengeja.id	<1%
20	Internet	www.zanderz.net	<1%
21	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
22	Internet	link.springer.com	<1%
23	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
24	Internet	repository.usni.ac.id	<1%
25	Internet	siat.ung.ac.id	<1%

26	Student papers	iGroup	<1%
27	Student papers	LSPR Communication & Business Institute	<1%
28	Internet	core.ac.uk	<1%
29	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
30	Student papers	Universitas Trunojoyo	<1%
31	Internet	kc.umn.ac.id	<1%
32	Student papers	Singapore International School Kelapa Gading	<1%
33	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya	<1%
34	Student papers	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	<1%
35	Student papers	Universitas Terbuka	<1%
36	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
37	Internet	api-repo.unisan.ac.id	<1%
38	Internet	jsal.ut.ac.ir	<1%
39	Student papers	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	<1%

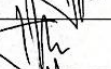
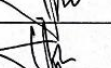
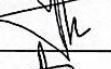
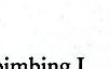
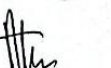
40	Publication	M. Supian Noor, Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni. "Paradigma Baru H...	<1%
41	Publication	Raihan Fadhillah Santoso, Ali Alamsyah Kusumadinata, Undang Suryatna. "Repre...	<1%
42	Publication	Robby Haryanto. "Representasi Optimisme dalam Relasi Pasangan: Analisis Semi...	<1%
43	Student papers	Sriwijaya University	<1%
44	Student papers	Universitas Katolik Widya Mandala	<1%
45	Internet	files.eric.ed.gov	<1%
46	Internet	puskesmaslhoksukon.com	<1%
47	Internet	tatkala.co	<1%
48	Internet	www.darulhuda.or.id	<1%
49	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
50	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
51	Internet	tirto.id	<1%
52	Internet	www.scribd.com	<1%
53	Publication	Agnes Karina Pritha Atmani, Tegar Andito. "Animasi sebagai Wacana: Reproduksi ...	<1%

54	Publication	Ryo Riandika Risdarminto, Ertika Nanda. "Representasi Premanisme dalam Film P...	<1%
55	Student papers	Universitas Airlangga-1	<1%
56	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
57	Student papers	Universitas Khairun	<1%
58	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
59	Internet	justisia.com	<1%
60	Internet	m.batamtoday.com	<1%
61	Internet	media.neliti.com	<1%
62	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
63	Internet	repository.sttkadesiyogyakarta.ac.id	<1%
64	Internet	repository.unisma.ac.id	<1%
65	Internet	www.slideshare.net	<1%

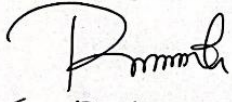
Lampiran 3 Form Bimbingan

 POLITEKNIK TEMPO	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK TEMPO PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA	Form TA-01
	LEMBAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR	

Nama : ALFFITO DEANNOFA
 NIM : 221310006
 Program Studi : Produksi Media
 Pembimbing I : Mba. Ayu
 Judul Tugas Akhir : Representasi Ketidakadilan hukum dalam Film Serial "Bad Guy" (2025) versi Indonesia (Analisis Semiotika Roland Barthes)

No	Hari, Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 3 Maret	Revisi Bab 1, 4, 111	
2.	Rabu, 11 Maret	Memeriksa revisi pada Bab IV	
3.	Kamis, 16 Maret	revisi gambar umum	
4.	Selasa, 31 Maret	Memeriksa hasil penelitian	
5.	Senin, 1 April	revisi hasil penelitian	
6.	Senin, 1 April	revisi bagian pendahuluan	
7.	Rabu, 13 Mei	Memeriksa hasil penelitian	
8.	Senin, 16 Mei	Revisi bab IV hasil penelitian & pembahasan	
9.	Senin, 22 Mei	revisi bab 4-5	
10.	Senin, 22 Mei	Memeriksa bab IV bagian subbab 4.3, 4.2, 4.1 dan kesimpulan & saran	

Acc.
- kelengkapan

Mengetahui
 Ketua Program Studi,

 Rosdrana -

Pembimbing I





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK TEMPO
PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA

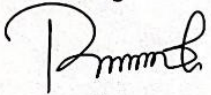
Form
TA-01

LEMBAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ALFRED PRAMUDITA
NIM : 22510006
Program Studi : Produksi Media
Pembimbing II : Mba. Fitky
Judul Tugas Akhir : Representasi Kehidupan Hukum dalam Film serial "Bad Guys" (2015)
Versi Indonesia (Analisis Sintaksa Roland Barthes)

No	Hari, Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 3 Maret	Revisi Bab I, II, III	f.
2.	Rabu, 11 Maret	Revisi pada Bab IV	f.
3.	Kamis, 26 Maret	Revisi Galatama Uraian	f.
4.	Selasa, 31 Maret	Menyisipkan hasil penelitian	f.
5.	Senin, 13 April	Revisi hasil penelitian	f.
6.	Senin, 24 April	Revisi bab yang revisi	f.
7.	Rabu, 13 Mei	Menyisipkan hasil penelitian	f.
8.	Senin, 18 Mei	Revisi bab IV hasil penelitian & penelitian	f.
9.	Jumat, 22 Mei	Menyisipkan sub bab 4.3	f.
10.	Senin, 25 Mei	Menyisipkan bab IV bagian sub bab 4.3, 4.4, 4.5 dan kesimpulan & saran	f.

Mengetahui
Ketua Program Studi,


- Rosdiana -

Pembimbing II

